# PERUBAHAN PPAS T.A 2023

## TIM ANGGARAN PEMERINTAH KAB. MAROS



# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun 2023, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, yang sebelumnya diawali dengan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan DPRD Kabupaten Maros Nomor 57/NKB/918/VIII/2022 dan 04/NK/DPRD/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Rancangan perubahan PPAS disusun dengan tahapan:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
c. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
d. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Rancangan Perubahan PPAS yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian diserahkan kepada Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk dibahas bersama. Hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan diperoleh Nota Kesepakatan Bersama Perubahan PPAS Tahun 2023, dan ditanda tangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Perubahan PPAS Kabupaten Maros Tahun 2023 memuat rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023. Dengan demikian pembagian plafon anggaran bisa lebih mengarah kepada kebijakan berdasarkan program prioritas atau *Money Folllow Program* dan tentunya diharapkan bahwa penggunaaan anggaran masing-masing program bisa lebih transparan dan akuntabel.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Menetapkan plafon anggaran terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD;
2. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023;
3. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## 1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Thuan 2023 Nomor 78);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8);
35. Peraturan Bupati Maros Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 38);

36. Peraturan Bupati Maros Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 130), sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 24);
37. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1176/XII/Tahun 2022 tentang Estimasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
38. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Tahun 2024;
39. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 50.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2022.

# BAB II

# RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berikut ringkasan perubahan pendapatan daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**
**Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah**
**Tahun Anggaran 2023**

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **296.932.440.614** | **308.082.440.614** | **11.150.000.000** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 172.030.000.000 | 176.180.000.000 | 4.150.000.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 15.685.000.000 | 20.685.000.000 | 5.000.000.000 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.033.936.654 | 11.033.936.654 | - |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 98.183.503.960 | 100.183.503.960 | 2.000.000.000 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.140.859.806.000** | **1.157.187.814.249** | **16.328.008.249** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.076.755.353.000 | 1.077.740.991.115 | 985.638.115 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 64.104.453.000 | 79.446.823.134 | 15.342.370.134 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.437.792.246.614** | **1.465.270.254.863** | **27.478.008.249** |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **43.896.406.000** | **119.112.762.521** | **75.216.356.521** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 43.896.406.000 | 119.112.762.521 | 75.216.356.521 |
| | **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **43.896.406.000** | **119.112.762.521** | **75.216.356.521** |
| | **JUMLAH PENERIMAAN DAERAH** | **1.481.688.652.614** | **1.584.383.017.384** | **102.694.364.770** |

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Maros diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp27.478.008.249,00** menjadi **Rp1.465.270.254.863,00** pada perubahan anggaran tahun 2023.

# BAB III
# PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya merupakan rumusan prospektif dan direktif-indikatif bagi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas dan isu strategis pada tahun bersangkutan. Dalam perkembangannya, perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2023, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan memertimbangkan kebutuhan belanja daerah, maka perubahan prioritas belanja daerah tahun 2023 dimungkinkan dalam Perubahan APBD tahun 2023.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan 2023 yaitu **"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Melalui Infrasruktur Wilayah dan Peningkatan Kualitas SDM".** Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun 2022, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah:

**Tabel 3.1**

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Maros**

**Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan** | | | | |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | |
| | | | Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | |
| | | | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | |
| | | | Persentase Kunjungan Wisata | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | |
| | | | Persentase Permohonan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diselesaikan Dalam<br>Waktu yang singkat, Murah, dan Mudah | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | |
| | | | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di<br>Tempat Pemasaran | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan<br>Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| **2** | **Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | |
| | | | Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | |
| | | | Persentase Pengurangan Sampah pada wilayah perkotaan yang terfasilitasi | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | |
| | | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | |
| | | | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | |
| | | | Persentase areal kawasan kumuh | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | |
| | | | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | umlah Aparatur Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan, Waawasan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| 3 | **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase Penduduk Usia 5 -18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Cakupan Kurikulum Muatan Lokal yang di kembangkan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Perizinan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | |
| | | | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan<br>Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan<br>Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan<br>Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan<br>Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase Rencana Ketenaga kerjaan Yang ditindak Lanjuti | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis kompetensi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | |
| | | | Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN | |
| | | | | PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| | | | persentase perempuan di lembaga Pemerintah dan Lembagaswasta | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perempuan yang diselesaikan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | |
| | | | Rasio KDRT | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang diselesaikan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | |
| | | | Persentase Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Peemerintahan | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjan g Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | |
| | | | Persentase organisasi pemuda yang aktif | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Cakupan pembinaan olahraga | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | |
| | | | Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi,Sosial Kemasyrakatan, Organisasi organisasi dan mengeluarkan pendapat | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | |
| | | | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | |
| | | | Persentase penambahan koleksi nasional dan naskah kuno perpustakaan yang lengkap | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase Kesesuaian Kawasan Transmigrasi dengan RTRW | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase transmigran swakarsa | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase Pengembangan kawasan transmigrasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan | | |
| | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PuPersentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Di Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 4 | **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | |
| | | | Persentase Peserta Didik Yang Menguasai Kesenian Tradisional Lokal | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | |
| | | | Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | |
| | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | |
| | | | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 5 | **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar** | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan<br>Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan<br>Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatanan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan<br>Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai<br>Standar SPM Perumahan | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| | | | Persentase Pemukiman yang Tertata | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan<br>Evakuasi Sesuai SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | |
| | | | Persentas e Aplikasi Informati ka Yang Terintegra si Dalam SPBE | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Pertumbuhan Investasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Perusahaan Yang Menyamp aikan Laporan Kegiatan Penanam an Modal Secara<br>Tepat Waktu | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | |
| | | | Tersedian ya sistem data dan statistik yang terintegr | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, | |
| | | | | DAN PERSANDIAN | |
| | | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | |
| | | | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| | | | Presentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | |
| | | | Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi Masyarakat | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| **6** | **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim** | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Cakupan Wilayah Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| | | | Persentase sampah yang tertangani | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Pembinaan Penanganan Covid-19 dan pasca Coviddi Tingkat Desa dan Kelurahan | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| **7** | **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik** | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | |
| | | | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Laporan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Secara Cepat, Murah, dan Mudah | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | | | |
| | | | Persentase Luas Tanah Ulayat Yang Mendapatkan Penetapan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | | | |
| | | | Persentase Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | |
| | | | Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang | | |
| | | | berda Dalam Kondisi Baik | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | umlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | |
| | | | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | |
| | | | Persentase pemanfaatan data dan Informasi Kependudukan | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| | | | Persentase layanan angkutan darat | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | |
| | | | Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/<br>pelabuhan perahu penyeberangan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinana | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Moda | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | |
| | | | Persentase dokumen arsip yang diakuisisi dan terpelihara | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | |
| | | | Persentase arsip yang menjadi bahan informasi | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | | | Perentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | |
| | | | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan<br>Perundang - Undangan | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | | Persentase pelayanan pembahasan kerja sama Daerah | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | ersentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Realisasi Pendapatan | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| | | | Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| | | | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | |
| | | | Nilai SPIP | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | | Persentase Pelanggaran Pegawai | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | |
| | | | Nilai Kapabilitas APIP | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Layanan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Layanan Urusan Perangkt Daerah Pemerintahan Umum Perangkat | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daera | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Pembinaan terhadap aparatur dan Masyarakat tentang Idologi Negara | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | 0Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di KecamatanPersentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | | Persentasen Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Di Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Pembinaan terhadap aparatur dan Masyarakat tentang Idologi Negara | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 Dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang-Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang -Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |

# BAB III
# PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya merupakan rumusan prospektif dan direktif-indikatif bagi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas dan isu strategis pada tahun bersangkutan. Dalam perkembangannya, perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2023, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan memertimbangkan kebutuhan belanja daerah, maka perubahan prioritas belanja daerah tahun 2023 dimungkinkan dalam Perubahan APBD tahun 2023.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan 2023 yaitu **"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Melalui Infrasruktur Wilayah dan Peningkatan Kualitas SDM".** Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun 2022, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah:

**Tabel 3.1**

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Maros**

**Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan** | | | | |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | |
| | | | Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | |
| | | | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | |
| | | | Persentase Kunjungan Wisata | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | |
| | | | Persentase Permohonan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diselesaikan Dalam<br>Waktu yang singkat, Murah, dan Mudah | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | |
| | | | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di<br>Tempat Pemasaran | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan<br>Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| **2** | **Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | |
| | | | Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | |
| | | | Persentase Pengurangan Sampah pada wilayah perkotaan yang terfasilitasi | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | |
| | | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | |
| | | | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | |
| | | | Persentase areal kawasan kumuh | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | |
| | | | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | umlah Aparatur Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan, Waawasan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| 3 | **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase Penduduk Usia 5 -18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Cakupan Kurikulum Muatan Lokal yang di kembangkan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Perizinan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | |
| | | | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan<br>Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan<br>Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan<br>Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan<br>Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase Rencana Ketenaga kerjaan Yang ditindak Lanjuti | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis kompetensi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | |
| | | | Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN | |
| | | | | PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| | | | persentase perempuan di lembaga Pemerintah dan Lembagaswasta | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perempuan yang diselesaikan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | |
| | | | Rasio KDRT | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang diselesaikan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | |
| | | | Persentase Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Peemerintahan | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjan g Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | |
| | | | Persentase organisasi pemuda yang aktif | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Cakupan pembinaan olahraga | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | |
| | | | Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi,Sosial Kemasyrakatan, Organisasi organisasi dan mengeluarkan pendapat | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | |
| | | | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | |
| | | | Persentase penambahan koleksi nasional dan naskah kuno perpustakaan yang lengkap | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase Kesesuaian Kawasan Transmigrasi dengan RTRW | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase transmigran swakarsa | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase Pengembangan kawasan transmigrasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan | | |
| | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PuPersentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Di Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 4 | **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | |
| | | | Persentase Peserta Didik Yang Menguasai Kesenian Tradisional Lokal | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | |
| | | | Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | |
| | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | |
| | | | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 5 | **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar** | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan<br>Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan<br>Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatanan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan<br>Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai<br>Standar SPM Perumahan | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| | | | Persentase Pemukiman yang Tertata | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | |
| | | | Persentas e Aplikasi Informati ka Yang Terintegra si Dalam SPBE | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Pertumbuhan Investasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Perusahaan Yang Menyamp aikan Laporan Kegiatan Penanam an Modal Secara Tepat Waktu | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | |
| | | | Tersedian ya sistem data dan statistik yang terintegr | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, | |
| | | | | DAN PERSANDIAN | |
| | | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | |
| | | | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| | | | Presentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | |
| | | | Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi Masyarakat | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| **6** | **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim** | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Cakupan Wilayah Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| | | | Persentase sampah yang tertangani | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Pembinaan Penanganan Covid-19 dan pasca Coviddi Tingkat Desa dan Kelurahan | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| **7** | **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik** | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | |
| | | | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Laporan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Secara Cepat, Murah, dan Mudah | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | | | |
| | | | Persentase Luas Tanah Ulayat Yang Mendapatkan Penetapan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | | | |
| | | | Persentase Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | |
| | | | Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang | | |
| | | | berda Dalam Kondisi Baik | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | umlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | |
| | | | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | |
| | | | Persentase pemanfaatan data dan Informasi Kependudukan | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| | | | Persentase layanan angkutan darat | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | |
| | | | Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/<br>pelabuhan perahu penyeberangan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinana | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Moda | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | |
| | | | Persentase dokumen arsip yang diakuisisi dan terpelihara | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | |
| | | | Persentase arsip yang menjadi bahan informasi | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | | | Perentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | |
| | | | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan<br>Perundang - Undangan | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | | Persentase pelayanan pembahasan kerja sama Daerah | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | ersentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Realisasi Pendapatan | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| | | | Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| | | | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | |
| | | | Nilai SPIP | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | | Persentase Pelanggaran Pegawai | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | |
| | | | Nilai Kapabilitas APIP | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Layanan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Layanan Urusan Perangkt Daerah Pemerintahan Umum Perangkat | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daera | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Pembinaan terhadap aparatur dan Masyarakat tentang Idologi Negara | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | 0Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di KecamatanPersentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | | Persentasen Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Di Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Pembinaan terhadap aparatur dan Masyarakat tentang Idologi Negara | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 Dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang-Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang -Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |

**Tabel 3.2**
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | **1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik** | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 291.716.953.385 | 305.015.364.330 |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 187.096.600 | 161.051.200 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 56.435.059.120 | 56.436.840.449 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 327.868.000 | 354.368.000 |
| | | | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 55.140.730.670 | 55.192.618.653 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 16.092.308.273 | 16.230.570.112 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 21.700.000 | 21.700.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | |
| | | | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 462.050.000 | 549.018.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 8.394.978.846 | 8.105.222.546 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 5.395.592.000 | 5.370.074.000 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 7.685.551.471 | 7.972.764.273 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 151.175.500 | 185.013.500 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 290.442.000 | 368.321.392 |

# BAB III
# PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya merupakan rumusan prospektif dan direktif-indikatif bagi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan prioritas dan isu strategis pada tahun bersangkutan. Dalam perkembangannya, perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2023, serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan memertimbangkan kebutuhan belanja daerah, maka perubahan prioritas belanja daerah tahun 2023 dimungkinkan dalam Perubahan APBD tahun 2023.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan 2023 yaitu **"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Melalui Infrasruktur Wilayah dan Peningkatan Kualitas SDM".** Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun 2022, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah:

**Tabel 3.1**

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Maros**

**Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan** | | | | |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | |
| | | | Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | |
| | | | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | |
| | | | Persentase Kunjungan Wisata | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | |
| | | | Persentase Permohonan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diselesaikan Dalam<br>Waktu yang singkat, Murah, dan Mudah | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | |
| | | | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di<br>Tempat Pemasaran | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan<br>Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| **2** | **Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | |
| | | | Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | |
| | | | Persentase Pengurangan Sampah pada wilayah perkotaan yang terfasilitasi | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | |
| | | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | |
| | | | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | |
| | | | Persentase areal kawasan kumuh | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | |
| | | | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | umlah Aparatur Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan, Waawasan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| 3 | **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing** | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase Penduduk Usia 5 -18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Cakupan Kurikulum Muatan Lokal yang di kembangkan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | |
| | | | Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Perizinan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | |
| | | | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan<br>Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan<br>Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan<br>Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan<br>Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase Rencana Ketenaga kerjaan Yang ditindak Lanjuti | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis kompetensi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | |
| | | | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | |
| | | | Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN | |
| | | | | PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| | | | persentase perempuan di lembaga Pemerintah dan Lembagaswasta | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perempuan yang diselesaikan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | |
| | | | Rasio KDRT | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang diselesaikan | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | |
| | | | Persentase Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Peemerintahan | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjan g Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | |
| | | | Persentase organisasi pemuda yang aktif | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Cakupan pembinaan olahraga | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | |
| | | | Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi,Sosial Kemasyrakatan, Organisasi organisasi dan mengeluarkan pendapat | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | |
| | | | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | |
| | | | Persentase penambahan koleksi nasional dan naskah kuno perpustakaan yang lengkap | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase Kesesuaian Kawasan Transmigrasi dengan RTRW | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase transmigran swakarsa | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | | | Persentase Pengembangan kawasan transmigrasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan | | |
| | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PuPersentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Di Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | |
| | | | Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 4 | **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | |
| | | | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | |
| | | | Persentase Peserta Didik Yang Menguasai Kesenian Tradisional Lokal | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | |
| | | | Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | |
| | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | |
| | | | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 5 | **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar** | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan<br>Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan<br>Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatanan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan<br>Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai<br>Standar SPM Perumahan | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| | | | Persentase Pemukiman yang Tertata | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan<br>Evakuasi Sesuai SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | |
| | | | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | |
| | | | Persentas e Aplikasi Informati ka Yang Terintegra si Dalam SPBE | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Pertumbuhan Investasi | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Perusahaan Yang Menyamp aikan Laporan Kegiatan Penanam an Modal Secara<br>Tepat Waktu | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | |
| | | | Tersedian ya sistem data dan statistik yang terintegr | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, | |
| | | | | DAN PERSANDIAN | |
| | | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| | | | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | |
| | | | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| | | | Presentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | |
| | | | Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi Masyarakat | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| **6** | **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim** | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | Persentase Cakupan Wilayah Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| | | | Persentase sampah yang tertangani | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Pembinaan Penanganan Covid-19 dan pasca Coviddi Tingkat Desa dan Kelurahan | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| **7** | **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik** | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | |
| | | | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Laporan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Secara Cepat, Murah, dan Mudah | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | | | |
| | | | Persentase Luas Tanah Ulayat Yang Mendapatkan Penetapan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | | | |
| | | | Persentase Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | |
| | | | Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang | | |
| | | | berda Dalam Kondisi Baik | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | umlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | |
| | | | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | |
| | | | Persentase pemanfaatan data dan Informasi Kependudukan | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| | | | Persentase layanan angkutan darat | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | |
| | | | Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/<br>pelabuhan perahu penyeberangan | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinana | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | |
| | | | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Moda | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | |
| | | | Persentase dokumen arsip yang diakuisisi dan terpelihara | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | |
| | | | Persentase arsip yang menjadi bahan informasi | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | |
| | | | Perentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | |
| | | | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan<br>Perundang - Undangan | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | | Persentase pelayanan pembahasan kerja sama Daerah | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | ersentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Realisasi Pendapatan | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| | | | Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | |
| | | | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | |
| | | | Nilai SPIP | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | | Persentase Pelanggaran Pegawai | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | |
| | | | Nilai Kapabilitas APIP | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Layanan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Layanan Urusan Perangkt Daerah Pemerintahan Umum Perangkat | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daera | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Pembinaan terhadap aparatur dan Masyarakat tentang Idologi Negara | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | 0Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di KecamatanPersentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | | Persentasen Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Di Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Pembinaan terhadap aparatur dan Masyarakat tentang Idologi Negara | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | |
| | | | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 Dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang-Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang -Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang - Undangan | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | | |
| | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 488.443.000 | 510.963.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Laporan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 413.565.400 | 449.245.400 |
| | | | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 4.088.236.202 | 4.026.783.137 |
| | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 5.418.822.575 | 5.685.492.562 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 15.850.000 | 15.850.000 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 372.267.600 | 375.777.600 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | |
| | | | persentase perempuan di lembaga Pemerintah dan Lembagaswasta | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 47.200.000 | 47.200.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 197.600.000 | 197.600.000 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.298.020.768 | 4.478.664.425 |
| | | | umlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 69.570.000 | 69.570.000 |
| | | | --- | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 119.336.500 | 119.336.500 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN | 42.976.300 | 42.976.300 |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | PENCATATAN SIPIL | | |
| | | | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 421.833.500 | 421.833.500 |
| | | | umlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 17.072.000 | 17.072.000 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | |
| | | | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 204.525.000 | 204.525.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | |
| | | | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 470.126.000 | 470.126.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | |
| | | | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | | | |
| | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10.894.000 | 10.894.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4.332.011.015 | 4.491.748.018 |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | | | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 108.257.000 | 107.049.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | |
| | | | Persentase layanan angkutan darat | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 1.107.160.000 | 1.107.160.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | |
| | | | --- | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 9.250.000 | 9.250.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Peemerintahan | | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 917.605.465 | 908.845.465 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 4.682.682.376 | 4.689.637.525 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | |
| | | | Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 369.313.000 | 479.438.236 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | |
| | | | Persentas e Aplikasi Informati ka Yang Terintegra si Dalam SPBE | | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 479.600.000 | 478.234.764 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 7.673.095.024 | 7.140.854.387 |
| | | | Persentase Layanan Penunjan g Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 8.555.737.629 | 8.378.165.117 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | |
| | | | Tersedian ya sistem data dan statistik yang terintegr | | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 73.468.000 | 73.468.000 |
| | | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 73.468.000 | 73.468.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 49.122.000 | 49.122.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 5.752.436.391 | 5.708.345.944 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 70.850.000 | 70.850.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | |
| | | | Persentase dokumen arsip yang diakuisisi dan terpelihara | | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 38.140.000 | 33.160.000 |
| | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | | |
| | | | Persentase arsip yang menjadi bahan informasi | | | |
| | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 27.460.000 | 27.460.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | 5.972.757.241 | 6.072.972.538 |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, | | | |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.009.077.588 | 1.027.638.472 |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga | | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 7.533.746.521 | 6.907.913.764 |
| | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,Pemuda dan Olahraga | | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 54.000.000 | 681.530.200 |
| | | | Perentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 1.090.089.943 | 1.744.102.343 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 150.000 | 150.000 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 16.222.976.598 | 16.818.156.251 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 32.367.104.931 | 33.192.176.709 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | |
| | | | Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan | | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 2.522.308.000 | 2.338.548.000 |
| | | | Presentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan | | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 536.479.900 | 536.444.900 |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | |
| | | | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan | | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 284.700.000 | 307.864.419 |
| | | | Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan | | | |
| | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 3.046.326.900 | 3.046.326.900 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | 26.174.228.920 | 26.051.549.165 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | |
| | | | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan | | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | 9.078.082.000 | 9.486.072.000 |
| | | | Persentase pelayanan pembahasan kerja sama Daerah | | | |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | 440.720.000 | 510.720.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 5.625.270.218 | 5.107.783.964 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | ersentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 562.503.000 | 562.503.000 |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 266.495.750 | 266.495.750 |
| | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 386.853.045 | 452.853.045 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 246.061.700 | 264.541.700 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan | | | |
| | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 51.919.311.207 | 53.012.312.760 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 11.508.521.766 | 11.630.322.010 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | |
| | | | Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target | | | |
| | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 152.071.925.600 | 152.071.925.600 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah | | | |
| | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3.043.145.500 | 3.043.145.500 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| | | | Persentase Realisasi Pendapatan | | | |
| | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1.121.155.500 | 1.185.863.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.027.506.195 | 1.101.983.195 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4.487.384.375 | 4.611.654.625 |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian | | | |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 272.599.000 | 275.240.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| | | | Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.073.771.000 | 997.290.000 |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | |
| | | | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 438.605.000 | 409.915.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 21.380.000 | 21.380.000 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 8.325.701.705 | 8.083.790.264 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | |
| | | | Nilai SPIP | | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 199.220.000 | 299.350.000 |
| | | | Persentase Pelanggaran Pegawai | | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 4.617.110.000 | 4.884.570.000 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | |
| | | | Nilai Kapabilitas APIP | | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 273.770.000 | 247.625.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 4.502.800.114 | 4.487.904.129 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 254.854.500 | 333.584.500 |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 3.740.014.536 | 3.917.212.326 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | 3.656.942.735 | 3.542.492.981 |
| | | | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | | Persentase Layanan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 10.500.000 | 20.500.000 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 2.720.000.998 | 2.688.171.222 |
| | | | Persentase Layanan Urusan Perangkt Daerah Pemerintahan Umum Perangkat | | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 55.882.500 | 119.266.725 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | 3.240.408.826 | 2.989.138.586 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | 249.096.040 | 328.111.040 |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | 2.960.068.579 | 2.988.286.873 |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | 7.884.848.461 | 8.054.858.157 |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daera | | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | 4.455.000 | 4.455.000 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | 2.357.317.298 | 2.418.358.416 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | 5.948.269.211 | 5.768.037.699 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | 2.225.366.439 | 2.316.432.081 |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 9.947.000 | 9.947.000 |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 85.382.000 | 128.882.000 |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 1.871.546.926 | 1.999.551.698 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 114.095.290 | 116.095.290 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 2.473.407.632 | 2.632.818.683 |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | 2.491.052.351 | 2.442.020.545 |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | 4.503.309.322 | 4.560.159.295 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 837.050.000 | 837.050.000 |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 139.769.000 | 139.769.000 |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | 400.800.000 | 413.600.000 |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | 120.000.000 | 120.000.000 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 183.318.000 | 199.218.000 |
| | | | Persentase Pembinaan terhadap aparatur dan Masyarakat tentang Idologi Negara | | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 65.750.000 | 65.750.000 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | 183.275.000 | 179.600.000 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | 340.400.000 | 340.400.000 |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | 2.331.350.000 | 2.331.350.000 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PuPersentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | 11.910.000 | 11.910.000 |
| | | | 0Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | 1.231.200.000 | 1.257.000.000 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | 1.360.955.000 | 1.386.755.000 |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | 10.700.000 | 10.700.000 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di KecamatanPersentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | 5.075.000 | 5.075.000 |
| | | | --- | | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | 4.050.000 | 4.050.000 |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 13.400.000 | 13.400.000 |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 21.050.000 | 21.055.000 |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | 1.272.160.000 | 1.272.160.000 |
| | | | Persentasen Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 1.875.000 | 1.875.000 |
| | | | persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi Masyarakat | | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 201.000.000 | 201.000.000 |
| | | | Persentase Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 40.625.000 | 40.625.000 |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | 1.500.000 | 0 |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Di Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | 1.402.400.000 | 1.402.400.000 |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | 47.690.000 | 51.375.000 |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | 72.041.000 | 51.541.000 |
| | | | Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | 831.945.000 | 835.945.000 |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | 34.200.000 | 50.690.000 |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |
| | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | 4.600.000 | 4.600.000 |
| | | | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 Dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | 2.650.000 | 2.650.000 |
| | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | 1.470.000 | 1.470.000 |
| | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | 1.470.000 | 1.470.000 |
| | | | Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | 2.050.000 | 2.050.000 |
| | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 9.998.700 | 9.998.700 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 86.104.225 | 39.420.000 |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | 71.500.000 | 71.500.000 |
| | | | | KECAMATAN TURIKALE | 62.000.000 | 60.250.000 |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | 88.230.000 | 98.730.000 |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | 62.815.000 | 62.815.000 |
| | | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 49.650.000 | 49.650.000 |
| | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | 64.750.000 | 46.110.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 0 | 1.120.000 |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 3.925.000 | 3.925.000 |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | 6.490.000 | 6.490.000 |
| | | | | KECAMATAN MALLAWA | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | 5.250.000 | 5.250.000 |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | KECAMATAN MARUSU | 2.590.000 | 2.590.000 |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | | | |
| | | | | KECAMATAN LAU | 2.750.000 | 2.750.000 |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | | |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | 6.700.000 | 13.000.000 |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 4.500.250 | 4.500.250 |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | | |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 3.475.000 | 3.400.000 |
| | | | | KECAMATAN SIMBANG | 5.800.000 | 5.800.000 |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | 3.790.000 | 3.790.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.033.376.454 | 2.851.226.284 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.033.376.454 | 2.851.226.284 |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 903.391.450 | 1.303.391.450 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.183.009.499 | 17.845.539.375 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | |
| | | | Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15.650.000 | 15.650.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 166.511.600 | 165.661.600 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | |
| | | | Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik | | | |
| | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 570.000.000 | 1.019.938.000 |
| **62** | **2. Penguatan infrastruktur wilayah** | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | |
| | | | Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air | | | |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | bersih masyarakat | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 10.483.082.000 | 16.965.943.983 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 6.690.400.000 | 6.690.400.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | |
| | | | Persentase Pengurangan Sampah pada wilayah perkotaan yang terfasilitasi | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 0 | 1.500.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | |
| | | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 1.880.000.000 | 1.880.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | |
| | | | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 8.109.200.000 | 7.909.200.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | | |
| | | | Persentase areal kawasan kumuh | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 9.310.400.000 | 11.410.400.000 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | |
| | | | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 29.150.000.000 | 29.859.469.680 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | |
| | | | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 106.468.113.423 | 112.856.441.023 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | |
| | | | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 1.422.134.000 | 1.367.177.000 |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| | | | Persentase Pemukiman yang Tertata | | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 785.840.000 | 779.722.400 |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | |
| | | | Persentase Pemukiman yang Tertata | | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 258.200.000 | 264.360.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.183.644.580 | 3.225.476.620 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10.220.850 | 10.220.850 |
| | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1.286.072.254 | 1.280.792.254 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | |
| | | | Persentase lembaga yang terlibat dalam penataan sistem dasar penanggulangan bencana | | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 14.880.000 | 14.880.000 |
| | | | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi | | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 146.470.000 | 146.520.000 |
| | | | Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana | | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12.478.276.000 | 12.713.276.000 |
| | | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | |
| | | | Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 15.408.500 | 25.608.500 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | |
| | | | Persentase layanan angkutan darat | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 11.068.005.000 | 12.068.005.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | |
| | | | Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/ pelabuhan perahu penyeberangan | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 426.040.000 | 426.040.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | |
| | | | Persentas e Aplikasi Informati ka Yang Terintegra si Dalam SPBE | | | |
| | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 5.084.650.134 | 5.084.650.134 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | |
| | | | Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN | 593.394.500 | 619.453.500 |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | PERDAGANGAN | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | | |
| | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 89.756.900 | 89.756.900 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | |
| | | | Persentase Pelanggaran Pegawai | | | |
| | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 54.060.000 | 54.060.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 27.500.000 | 27.500.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 600.000.000 | 600.000.000 |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 400.000.000 | 400.000.000 |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | 400.000.000 | 400.000.000 |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | 235.200.000 | 235.200.000 |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | 400.000.000 | 400.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | | |
| | | | | KECAMATAN BONTOA | 22.400.000 | 22.400.000 |
| **63** | **3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan** | | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | |
| | | | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 74.600.000 | 42.600.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar SPM Perumahan | | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 536.380.000 | 532.580.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | |
| | | | Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | | | |
| | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 28.640.000 | 32.440.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN | 610.407.390 | 610.407.390 |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | PANGAN DAERAH | | |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | |
| | | | Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 149.636.300 | 148.276.300 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | |
| | | | Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 21.845.900 | 25.845.900 |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 50.025.000 | 40.425.000 |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 10.850.000 | 23.430.000 |
| | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | |
| | | | Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 23.050.000 | 20.131.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | | |
| | | | Persentase Desa yang memiliki kerja sama baik antar Pemerintah Desa Maupun dengan Pihak ketiga dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1.527.770.000 | 1.518.435.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | |
| | | | Persentase UMKM Yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas Produksi. | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.098.615.650 | 1.072.115.685 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | Persentase Pertumbuhan Investasi | | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi | | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinana | | | |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 153.481.000 | 152.831.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | Persentase Perusahaan Yang Menyamp aikan Laporan Kegiatan Penanam an Modal Secara Tepat Waktu | | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 386.000.000 | 386.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | |
| | | | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Moda | | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 47.557.000 | 47.557.000 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 3.618.539.900 | 3.752.802.900 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 2.458.745.500 | 2.338.925.500 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 588.875.700 | 513.675.700 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | |
| | | | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 1.350.969.300 | 432.211.500 |
| | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | |
| | | | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 7.076.000 | 7.076.000 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | |
| | | | Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Pembinaan | | | |
| | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 3.273.902.100 | 3.299.879.723 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | |
| | | | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.387.760.000 | 739.760.000 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 7.384.000 | 7.384.000 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen | | | |
| | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 82.452.300 | 80.732.300 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | |
| | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 15.933.500 | 18.083.500 |
| | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 24.350.000 | 26.525.000 |
| | | | | KECAMATAN CAMBA | 34.745.500 | 42.195.500 |
| | | | | KECAMATAN TANRALILI | 28.300.000 | 34.270.000 |
| | | | | KECAMATAN CENRANA | 23.978.000 | 23.978.000 |
| | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 29.675.000 | 29.675.000 |
| | | | | KECAMATAN MANDAI | 28.348.000 | 28.348.000 |
| **64** | **4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi** | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | |
| | | | Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 307.432.000 | 306.382.000 |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 105.072.850 | 105.072.850 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 1.308.742.500 | 1.796.837.998 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | |
| | | | Persentase Rencana Ketenaga kerjaan Yang ditindak Lanjuti | | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 8.695.800 | 8.695.800 |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | |
| | | | Persentase tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis kompetensi | | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 131.135.000 | 131.135.000 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | |
| | | | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 60.200.000 | 60.200.000 |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | |
| | | | Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | diselesaikan | | | |
| | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 87.612.100 | 101.562.100 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | |
| | | | Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 818.900.500 | 813.900.500 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | |
| | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 13.655.000 | 13.655.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | 3.418.800.000 | 3.444.200.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | 7.594.224.520 | 7.737.824.520 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | | | |
| | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | 1.720.250.000 | 1.720.250.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | |
| | | | Rata - Rata Lama Kunjungan Wisata | | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2.019.826.500 | 6.250.073.300 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | |
| | | | Persentase Kunjungan Wisata | | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 710.758.500 | 586.884.116 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | | | |
| | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 585.200.500 | 585.200.500 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| | | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | |
| | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 40.000.000 | 40.000.000 |
| **65** | **5. Pembangunan manusia** | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | |
| | | | Persentase Penduduk Usia 5 -18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 128.212.684.600 | 141.836.743.150 |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | |
| | | | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 71.700.000 | 71.700.000 |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | |
| | | | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | | | |
| | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 64.982.500 | 64.982.500 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 25.733.811.213 | 25.733.811.213 |
| | | | --- | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 71.630.305.724 | 95.735.903.138 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 56.098.783.549 | 56.177.918.805 |
| | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatanan | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 23.444.414.101 | 29.797.953.099 |
| | | | --- | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 31.894.424.350 | 31.920.976.350 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 2.475.716.600 | 1.865.585.000 |
| | | | --- | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 69.940.900 | 0 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 202.595.000 | 202.538.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 576.708.877 | 1.066.031.877 |
| | | | --- | | | |
| | | | | DINAS KESEHATAN | 809.817.100 | 86.840.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | | | |
| | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 681.454.500 | 682.483.500 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana | | | |
| | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 184.300.000 | 184.300.000 |

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | |
| | | | Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi Secara Aktif Dalam Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | | |
| | | | | DINAS SOSIAL | 3.060.000 | 5.860.000 |

**Tabel 3.3**
**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | |
| | | | | Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 10.483.082.000 | 16.965.943.983 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 6.390.400.000 | 6.390.400.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | |
| | | | | Persentase Pengurangan Sampah pada wilayah perkotaan yang terfasilitasi | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 0 | 1.500.000.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | |
| | | | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 1.880.000.000 | 1.880.000.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | |
| | | | | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 8.109.200.000 | 7.909.200.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | | | |
| | | | | Persentase areal kawasan kumuh | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 9.310.400.000 | 11.410.400.000 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | |
| | | | | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 29.150.000.000 | 29.859.469.680 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | |
| | | | | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, | 106.468.113.423 | 112.856.441.023 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 95.890.000 | 103.836.000 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| | | | | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 1.286.695.000 | 1.241.688.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.183.644.580 | 3.225.476.620 | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10.220.850 | 10.220.850 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1.286.072.254 | 1.280.792.254 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | |
| | | | | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 7.845.000 | 7.845.000 | |
| | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | |
| | | | | Persentase lembaga yang terlibat dalam penataan sistem dasar penanggulangan bencana | | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 14.880.000 | 14.880.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi | | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 146.470.000 | 146.520.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana | | | | |
| | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12.518.276.000 | 12.753.276.000 | |
| | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 488.443.000 | 510.963.000 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 184.300.000 | 184.300.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 12.887.600 | 12.887.600 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 610.407.390 | 610.407.390 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 149.636.300 | 148.276.300 | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 48.390.700 | 39.383.300 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | | | | Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kabupate n | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 417.535.000 | 325.020.000 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | | | | Persentase Cakupan Wilayah Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 231.404.900 | 255.329.900 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | |
| | | | | Persentase luas wilayah yang tertutup pepohonan | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 150.000.000 | 150.000.000 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN | | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | |
| | | | | Persentase Volume Limbah B3 yang tertangani sesuai ketentuan berlaku | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 6.480.000 | 6.360.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | |
| | | | | Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 9.640.000 | 21.470.000 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang lingkungan hidup | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 82.850.000 | 82.850.000 | |
| | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Persentase Partisipasi Masyarakat secara Aktif Dalam Penghargaan Lingkungan Hidup | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 77.265.000 | 68.265.000 | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | | | | Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup yang diselesaikan | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 5.390.000 | 9.070.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | |
| | | | | Persentase sampah yang tertangani | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 8.065.734.000 | 8.436.462.500 | |
| | | | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | |
| | | | | Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 15.408.500 | 25.608.500 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | | | |
| | | | | Persentase Desa yang memiliki kerja sama baik antar Pemerintah Desa Maupun dengan Pihak ketiga dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1.527.770.000 | 1.518.435.000 | |

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | |
| | | | | Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 35.565.000 | 26.490.000 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | Persentase layanan angkutan darat | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 11.068.005.000 | 12.068.005.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | |
| | | | | Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/ pelabuhan perahu penyeberangan | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 426.040.000 | 426.040.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | |
| | | | | Persentas e Aplikasi Informati ka Yang Terintegra si Dalam SPBE | | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 540.650.134 | 540.650.134 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | | |
| | | | | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2.701.500 | 2.701.500 | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | |
| | | | | Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 4.120.000 | 4.120.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | |
| | | | | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 8.760.000 | 304.451.400 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Persentase Pertumbuhan Investasi | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 60.000.000 | 60.000.000 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DAN KETENAGAKERJAAN | | | |
| | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinana | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 153.481.000 | 152.831.000 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Persentase Perusahaan Yang Menyamp aikan Laporan Kegiatan Penanam an Modal Secara Tepat Waktu | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 386.000.000 | 386.000.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | | | | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Moda | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 47.557.000 | 47.557.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | 30.000.000 | 20.000.000 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | |
| | | | | Rata - Rata Lama Kunjungan Wisata | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2.019.826.500 | 6.250.073.300 | |
| | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | |
| | | | | Persentase Kunjungan Wisata | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 710.758.500 | 586.884.116 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | |
| | | | | Persentase Usaha Ekonomi Kreatif Lokal Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 585.200.500 | 585.200.500 | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 3.445.773.200 | 3.590.036.200 | |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 2.458.745.500 | 2.338.925.500 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | |
| | | | | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | | | | Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 588.875.700 | 513.675.700 | |
| | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 7.076.000 | 7.076.000 | |
| | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Pembinaan | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 3.273.902.100 | 3.299.879.723 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | |
| | | | | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.387.760.000 | 739.760.000 | |
| | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | |
| | | | | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 12.530.000 | 12.530.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | |
| | | | | Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan | | | | |

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 12.384.000 | 11.524.000 | |
| | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | |
| | | | | Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 82.452.300 | 80.732.300 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | |
| | | | | Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 593.394.500 | 619.453.500 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 5.605.270.218 | 5.070.641.464 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 167.400.000 | 183.300.000 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 10.300.000 | 10.300.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 59.150.000 | 49.150.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 57.500.000 | 20.500.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN CAMBA | 19.490.000 | 3.910.000 | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 29.655.000 | 29.655.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan, Waawasan dan Ketahanan Nasional | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | KECAMATAN TANRALILI | 57.325.000 | 47.325.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 68.700.000 | 68.700.000 | |
| | | | | | KECAMATAN CENRANA | 59.915.000 | 39.915.000 | |
| | | | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 10.150.000 | 10.150.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN SIMBANG | 33.850.000 | 15.210.000 | |
| | | | | | KECAMATAN MANDAI | 52.150.000 | 41.700.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | |
| | | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 22.400.000 | 22.400.000 | |
| **2** | **2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar SPM Perumahan | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 536.380.000 | 532.580.000 | |
| | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | |
| | | | | Persentase Pemukiman yang Tertata | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 785.840.000 | 779.722.400 | |
| | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | |
| | | | | Persentase Pemukiman yang Tertata | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 258.200.000 | 264.360.000 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | |
| | | | | Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 28.640.000 | 32.440.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | |
| | | | | Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 307.432.000 | 306.382.000 | |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 1.308.742.500 | 1.796.837.998 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | |
| | | | | Persentase Rencana Ketenaga kerjaan Yang ditindak Lanjuti | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 8.695.800 | 8.695.800 | |
| | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | |
| | | | | Persentase tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis kompetensi | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 131.135.000 | 131.135.000 | |
| | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | |
| | | | | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 60.200.000 | 60.200.000 | |
| | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | |
| | | | | Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 87.612.100 | 101.562.100 | |
| | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | |
| | | | | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 53.848.000 | 54.872.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | |
| | | | | Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 808.335.500 | 803.335.500 | |
| | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | |
| | | | | Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN | 7.103.500 | 7.103.500 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | |
| | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | |
| | | | | Persentase Koperasi Berkategori Sehat | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 21.592.000 | 21.592.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | |
| | | | | Persentase Koperasi Aktif | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 30.520.000 | 74.585.138 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | |
| | | | | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 210.185.000 | 210.185.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | |
| | | | | Persentase UMKM Yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas Produksi. | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.098.615.650 | 1.072.115.685 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | 3.388.800.000 | 3.424.200.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | 7.594.224.520 | 7.737.824.520 | |
| | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | 1.720.250.000 | 1.720.250.000 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | |
| | | | | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 1.350.969.300 | 432.211.500 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | |
| | | | | Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 3.075.000 | 3.075.000 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 400.200.000 | 400.200.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 651.383.500 | 653.533.500 | |
| | | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 455.075.000 | 457.250.000 | |
| | | | | | KECAMATAN CAMBA | 456.634.500 | 464.084.500 | |
| | | | | | KECAMATAN TANRALILI | 247.300.000 | 251.095.000 | |
| | | | | | KECAMATAN CENRANA | 55.303.000 | 55.303.000 | |
| | | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 29.675.000 | 29.675.000 | |
| | | | | | KECAMATAN SIMBANG | 34.200.000 | 50.690.000 | |
| | | | | | KECAMATAN MANDAI | 452.798.000 | 452.798.000 | |
| 3 | **3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Persentase Penduduk Usia 5 -18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 128.212.684.600 | 142.204.243.150 | |
| | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | |
| | | | | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 71.700.000 | 71.700.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | | | | | |
| | | | | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 64.982.500 | 64.982.500 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 25.733.811.213 | 25.733.811.213 | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 71.630.305.724 | 95.735.903.138 | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 55.997.253.549 | 56.163.818.805 | |
| | | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatanan | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 23.444.414.101 | 29.797.953.099 | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 31.894.424.350 | 31.920.976.350 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | |
| | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 2.475.716.600 | 1.865.585.000 | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 69.940.900 | 0 | |
| | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | |
| | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 202.595.000 | 202.538.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 576.708.877 | 1.066.031.877 | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 809.817.100 | 86.840.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 603.714.500 | 596.797.500 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 5.395.592.000 | 5.370.074.000 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 7.685.551.471 | 7.972.764.273 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 133.830.500 | 167.733.500 | |
| | | | | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 3.919.761.302 | 3.895.698.237 | |
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 105.072.850 | 105.072.850 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi Secara Aktif Dalam Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 3.060.000 | 5.860.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 322.915.950 | 332.890.950 | |
| | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | persentase perempuan di lembaga Pemerintah dan Lembagaswasta | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 269.840.000 | 269.840.000 | |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | |
| | | | | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perempuan yang diselesaikan | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 418.000.000 | 418.000.000 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | |
| | | | | Rasio KDRT | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 141.040.000 | 141.040.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | |
| | | | | Persentase Ketersediaan data Terpilah | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN | 16.520.000 | 16.520.000 | |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | |
| | | | | Persentase Anak yang mendapatkan Pemenuhan Hak Anak | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 148.330.000 | 148.330.000 | |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | |
| | | | | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang diselesaikan | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 19.050.000 | 19.050.000 | |
| | | | | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang diselesaikan | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 13.780.000 | 13.780.000 | |
| | | | | persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana kekerasan yang melibatkan anak yg terselesaikan | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 13.050.000 | 13.050.000 | |
| | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | |
| | | | | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 60.042.000 | 85.042.000 | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN | 286.800.000 | 226.200.000 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | | | Persentase Akseptor KB | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.953.560.000 | 2.953.560.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | |
| | | | | Persentase Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.262.600.000 | 2.272.600.000 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | Persentase layanan angkutan darat | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 84.810.000 | 84.810.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Peemerintahan | | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 20.000.000 | 19.950.000 | |
| | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | |
| | | | | Persentase Koperasi Berkinerja Baik | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 231.153.500 | 231.153.500 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | |
| | | | | Angka Harapan Hidup Pemuda | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 479.800.000 | 479.800.000 | |
| | | | | Persentase organisasi pemuda yang aktif | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 720.925.000 | 746.375.000 | |
| | | | | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi,Sosial Kemasyrakatan, Organisasi organisasi dan mengeluarkan pendapat | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 479.800.000 | 479.800.000 | |
| | | | | Rata rata Lama Sekolah Pemuda | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 479.800.000 | 479.800.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | |
| | | | | Cakupan pembinaan olahraga | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 3.102.620.000 | 3.007.366.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | |
| | | | | Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 820.000.000 | 837.000.000 | |
| | | | | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi,Sosial Kemasyrakatan, Organisasi organisasi dan mengeluarkan pendapat | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 820.000.000 | 837.000.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | | | | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 462.750.000 | 462.750.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | |
| | | | | Persentase Peserta Didik Yang Menguasai Kesenian Tradisional Lokal | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 138.450.000 | 138.450.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | |
| | | | | Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 23.925.000 | 23.925.000 | |
| | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | |
| | | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 2.290.276.000 | 2.290.276.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | |
| | | | | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.124.500.000 | 1.124.500.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 489.805.000 | 573.885.000 | |
| | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | |
| | | | | Persentase penambahan koleksi nasional dan naskah kuno perpustakaan yang lengkap | | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 20.000.000 | 0 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| | | | | Persentase Kesesuaian Kawasan Transmigrasi dengan RTRW | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 13.100.000 | 5.600.000 | |
| | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | |
| | | | | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 2.687.770.000 | 2.687.770.000 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10.889.000 | 10.889.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target | | | | |
| | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 20.517.000 | 20.517.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah | | | | |
| | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 14.189.600 | 14.189.600 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 8.000.000 | 27.000.000 | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 30.000.000 | 50.000.000 | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 19.895.290 | 19.895.290 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | |
| | | | | Persentase Pembinaan terhadap aparatur dan Masyarakat tentang Idologi Negara | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 65.750.000 | 65.750.000 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 268.200.000 | 268.200.000 | |
| | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 29.695.000 | 29.695.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 79.580.120 | 79.580.120 | |
| | | | | Pembinaan Penanganan Covid-19 dan pasca Coviddi Tingkat Desa dan Kelurahan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 66.455.000 | 76.955.000 | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 11.250.000 | 11.250.000 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | |
| | | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 2.950.000 | 2.950.000 | |
| | | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 3.075.000 | 3.075.000 | |
| | | | | | KECAMATAN TANRALILI | 5.050.000 | 5.050.000 | |
| | | | | | KECAMATAN CENRANA | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| | | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MANDAI | 8.010.000 | 8.010.000 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 42.475.000 | 45.475.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 40.625.000 | 40.625.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan, Waawasan dan Ketahanan Nasional | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | KECAMATAN TANRALILI | 43.625.000 | 50.990.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 49.250.000 | 49.250.000 | |
| | | | | | KECAMATAN CENRANA | 45.955.000 | 56.955.000 | |
| | | | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 79.500.000 | 79.500.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 52.350.000 | 35.800.000 | |
| | | | | | KECAMATAN SIMBANG | 30.900.000 | 30.900.000 | |
| | | | | | KECAMATAN MANDAI | 21.920.000 | 21.920.000 | |
| | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 916.561.450 | 1.296.561.450 | |
| **4** | **4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | | | |
| | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 291.716.953.385 | 305.015.364.330 | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 187.096.600 | 161.051.200 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 56.435.059.120 | 56.436.840.449 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 327.868.000 | 354.368.000 | |
| | | | | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS KESEHATAN | 55.140.730.670 | 55.192.618.653 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 16.095.158.273 | 16.233.420.112 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 300.000.000 | 300.000.000 | |

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 3.550.000 | 3.550.000 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| | | | | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 672.089.000 | 717.107.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 8.394.978.846 | 8.105.222.546 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 17.345.000 | 17.280.000 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | |
| | | | | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | | | | |
| | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 282.597.000 | 360.476.392 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Laporan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 413.565.400 | 449.245.400 | |
| | | | | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan | | | | |
| | | | | | DINAS SOSIAL | 168.474.900 | 131.084.900 | |
| | | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 5.418.822.575 | 5.685.492.562 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | 15.850.000 | 15.850.000 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | KELUARGA BERENCANA | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 49.351.650 | 42.886.650 | |
| | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | |
| | | | | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 50.025.000 | 40.425.000 | |
| | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | | |
| | | | | Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 10.850.000 | 23.430.000 | |
| | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | | |
| | | | | Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 23.050.000 | 20.131.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 197.600.000 | 197.600.000 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.298.020.768 | 4.478.664.425 | |
| | | | | umlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 69.570.000 | 69.570.000 | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 119.336.500 | 119.336.500 | |
| | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | |
| | | | | Jumlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN | 42.976.300 | 42.976.300 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | PENCATATAN SIPIL | | | |
| | | | | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 421.833.500 | 421.833.500 | |
| | | | | umlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 17.072.000 | 17.072.000 | |
| | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| | | | | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 204.525.000 | 204.525.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | | | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 470.126.000 | 470.126.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | |
| | | | | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | | | | |
| | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10.894.000 | 10.894.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4.332.011.015 | 4.491.748.018 | |
| | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | |
| | | | | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | | | | |
| | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 48.215.000 | 47.007.000 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| | | | | Persentase layanan angkutan darat | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 1.107.160.000 | 1.107.160.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 9.250.000 | 9.250.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Peemerintahan | | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 900.690.965 | 891.980.965 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 4.682.682.376 | 4.689.637.525 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | |
| | | | | Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 369.313.000 | 479.438.236 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | |
| | | | | Persentas e Aplikasi Informati ka Yang Terintegra si Dalam SPBE | | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 5.023.600.000 | 5.022.234.764 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 7.673.095.024 | 7.140.854.387 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjan g Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN | 8.555.737.629 | 8.378.165.117 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | |
| | | | | Tersedian ya sistem data dan statistik yang terintegr | | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 73.468.000 | 73.468.000 | |
| | | | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 73.468.000 | 73.468.000 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | | | | |
| | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 49.122.000 | 49.122.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 5.752.436.391 | 5.708.345.944 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 70.850.000 | 70.850.000 | |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | |
| | | | | Persentase dokumen arsip yang diakuisisi dan terpelihara | | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 38.140.000 | 33.160.000 | |
| | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | | | |
| | | | | Persentase arsip yang menjadi bahan informasi | | | | |
| | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 27.460.000 | 27.460.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PERIKANAN DAERAH | 5.972.757.241 | 6.072.972.538 | |
| | | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.009.077.588 | 1.027.638.472 | |
| | | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 7.533.746.521 | 6.907.913.764 | |
| | | | | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,Pemuda dan Olahraga | | | | |
| | | | | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 54.000.000 | 681.530.200 | |
| | | | | Perentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 1.090.089.943 | 1.744.102.343 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 150.000 | 150.000 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | | | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | 16.222.976.598 | 16.818.156.251 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |

## Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 32.367.104.931 | 33.192.176.709 | |
| | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | |
| | | | | Persentase Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dilaksanakan | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 2.522.308.000 | 2.338.548.000 | |
| | | | | Presentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 536.479.900 | 536.444.900 | |
| | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | |
| | | | | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 284.700.000 | 307.864.419 | |
| | | | | Persentase Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Dilaksanakan | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 3.046.326.900 | 3.046.326.900 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 26.174.228.920 | 26.051.549.165 | |
| | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | |
| | | | | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 9.078.082.000 | 9.486.072.000 | |
| | | | | Persentase pelayanan pembahasan kerja sama Daerah | | | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 440.720.000 | 510.720.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 20.000.000 | 37.142.500 | |
| | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | | ersentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 562.503.000 | 562.503.000 | |
| | | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 266.495.750 | 266.495.750 | |
| | | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 386.853.045 | 452.853.045 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 324.929.600 | 343.409.600 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan | | | | |
| | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 51.919.311.207 | 53.012.312.760 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 11.508.521.766 | 11.630.322.010 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target | | | | |
| | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 152.051.408.600 | 152.051.408.600 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah | | | | |
| | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3.028.955.900 | 3.028.955.900 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Realisasi Pendapatan | | | | |
| | | | | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1.121.155.500 | 1.185.863.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.027.506.195 | 1.101.983.195 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. | | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4.488.514.375 | 4.615.058.625 | |
| | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian | | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.598.486.000 | 1.595.866.000 | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | |
| | | | | Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | |
| | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 1.073.771.000 | 997.290.000 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | |
| | | | | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | | | | |
| | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 438.605.000 | 409.915.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 21.380.000 | 21.380.000 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 8.263.201.705 | 8.016.790.264 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | |
| | | | | Nilai SPIP | | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 199.220.000 | 299.350.000 | |
| | | | | Persentase Pelanggaran Pegawai | | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 4.671.170.000 | 4.938.630.000 | |
| | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | |
| | | | | Nilai Kapabilitas APIP | | | | |
| | | | | | INSPEKTORAT KABUPATEN | 273.770.000 | 247.625.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 4.502.800.114 | 4.487.904.129 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 254.854.500 | 333.584.500 | |
| | | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 3.740.014.536 | 3.917.212.326 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN CAMBA | 3.656.942.735 | 3.542.492.981 | |
| | | | | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN CAMBA | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| | | | | Persentase Layanan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 10.500.000 | 20.500.000 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 2.720.000.998 | 2.688.171.222 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Persentase Layanan Urusan Perangkt Daerah Pemerintahan Umum Perangkat | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 55.882.500 | 119.266.725 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TANRALILI | 3.240.408.826 | 2.989.138.586 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TANRALILI | 249.096.040 | 328.111.040 | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 2.960.068.579 | 2.988.286.873 | |
| | | | | | KECAMATAN TURIKALE | 7.884.848.461 | 8.054.858.157 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daera | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MARUSU | 4.455.000 | 4.455.000 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MARUSU | 2.357.317.298 | 2.418.358.416 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN LAU | 5.948.269.211 | 5.768.037.699 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN CENRANA | 2.225.366.439 | 2.316.432.081 | |
| | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 6.947.000 | 6.947.000 | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 22.000.000 | 22.000.000 | |
| | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 27.500.000 | 27.500.000 | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 50.382.000 | 73.882.000 | |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 1.871.546.926 | 1.999.551.698 | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 107.200.000 | 109.200.000 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 2.473.407.632 | 2.632.818.683 | |
| | | | | | KECAMATAN SIMBANG | 2.491.052.351 | 2.442.020.545 | |
| | | | | | KECAMATAN MANDAI | 4.503.309.322 | 4.560.159.295 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 837.050.000 | 837.050.000 | |
| | | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 139.769.000 | 139.769.000 | |
| | | | | | KECAMATAN CAMBA | 400.800.000 | 413.600.000 | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN CAMBA | 120.000.000 | 120.000.000 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 15.918.000 | 15.918.000 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TANRALILI | 183.275.000 | 179.600.000 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 72.200.000 | 72.200.000 | |
| | | | | | KECAMATAN TURIKALE | 2.331.350.000 | 2.331.350.000 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PuPersentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TURIKALE | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MARUSU | 11.910.000 | 11.910.000 | |
| | | | | 0Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN LAU | 1.231.200.000 | 1.257.000.000 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN LAU | 1.360.955.000 | 1.386.755.000 | |
| | | | | | KECAMATAN CENRANA | 10.700.000 | 10.700.000 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di KecamatanPersentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN CENRANA | 5.075.000 | 5.075.000 | |
| | | | | --- | | | | |
| | | | | | KECAMATAN CENRANA | 4.050.000 | 4.050.000 | |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 13.400.000 | 13.400.000 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 21.050.000 | 21.055.000 | |
| | | | | | KECAMATAN SIMBANG | 5.500.000 | 5.500.000 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | KECAMATAN MANDAI | 1.272.160.000 | 1.272.160.000 | |
| | | | | Persentasen Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MANDAI | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 1.875.000 | 1.875.000 | |
| | | | | persentase Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomi Masyarakat | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 201.000.000 | 201.000.000 | |
| | | | | Persentase Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 40.625.000 | 40.625.000 | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TANRALILI | 1.500.000 | 0 | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Di Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TURIKALE | 1.402.400.000 | 1.402.400.000 | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TURIKALE | 47.690.000 | 51.375.000 | |
| | | | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MARUSU | 72.041.000 | 51.541.000 | |
| | | | | Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN LAU | 831.945.000 | 835.945.000 | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | |
| | | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN BONTOA | 4.600.000 | 4.600.000 | |
| | | | | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 Dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TURIKALE | 2.650.000 | 2.650.000 | |
| | | | | Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MARUSU | 1.470.000 | 1.470.000 | |
| | | | | Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MARUSU | 1.470.000 | 1.470.000 | |
| | | | | Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN LAU | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| | | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | KECAMATAN MONCONGLOE | 9.998.700 | 9.998.700 | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 56.449.225 | 9.765.000 | |
| | | | | | KECAMATAN TURIKALE | 62.000.000 | 60.250.000 | |
| | | | | | KECAMATAN MARUSU | 88.230.000 | 98.730.000 | |
| | | | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | |
| | | | | | KECAMATAN LAU | 62.815.000 | 62.815.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | |
| | | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MAROS BARU | 0 | 1.120.000 | |
| | | | | | KECAMATAN BANTIMURUNG | 3.925.000 | 3.925.000 | |
| | | | | | KECAMATAN CAMBA | 6.490.000 | 6.490.000 | |
| | | | | | KECAMATAN MALLAWA | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| | | | | Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN TANRALILI | 5.250.000 | 5.250.000 | |
| | | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN MARUSU | 2.590.000 | 2.590.000 | |
| | | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN LAU | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| | | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | | | | |
| | | | | | KECAMATAN CENRANA | 6.700.000 | 13.000.000 | |
| | | | | | KECAMATAN TOMPOBULU | 3.475.000 | 3.400.000 | |
| | | | | | KECAMATAN SIMBANG | 5.800.000 | 5.800.000 | |
| | | | | | KECAMATAN MANDAI | 3.790.000 | 3.790.000 | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | Persentase | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.033.376.454 | 2.851.226.284 | |
| | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.033.376.454 | 2.851.226.284 | |

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.830.000 | 6.830.000 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.183.009.499 | 17.845.539.375 | |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | |
| | | | | Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15.650.000 | 15.650.000 | |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | |
| | | | | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 166.511.600 | 165.661.600 | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | |
| | | | | Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik | | | | |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 570.000.000 | 1.019.938.000 | |

# Tabel 3.4
# Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | 100 Persen | 100 Persen | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2656 Orang/bulan | 2656 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sub Kegiatan | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 1.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 2565 Orang | 2565 Orang | 1.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 150 Paket | 150 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | 100 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | 100 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 8 Jenis | 8 Jenis | 1.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 8 Jenis | 8 Jenis | 1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 Unit<br>10 Unit | 0 Unit<br>10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit<br>6 Unit | 0 Unit<br>6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit<br>10 Unit | 0 Unit<br>10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 5 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | **1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN** | Persentase Penduduk Usia 5 -18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan | 100 Persen | 100 Persen | 1.01.02.2.01 Pengelolaan | Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan | 100 Persen | 100 Persen | 1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **PENDIDIKAN** | | | Pendidikan Sekolah Dasar | Sekolah Dasar | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 30 Ruang | 30 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 0 Ruang | 0 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 10 Ruang | 10 Ruang | | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 20 Ruang | 20 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 25 Ruang | 25 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 15 Unit | 15 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 50 Ruang | 50 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 10 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 10 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 10 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | 25 Unit | 25 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 30 Paket | 30 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 20 Paket | 20 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 30 Paket | 30 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 240 Unit | 240 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 50 Peserta Didik | 50 Peserta Didik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 240 Paket | 240 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | 240 Satuan Pendidikan | 240 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 20 Satuan Pendidikan | 20 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 150 Peserta Didik | 150 Peserta Didik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 240 Satuan Pendidikan | 240 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 240 Satuan Pendidikan | 240 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 480 Orang / 480 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 10 Ruang / 10 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Ruang / 0 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 15 Ruang / 15 Ruang | | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 200 Orang / 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 200 Orang / 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 Dokumen / 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen / 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 6 Dokumen / 6 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.01.40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan | 200 Orang / 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Penduduk Usia 13-15Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 100 Persen / 100 Persen | 1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit / 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 30 Ruang / 30 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 0 Ruang / 0 Ruang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 20 Ruang | 20 Ruang | | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 20 Ruang | 20 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 14 Ruang | 14 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 15 Ruang | 15 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.07 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | 3 Ruang | 3 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | 50 Unit | 50 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.11 Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah | Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 20 Ruang | 20 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 10 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 10 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 10 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 10 Ruang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 4 Ruang | 4 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama | Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 50 Paket | 50 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | 20 Paket | 20 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 20 Paket | 20 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | 30 Paket | 30 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 74 Peserta Didik | 74 Peserta Didik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik | 100 Buku | 100 Buku | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 74 Paket | 74 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 74 Paket | 74 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian | 15000 Peserta Didik | 15000 Peserta Didik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 20 Satuan Pendidikan | 20 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 150 Peserta Didik | 150 Peserta Didik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 74 Satuan Pendidikan | 74 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 74 Satuan Pendidikan | 74 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 150 Orang | 150 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 10 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 10 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.02.48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.02.50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.02.53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan | 100 Orang | 100 Orang | Semua Kab/Kota | |
| | | | | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini | 100 Persen | 100 Persen | 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 17 Unit | 17 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.03.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 17 Unit | 17 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 10 Paket | 10 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 20 Paket | 20 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 20 Paket | 20 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil | 800 Peserta Didik | 800 Peserta Didik | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | Sub Kegiatan | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 30 Paket 30 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 5000 Peserta Didik 5000 Peserta Didik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 24 Satuan Pendidikan 24 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 50 Orang 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 50 Orang 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 24 Satuan Pendidikan 24 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 250 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 250 Orang 250 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.22 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 100 Orang 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 100 Orang 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 Dokumen 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 6 Dokumen 6 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang | 100 Orang 100 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja Program: Hasil Program | Target Capaian Program: Sebelum | Target Capaian Program: Sesudah | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan: Keluaran Kegiatan | Target Capaian Kegiatan: Sebelum | Target Capaian Kegiatan: Sesudah | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian Sub Kegiatan: Sebelum | Target Capaian Sub Kegiatan: Sesudah | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Pendidikan | pendidikan yang dilaksanakan | | | | |
| | | | | | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 100 Persen | 100 Persen | 1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 10 Peserta Didik | 10 Peserta Didik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 500 Peserta Didik | 500 Peserta Didik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 12 Satuan Pendidikan | 12 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang | 12 Satuan Pendidikan | 12 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 12 Satuan Pendidikan | 12 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.19 Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 4 Ruang | 4 Ruang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian | 12 Satuan Pendidikan | 12 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.24 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.26 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.02.2.04.29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | **1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | Cakupan Kurikulum Muatan Lokal yang di kembangkan | 100 Persen | 100 Persen | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan | 4 Jenis | 4 Jenis | 1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | 100 Buku | 100 Buku | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 240 Orang | 240 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.03.2.01.06 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | | | | Pendidikan Dasar | tersusun | | | |
| | | | | 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan 3 Jenis 3 Jenis | | 1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 100 Buku 100 Buku | | Kab. Maros | |
| | **1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 100 Persen 100 Persen | | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 100 Persen 100 Persen | | 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan | | Kab. Maros | |
| | **1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Perizinan 100 Persen 100 Persen | | 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Izin Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat yang dikelola 20 Buah 20 Buah | | 1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.01.05.2.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang | Jumlah Izin Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat yang dikelola 50 Buah 50 Buah | | 1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen | | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | Persentase satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pelajaran Bahasa dan Sastra Lokal | 100 Persen | 100 Persen | 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra | 7 Jenis | 7 Jenis | 1.01.06.2.01.01 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun | 2 Kamus | 2 Kamus | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.06.2.01.02 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | 2 Bahasa | 2 Bahasa | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.06.2.01.04 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan | 10 Orang | 10 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.06.2.01.05 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi | 100 Buku | 100 Buku | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.06.2.01.06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Peserta Didik | 10 Peserta Didik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.01.06.2.01.07 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | **1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>19 Dokumen / 19 Dokumen<br>100 Persen / 100 Persen | | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah<br>19 Dokumen / 19 Dokumen | | 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2 Dokumen / 2 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>1 Dokumen / 1 Dokumen | | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>1 Dokumen / 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>1 Dokumen / 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>1 Dokumen / 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>1 Laporan / 1 Laporan | | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>12 Laporan / 12 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan<br>71 Dokumen / 71 Dokumen | | 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>351 Orang/bulan / 351 Orang/bulan<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>927 Orang/bulan / 927 Orang/bulan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>12 Dokumen / 12 Dokumen | | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 1.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14 Laporan | 14 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 816 Orang | 816 Orang | 1.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 25 Unit | 25 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 14 Dokumen | 14 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 816 Orang | 816 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | 0 Orang | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | Indikator Kinerja Program | Target Capaian Sebelum | Target Capaian Sesudah | Kegiatan | Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan | Target Capaian Sebelum | Target Capaian Sesudah | Sub Kegiatan | Indikator Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian Sebelum | Target Capaian Sesudah | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 25 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 Unit | 30 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 25 Unit | 25 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 200 Unit | 200 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | 0 Ha | 0 Ha | | |
| | | | | | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan<br>Jumlah dan Jenis Kebutuhan Operasional di Pelayanan BLUD<br>Jumlah dan jenis kebutuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD<br>Jumlah dan Jenis Kebutuh Operasional di Pelayanan BLUD | 14 Unit Kerja<br>3 Jenis<br>3 Jenis<br>3 Jenis | 14 Unit Kerja<br>3 Jenis<br>3 Jenis<br>3 Jenis | 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan minimal kesehatan | 100 Persen | 100 Persen | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah yang disediakan | 15 Faskes | 15 Faskes | 1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 2 Unit | 2 Unit | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 2 Unit | 2 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 14 Unit | 14 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 4 Unit | 4 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 5 Unit | 5 Unit | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 8 Unit | 8 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 5 Unit<br>107 Unit | 5 Unit<br>107 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 15 Paket<br>46 Unit | 15 Paket<br>46 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah yang disediakan<br>Jumlah layanan kesehatanan yang disediakan UKM dan UKP rujukan<br>Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15 Unit<br>3 Layanan<br>100 Persen | 15 Unit<br>3 Layanan<br>100 Persen | 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang<br>160 Orang<br>164 Orang | 100 Orang<br>160 Orang<br>164 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | Layanan kesehatanan yang disediakan UKM dan UKP rujukan | 100 Layanan / 100 Layanan | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 177 Orang / 177 Orang | | |
| | | | | | Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Persen / 100 Persen | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 311 Orang / 311 Orang | | |
| | | | | | PersentaseUnit Pelayanan yang Menerapkan StandarPelayanan | 100 Persen / 100 Persen | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 320 Orang / 320 Orang | | |
| | | | | | Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal | 100 Persen / 100 Persen | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 432 Orang / 432 Orang | | |
| | | | | | Persentase Unit yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal | 100 Persen / 100 Persen | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 520 Orang / 520 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 626 Orang / 626 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 645 Orang / 645 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 657 Orang / 657 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 687 Orang / 687 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 711 Orang / 711 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 989 Orang / 989 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1002 Orang / 1002 Orang | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100 Orang / 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 160 Orang / 160 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 164 Orang / 164 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 177 Orang | 177 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 311 Orang | 311 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 320 Orang | 320 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 432 Orang | 432 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 520 Orang | 520 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 626 Orang | 626 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 645 Orang | 645 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 657 Orang | 657 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 687 Orang | 687 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 711 Orang | 711 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 989 Orang | 989 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1002 Orang | 1002 Orang | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 160 Orang | 160 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 164 Orang | 164 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 177 Orang | 177 Orang | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 200 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 311 Orang | 311 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 432 Orang | 432 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 520 Orang | 520 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 626 Orang | 626 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 645 Orang | 645 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 657 Orang | 657 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 687 Orang | 687 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 711 Orang | 711 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 936 Orang | 936 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 989 Orang | 989 Orang | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 833 Orang | 833 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 872 Orang | 872 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 941 Orang | 941 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1627 Orang | 1627 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1919 Orang | 1919 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2346 Orang | 2346 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2383 Orang | 2383 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2433 Orang | 2433 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2510 Orang | 2510 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2611 Orang | 2611 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2989 Orang | 2989 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3536 Orang | 3536 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4140 Orang | 4140 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4891 Orang | 4891 Orang | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.838 Orang | 1.838 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.968 Orang | 1.968 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.432 Orang | 2.432 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3.255 Orang | 3.255 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3.332 Orang | 3.332 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.783 Orang | 4.783 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.835 Orang | 4.835 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.009 Orang | 5.009 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.097 Orang | 5.097 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.166 Orang | 5.166 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.941 Orang | 5.941 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6.304 Orang | 6.304 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7.648 Orang | 7.648 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 9.41 Orang | 9.41 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan | 1000 Orang | 1000 Orang | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.392 Orang | 5.392 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7.082 Orang | 7.082 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7.386 Orang | 7.386 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 8.733 Orang | 8.733 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 9.192 Orang | 9.192 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 9.63 Orang | 9.63 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11.31 Orang | 11.31 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11.978 Orang | 11.978 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13.254 Orang | 13.254 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17.064 Orang | 17.064 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 18.612 Orang | 18.612 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 18.655 Orang | 18.655 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 20.139 Orang | 20.139 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 22.211 Orang | 22.211 Orang | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.344 Orang | 1.344 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.948 Orang | 1.948 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.95 Orang | 1.95 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.317 Orang | 2.317 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.349 Orang | 2.349 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.512 Orang | 2.512 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.563 Orang | 2.563 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.712 Orang | 2.712 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.858 Orang | 2.858 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3.053 Orang | 3.053 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.625 Orang | 4.625 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 712 Orang | 712 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 861 Orang | 861 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.324 Orang | 1.324 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.362 Orang | 1.362 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.426 Orang | 1.426 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1.755 Orang | 1.755 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.712 Orang | 2.712 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.822 Orang | 2.822 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2.99 Orang | 2.99 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4.005 Orang | 4.005 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5.749 Orang | 5.749 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 373 Orang | 373 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 583 Orang | 583 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 883 Orang | 883 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 944 Orang | 944 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 956 Orang | 956 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15 Orang | 15 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 47 Orang | 47 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 95 Orang | 95 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 114 Orang | 114 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 136 Orang | 136 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 152 Orang | 152 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 162 Orang | 162 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 204 Orang | 204 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 227 Orang | 227 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 237 Orang | 237 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 260 Orang | 260 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 343 Orang | 343 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 345 Orang | 345 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 426 Orang | 426 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 35 Orang | 35 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 46 Orang | 46 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 49 Orang | 49 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 54 Orang | 54 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 61 Orang | 61 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 66 Orang | 66 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 69 Orang | 69 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 71 Orang | 71 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 76 Orang | 76 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 86 Orang | 86 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 87 Orang | 87 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 122 Orang | 122 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 122 Orang | 122 Orang | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1.162 Orang | 1.162 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 98 Orang | 98 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | 100 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | 150 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 217 Orang | 217 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 285 Orang | 285 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 311 Orang | 311 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 373 Orang | 373 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 416 Orang | 416 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 584 Orang | 584 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 603 Orang | 603 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 646 Orang | 646 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 689 Orang | 689 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 882 Orang | 882 Orang | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1.214 Orang | 1.214 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1.26 Orang | 1.26 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 100 Orang | 100 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 213 Orang | 213 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 214 Orang | 214 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 378 Orang | 378 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 405 Orang | 405 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 576 Orang | 576 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 687 Orang | 687 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 749 Orang | 749 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 771 Orang | 771 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 778 Orang | 778 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 812 Orang | 812 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 827 Orang | 827 Orang | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 0 Orang / 0 Orang | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang / 1 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 35 Orang / 35 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 46 Orang / 46 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 49 Orang / 49 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 54 Orang / 54 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 61 Orang / 61 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 66 Orang / 66 Orang | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 69 Orang | 69 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 71 Orang | 71 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 76 Orang | 76 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 86 Orang | 86 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 87 Orang | 87 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 122 Orang | 122 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 991 Orang | 991 Orang | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 67016 Orang | 67016 Orang | | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 1 Unit 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 14 Unit 14 Unit | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan | 0 Dokumen 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 0 Unit 0 Unit | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 Laporan 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan 1 Laporan | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 Unit 1 Unit | | |
| | | | | | | | 1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 0 Keluarga 0 Keluarga | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah jenis data informasi kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan | 12 Jenis | 12 Jenis | 1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan | 14 Unit | 14 Unit | | |
| | | | | 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah izin rumah sakit kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diterbitkan | 16 Izin | 16 Izin | 1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 15 Unit | 15 Unit | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 15 Unit | 15 Unit | | |
| | | | | | | | | 1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | **1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki SDM kesehatan sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen / 100 Persen | 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktik | 100 Orang | 100 Orang | 1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan | Jumlah sumberdaya manusia kesehatan yang dibutuhkan dan meemnuhi standar untuk UKP dan UKM | 1165 Orang | 1165 Orang | 1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 38 Orang | 38 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 41 Orang | 41 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 42 Orang | 42 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 45 Orang | 45 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 47 Orang | 47 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 52 Orang | 52 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 57 Orang | 57 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 58 Orang | 58 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 60 Orang | 60 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di | 64 Orang | 64 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 82 Orang | 82 Orang | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | | | | 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan yang dilakukan | 200 Orang | 200 Orang | 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 200 Orang | 200 Orang | | |
| | **1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu SPM Kesehatan | 100 Persen | 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisonal yang mendapatkan izin usaha | 65 IU | 65 IU | 1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | 100 Persen | | | | | 1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 40 Sarana | 40 Sarana | | |
| | | | | 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang diterbitkan | 65 Sertifikat | 65 Sertifikat | 1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang di periksa dan ditindak lanjuti | 50 Sarana | 50 Sarana | 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah sertifikat laik higiene sanitasi TPM dan DAM yang dikeluarkan | 143 Dokumen | 143 Dokumen | 1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan | 74 Sarana | 74 Sarana | 1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang di periksa dan ditindak lanjuti | 50 Sarana | 50 Sarana | 1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | 1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut | Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | | | | | |
| | **1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Persentase Masyarakat yang berperan aktif dalam pencapaian target SPM Kesehatan | 100 Persen 100 Persen | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang mendapatkan advokasi dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapasitas | 206 Orang 206 Orang | 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam promotif dan preventif kesehatan | 75 Orang 75 Orang | 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | 1.02.05.2.02.02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat | 50000 Keluarga | 50000 Keluarga | | |
| | | | | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang mengetahui dan memahami Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 419 Orang 419 Orang | 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | |
| | **1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen 100 Persen | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen 19 Dokumen | 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 56 Dokumen | 56 Dokumen | 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 160 Orang/bulan | 160 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 1.03.01.2.03 Administrasi Barang | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Daerah pada SKPD | Daerah pada SKPD | | | |
| | | | | 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yasng Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 160 Orang 160 Orang | 1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 160 Paket 160 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan | 8 Jenis 8 Jenis | 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket 10 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 7 Paket 7 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100 Paket 100 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket 10 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis 4 Jenis | 1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 2 Unit 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit 15 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sub Kegiatan | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | Program | | | | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | umlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Berada Dalam Kondisi Baik | 2 Jenis | 2 Jenis | 1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 8 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | 100 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | **1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat | 75 Persen | 75 Persen | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ketersediaan Air Baku | 12096 m3 | 12096 m3 | 1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 6 Unit | 6 Unit | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | | 1.03.02.2.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun | 8 Titik | 8 Titik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | 1.97 KM | 1.97 KM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 3.2 KM | | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada | Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik | 5051 Ha | 5051 Ha | 1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 2 KM | | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan | 7 Km | 7 Km | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.02.2.02.09 Peningkatan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | 5 Bendung | 5 Bendung | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi | 3.9 KM | 3.9 KM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 4 Bendung | 4 Bendung | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 172 KM | 172 KM | Kab. Maros | |
| | **1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum | 100 Persen 100 Persen | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak | 79834 RT 79834 RT | 1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun | 3 Liter/Detik | 3 Liter/Detik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 50 SR | 50 SR | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 3 Liter/Detik | 3 Liter/Detik | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 0<br>200 SR | 0<br>200 SR | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan | 200 Rumah Tangga | 200 Rumah Tangga | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Kawasan Perdesaan | Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan | | | | |
| | | | | | | | | | 1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 0<br>50 SR | 0<br>50 SR | Kab. Maros | |
| | **1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | Persentase Pengurangan Sampah pada wilayah perkotaan yang terfasilitasi | 1.76 Persen | 1.76 Persen | 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Volume Timbunan Sampah yang Tertangani | 29628 m3 | 29628 m3 | 1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 200 Rumah Tangga | 200 Rumah Tangga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan | Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan | 50 Unit | 50 Unit | Kab. Maros | |
| | **1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 96.63 Persen | 96.63 Persen | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak | 82281 RT | 82281 RT | 1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik | 500 Rumah Tangga | 500 Rumah Tangga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 100 Rumah Tangga | 100 Rumah Tangga | Kab. Maros | |
| | **1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 60 Persen | 60 Persen | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik | 50000 Km | 50000 Km | 1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 3000 M | 3000 M | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | Persentase areal kawasan kumuh | 6.14 Persen | 6.14 Persen | 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Luas Areal Kawasan Kumuh yang Tertangani | 20 Ha | 20 Ha | 1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Sarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1 Sistem Jaringan | 1 Sistem Jaringan | Kab. Maros | |
| | **1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | 1.9 Rasio | 1.9 Rasio | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah dokumen IMB dan setifikat laink fungsi bangunan gedung yang diterbitkan | 12972 Rekomendasi | 12972 Rekomendasi | 1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | 92.23 Persen | 92.23 Persen | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang | 925.2 Km | 925.2 Km | 1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 15 KM | 15 KM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | 2.2 KM | 2.2 KM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 0.85 KM | 0.85 KM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | 42 KM | 42 KM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 20 KM | 20 KM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang Dibangun | 297.5 M | 297.5 M | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi | 175 M | 175 M | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.10.2.01.24 Pembangunan Jalan Strategis Desa | Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun | 5 KM | 5 KM | Kab. Maros | |
| | **1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB | 12.12 Persen | 12.12 Persen | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku | 250 Orang | 250 Orang | 1.03.11.2.01.01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.11.2.01.02 Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan | Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.01.03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | 570 Orang | 570 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.01.05 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi | 330 Orang | 330 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 30 Orang | 30 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang Tersedia | 1 Sistem | 1 Sistem | 1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 7 Dokumen | 7 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | 1 Orang | 1 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.03.11.2.02.10 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Unit Usaha yang menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku | 5 JUK | 5 JUK | 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | 5.73 Persen | 5.73 Persen | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR | 6600 Ha | 6600 Ha | 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Luas Areal Ruang Daerah yang perencanaannya sesuai dengan rencana peruntukan | 6600 Ha | 6600 Ha | 1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang | Luas Areal Ruang Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana peruntukan | 6600 Ha | 6600 Ha | 1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Luas Ruang Daerah yang Dikendalikan Pemanfaatannya | 6600 Ha | 6600 Ha | 1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | **1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 110 Orang/bulan | 110 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 110 Orang | 110 Orang | 1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 5 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Dilaksanakan | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 25 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | yang Disediakan | | | | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 95 Unit | 95 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 50 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | **1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Persentase Masyarakat Maros Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sesuai Standar SPM Perumahan | 100 Persen | 100 Persen | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program yang Terdata | 40 Rumah | 40 Rumah | 1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi Program yang Mengikuti Sosialisasi | 40 Orang | 40 Orang | 1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | 70 Orang | 70 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.02.02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | 70 Orang | 70 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.02.03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.02.04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | 2 Orang | 2 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.02.05 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.02.06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program yang diBangun dan Direhabilitasi | 20 Rumah | 20 Rumah | 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 50 Unit Rumah | 50 Unit Rumah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | | | | 1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota | 1 Ha | 1 Ha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 20 Unit Rumah | 20 Unit Rumah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun | 40 Unit Rumah | 40 Unit Rumah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 20 Unit Rumah | 20 Unit Rumah | Kab. Maros | |
| | | | | 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat korban bencara atau relokasi program yang menerima bantuan rumah | 30 Rumah | 30 Rumah | 1.04.02.2.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah dan korban encana/relokasi yang mendapatkan fasilitas rumah susun/khusus | 50 Orang | 50 Orang | 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 3 Laporan | 3 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.02.2.05.03 Pembangunan Rumah Khusus | Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun | 40 Unit | 40 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan | Jumlah izin pembangunan dan perumahan yang dikeluarkan | 5 Izin | 5 Izin | 1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 10 Laporan | 10 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Persentase Pemukiman yang Tertata | 99,75 Persen | 99,75 Persen | 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Jumlah Rekomendasi Izin Pembangunan Pengembangan Kawasan Pemukiman yang Diterbitkan | 10 Izin | 10 Izin | 1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Luas Kawasan Pemukiman yang Tertata | 100 Ha | 100 Ha | 1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 11 Laporan | 11 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.03.2.02.06 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.03.2.02.07 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program | 11 Dokumen | 11 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | |
| | | | | | | | | 1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 11 Dokumen | 11 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.03.2.02.09 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | 120 Keluarga | 120 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Luas Areal yang Memiliki Potensi untuk menjadi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh<br>Luas Kawasan Pemukiman yang Tertata | 100 Ha<br>100 Ha | 100 Ha<br>100 Ha | 1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 300 Unit Rumah | 300 Unit Rumah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar | 8.3 Ha | 8.3 Ha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun | 120 Unit | 120 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Sebelum | Sesudah | Keluaran Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | Keluaran Sub Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | Persentase Pemukiman yang Tertata | 98,60 Persen | 98,60 Persen | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Luas Areal yang Memiliki Potensi untuk menjadi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 100 Ha | 100 Ha | 1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 100 Unit Rumah | 100 Unit Rumah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.04.2.01.03 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 85 Persen | 85 Persen | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah kawasan perumahan yang memiliki PSU sesuai standar yang berlaku | 30 Kawasan | 30 Kawasan | 1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 15 Lokasi | 15 Lokasi | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 15 Laporan | 15 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 15 Laporan | 15 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 19 Dokumen | 19 Dokumen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen SAKIP - PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan 4 Laporan | | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah | 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan 12 Laporan | | |
| | | | | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 71 Dokumen 71 Dokumen<br>Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan 71 Dokumen 71 Dokumen | | 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Dokumen 14 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan 14 Bulan | | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD | 12 Dokumen 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen 12 Dokumen | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD | 18 Dokumen | 18 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Laporan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29 Dokumen<br>29 Dokumen | 29 Dokumen<br>29 Dokumen | 1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD<br>jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan BMD-PD<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen<br>12 Dokumen | 12 Dokumen<br>12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian BMD - PD<br>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen<br>1 Laporan | 1 Dokumen<br>1 Laporan | Semua Kab/Kota<br>Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD - PD<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Dokumen<br>12 Laporan | 12 Dokumen<br>12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD - PD<br>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen<br>0 Laporan<br>1 Laporan | 1 Dokumen<br>0 Laporan<br>1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan BMD - PD<br>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen<br>1 Laporan | 1 Dokumen<br>1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian<br>umlah Aparatur Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 103 Orang 103 Orang<br>39 Orang 39 Orang | 1.05.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai<br>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai<br>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 12 Jenis<br>0 Unit<br>12 Unit | 12 Jenis<br>0 Unit<br>12 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas PD Beserta Atribut Kelengkapannya<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 88 Stell<br>788 paket | 88 Stell<br>788 paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian<br>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen<br>12 Dokumen | 12 Dokumen<br>12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian PD | 0 Dokumen<br>12 Dokumen<br>12 Dokumen | 0 Dokumen<br>12 Dokumen<br>12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai<br>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai<br>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen<br>0 Dokumen<br>12 Dokumen | 12 Dokumen<br>0 Dokumen<br>12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur PD Yang Mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | 39 Orang | 39 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 30 Orang | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 39 Orang | 39 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 200 Orang | 200 Orang | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 39 Orang | 39 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 50 Orang | | |
| | | | | | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7 Jenis | 7 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 24 paket | 24 paket | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19 Jenis | 19 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 paket | 24 paket | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga | 12 Jenis | 12 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 24 paket | 24 paket | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor | 11 Jenis | 11 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 24 paket | 24 paket | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Jenis<br>0 Paket<br>10000 paket | 6 Jenis<br>0 Paket<br>10000 paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Jenis Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | 0 Dokumen<br>12 Dokumen<br>12 Jenis | 0 Dokumen<br>12 Dokumen<br>12 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Jenis Bahan/Material<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Jenis<br>0 Paket<br>24 Paket | 12 Jenis<br>0 Paket<br>24 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi | 0 Laporan<br>1500 Laporan<br>100 Orang | 0 Laporan<br>1500 Laporan<br>100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD | 0 Laporan<br>169 Laporan<br>300 Kali | 0 Laporan<br>169 Laporan<br>300 Kali | Semua Kab/Kota<br>Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Yang di arsipkan | 1000 Dokumen<br>50 Dokumen | 1000 Dokumen<br>50 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10 Dokumen | 10 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Sistem Elektronik/Aplikasi PD | 4 System | 4 System | | |
| | | | | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.05.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Operasional/Lapangan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit | 6 Unit | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 24 paket | 24 paket | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor | 11 Unit | 11 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 24 Jenis | 24 Jenis | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | 5 Jenis | 5 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 24 Unit | 24 Unit | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | 11 Jenis | 11 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 24 Unit | 24 Unit | | |
| | | | | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1000 Laporan | 1000 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Surat Yang Terdistribusi | 500 Surat | 500 Surat | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 Jenis | 6 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 24 Laporan | | |
| | | | | | | | | 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum Kantor | 5 Jenis | 5 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 11 Jenis | 11 Jenis | 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan Dalam Kondisi Baik | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 6 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit | 24 Unit | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kendaraan Operasional/Lapangan Dalam Kondisi Baik | 5 Unit | 5 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 12 Unit | 12 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 100 Unit | 100 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 24 Unit | 24 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik | 2 Jenis | 2 Jenis | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 24 Unit | 24 Unit | | |
| | | | | | | | | | 1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan | 12 Jenis | 12 Jenis | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | | | | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Lainnya Dalam Kondisi Baik<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 Unit 24 Unit | | |
| | **1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 100 Persen 100 Persen | | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9 Jenis 9 Jenis | | 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 365 kasus 365 kasus | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 100 kasus 100 kasus | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 14 Dokumen 14 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14 Dokumen 14 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | umlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 390 Orang 390 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 50 Dokumen 50 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 12 Unit 12 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Diimutakhirkan | 10 Dokumen | 10 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 20 Laporan | 20 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Tegakan | 3 Laporan | 3 Laporan | 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ | 14 Laporan | 14 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 14 Laporan | 14 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 67 Laporan | 67 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | **1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana | 100 Persen | 100 Persen | 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi Rawan Bencana | 9331 Orang | 9331 Orang | 1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 93331 Orang | 93331 Orang | | |
| | | | | | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Masyarakat pada kawasan bencana yang memperoleh layanan | 391774 Orang | 391774 Orang | 1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | | | | Dilegalisasi | | | | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 465 Orang | 465 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | 50 Unit | 50 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 14 Kawasan | 14 Kawasan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | 0 | 0 | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 14 Kawasan | 14 Kawasan | | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 48 Orang | 48 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | 500 Orang | 500 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.02.12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 40 Keluarga | 40 Keluarga | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | |
| | | Program | | | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi 370 Paket | 370 Paket | | 1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas | 150 Laporan/ Kejadian | 150 Laporan/ Kejadian | | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah lembaga yang terlibat dalam penataan sistem dasar penanggulangan bencana | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN** | Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM | 100 Persen | 100 Persen | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, | Jumlah Jenis Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran | 10 Jenis | 10 Jenis | 1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Program | | Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan | 365 Laporan | 365 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | | 24 Unit | 24 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.01.08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala | | 103 Desa/Kelurahan | 103 Desa/Kelurahan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | | | | |
| | | | | | | | | 1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.05.04.2.01.10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 300 keluarga | 300 keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 100 Dokumen | 100 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 100 Dokumen | 100 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian | 20 Dokumen | 20 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah Jenis Data Warga dan Desa/Kelurahan yang memiliki kompetensi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 1 Jenis | 1 Jenis | 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 500 Orang | 500 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina | 103 Desa/Kelurahan | 103 Desa/Kelurahan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | | | | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | 103 Dokumen | 103 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Jumlah Jenis Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | 4 Jenis | 4 Jenis | 1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | 219 Laporan | 219 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.05.02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 32 Jenis | 32 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan | 100 Persen | 100 Persen | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/bulan | 75 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 24 Laporan | 24 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Barang Daerah Yang Terdaftar dalam Aset Daerah | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 1.06.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 201 Orang | 201 Orang | 1.06.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 150 Paket | 150 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 5 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang | 3 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang | 4 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Dilaksanakan | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 66 Unit | 66 Unit | 1.06.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 129 Unit | 129 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 Unit | 16 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 12 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Laporan 28 Laporan | | 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan | | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit | | 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 5 Unit 5 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 3 Unit 3 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit | | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | **1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN** | Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM 100 Persen 100 Persen | | 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial | Jumlah KAT yang meningkat kapasitasnya 100 Keluarga 100 Keluarga | | 1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas 50 Keluarga 50 Keluarga | | Kab. Maros | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ~~SOSIAL~~ | ~~Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial~~ | ~~Komunitas Adat~~ | | | ~~Pemberdayaan Sosial Kewenangan~~ | | | |
| | **Program** | | Terpencil (KAT) | **Kegiatan** | | Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** | | | |
| **No** | **Program** | **Indikator Kinerja** | | **Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | 1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Maros |
| | | **Hasil Program** | **Target Capaian** | | **Keluaran Kegiatan** | **Target Capaian** | **Sub Kegiatan** | **Indikator Keluaran Sub Kegiatan** | **Target Capaian** | **Lokasi Sub Kegiatan** | **Ket.** |
| | | | ~~Sebelum~~ ~~Sesudah~~ | | | ~~Sebelum~~ ~~Sesudah~~ | | | ~~Sebelum~~ ~~Sesudah~~ | | |
| | | | | ~~1.06.02.2.02~~ Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | ~~1.06.02.2.02.01~~ Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki kapasitas sesuai dengan standar yang berlaku 44 Orang 44 Orang | | 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang 14 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Keluarga 10 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Lembaga 2 Lembaga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Sertifikat 15 Sertifikat | Kab. Maros | |
| | **1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial 100 Persen 100 Persen | | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah penyandang disabilitas trlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar 160 Orang 160 Orang | | 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 70 Orang | 70 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial | Jumlah masyarakat dengan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 680 Orang | 680 Orang | 1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial rehabilitasi sosial dasar | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | | | 1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 70 Orang | 70 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | 60 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | | | | | 1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Persentase Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial | 100 Persen | 100 Persen | 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan sosial | 355 Orang | 355 Orang | 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | 255 Orang | 255 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah fakir miskin yang telah diverifikasi oleh daerah | 75610 Orang | 75610 Orang | 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 40000 Orang | 40000 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 15000 Keluarga | 15000 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan | 20590 Keluarga | 20590 Keluarga | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | | | 1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | **1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana | 100 Persen 100 Persen | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan mendapatkan pelayanan sosial sesuai standar dan ketentuan yang berlaku | 350 Orang 350 Orang | 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat korban bencana sosial yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial | 30 Orang 30 Orang | 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 Kampung | 14 Kampung | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Orang | 30 Orang | Kab. Maros | |
| | **1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN** | Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi Secara Aktif Dalam Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 100 Persen 100 Persen | 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Jumlah TPM yang dikelola oleh daerah | 5 Dokumen 5 Dokumen | 1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Program** | | Nasional Kabupaten/Kota | **Kegiatan** | | Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | **Sub Kegiatan** | | |
| **No** | **Program** | **Indikator Kinerja** | | **Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | **Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Lokasi Sub Kegiatan** | **Ket.** |
| | | **Hasil Program** | **Target Capaian** | | **Keluaran Kegiatan** | **Target Capaian** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Target Capaian** | |
| | | | **Sebelum** **Sesudah** | | | **Sebelum** **Sesudah** | | | **Sebelum** **Sesudah** | |
| | | | | | | | 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 2 Makam 2 Makam | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 Laporan 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | |
| | **2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | Persentase Rencana Ketenaga kerjaan Yang ditindak Lanjuti | 100 Persen 100 Persen | 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Jumlah Dokumen penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 0 Dokumen 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | 2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro | 100 Perusahaan 100 Perusahaan | Kab. Maros | |
| | **2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan berbasis kompetensi | 37,54 Persen 37,54 Persen | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 50 Orang 50 Orang | 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 23 Orang 23 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 2 Lembaga 2 Lembaga | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | 2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | 2 Unit 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan | 50 Orang 50 Orang | 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 6 Lembaga 6 Lembaga | Kab. Maros | |
| | | | | 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Dokumen Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 50 Perizinan 50 Perizinan | Kab. Maros | |
| | | | | 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengukuran produktivitas | 1 Dokumen 1 Dokumen | 2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 24,5 Persen 24,5 Persen | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelayanan antarkerja | 1 Dokumen 1 Dokumen | 2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 50 Orang 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 10 Orang 10 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD<br>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | 0 Orang<br>5 Orang | 0 Orang<br>5 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi dan penyerapan tenaga kerja di perusahaan | 1500 Orang | 1500 Orang | 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 1000 Orang | 1000 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 1000 Orang | 1000 Orang | Kab. Maros | |
| | **2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan | 100 Persen / 100 Persen | 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 50 Perusahaan | 50 Perusahaan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 50 Perusahaan | 50 Perusahaan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 6 Laporan | 6 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terfasilitasi | 10 Kasus | 10 Kasus | 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 5 Perkara | 5 Perkara | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 5 Perkara | 5 Perkara | Kab. Maros | |
| | **2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | 100 Persen | 100 Persen | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender | 14 Dokumen | 14 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | 85 Orang/bulan | | |
| | | | | | | | 2.08.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah aparatur PD yang mendapatkan Layanan administrasi Kepegawaian | 85 Orang / 85 Orang | 2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 85 Paket | 85 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan administrasi Umum PD | 11 Jenis / 11 Jenis | 2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Miik Daerah | 20 Jenis | 20 Jenis | 2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 11 Unit | 11 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | 11 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Yangberada dalam Kondisi Baik | 20 Jenis | 20 Jenis | 2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | **2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | persentase perempuan di lembaga Pemerintah dan Lembagaswasta | 56,98 Persen | 56,98 Persen | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Dokumen | 40 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 45 Perangkat Daerah | 45 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 45 Perangkat Daerah | 45 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada organisasi Kemasyarakatan | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Organisasi | 1 Organisasi | | |
| | | | | | 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan | 100 Orang | 100 Orang | 2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | 1 Lembaga | 1 Lembaga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 45 Dokumen | 45 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perempuan yang diselesaikan | 100 Persen | 100 Persen | 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Tndak Pidanan Kekerasan terhadapPerempuan Yang terselesaikan | 47 Kasus | 47 Kasus | 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan | 45 Perangkat Daerah | 45 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | |
| | | | | | 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan | 1 Layanan | 1 Layanan | 2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 30 Orang | 30 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Layanan | 1 Layanan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan | 100 Orang | 100 Orang | 2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Rasio KDRT | 0,01 Rasio | 0,01 Rasio | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender | 100 KK | 100 KK | 2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | |
| | | | | | 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga | 100 Orang | 100 Orang | 2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | 100 Lembaga | 100 Lembaga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak | 1 Layanan | 1 Layanan | 2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Layanan | 1 Layanan | Kab. Maros | |
| | **2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Persentase Ketersediaan data Terpilah | 100 Persen | 100 Persen | 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Data Gender dan anak | 45 Buku | 45 Buku | 2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Persentase Anak yang mendapatkan Pemenuhan Hak Anak | 100 Persen | 100 Persen | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha | Jumlah Lembaga PHA pada pemerintah, Non Pemerintab dan Dunia Usaha | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi | 30 Organisasi | 30 Organisasi | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | | | |
| | | | | | | | 2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen / 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Layanan Peningkatan Anak | 100 Orang / 100 Orang | 2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang / 100 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen / 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 Dokumen / 14 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen / 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang diselesaikan | 100 Persen / 100 Persen | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Tndak Pidana Kekerasan terhadap Anak Yang terselesaikan | 30 Kasus / 30 Kasus | 2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 45 Perangkat Daerah / 45 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen / 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus | 1 Layanan | 1 Layanan | 2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Layanan | 1 Layanan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 dokumen | 14 dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penguatan dan Pengembanagan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukanperlindungan Khusus | 100 Orang | 100 Orang | 2.08.07.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target Capaian Sebelum | Target Capaian Sesudah | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Sebelum | Target Capaian Sesudah | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Sebelum | Target Capaian Sesudah | Lokasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program** | **Hasil Program** | | | **Kegiatan** | **Keluaran Kegiatan** | | | **Sub Kegiatan** | **Keluaran Sub Kegiatan** | | | **Sub Kegiatan** | |
| | **2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | 39.1 Persen | 39.1 Persen | 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia | 5 Unit | 5 Unit | 2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 2.09.02.2.01.05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | 175.781.90 kkal/kapita/hari | 175.781.90 kkal/kapita/hari | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Jenis Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di daerah yang tersedia | 10 Jenis | 10 Jenis | 2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.09.03.2.01.07 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 50 Keluarga | 50 Keluarga | | |
| | | | | | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan | Jumlah Cadangan Pangan yang tersedia | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara | 0 Ton 0 Ton<br>2 Ton 2 Ton | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara | 0 Ton 0 Ton | | | |
| | | | | 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | Jumlah Dokumen Penentuan Harga Minimun Daerah untuk Pangan Lokal | 1 Dokumen 1 Dokumen | | 2.09.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | 1 Laporan 1 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun yang sesuai dengan angka kecukupan gizi | 162.06 Kg/Tahun 162.06 Kg/Tahun | | 2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan 1 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan 1 Laporan | | Kab. Maros | |
| | **2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani 100 Persen 100 Persen | | 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Jumlah Kecamatan yang memiliki Tingkat Ketahanan Pangan yang baik | 14 Kecamatan 14 Kecamatan | | 2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | "Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 Dokumen 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang tertangani | 14 Desa/Kelurahan 14 Desa/Kelurahan | | 2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 14 Laporan 14 Laporan | | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14 Dokumen | 14 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani | 100 Persen | 100 Persen | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi yang memenuhi standar keamanan sesuai standar yang berlaku | 14 Lokasi | 14 Lokasi | 2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 14 Sertifikat | 14 Sertifikat | | |
| | | | | | | | | | 2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI** | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Secara Cepat, Murah, dan Mudah | 100 Persen | 100 Persen | 2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Izin Lokasi yang diterbitkan | 1 Remonendasi | 1 Remonendasi | 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | 0<br>1 Dokumen | 0<br>1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan | 100 Persen | 100 Persen | 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Sengketa Tanah yang Diselesaikan | 4 Kasus | 4 Kasus | 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | Kab. Maros | |
| | **2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN** | | | | 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan | | | | 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Santunan Tanah | | | | |
| | | | | | | | | | 2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | **2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee | 100 Persen | 100 Persen | 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente yang di tetapkan | 1 Objek | 1 Objek | 2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.10.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT** | Persentase Luas Tanah Ulayat Yang Mendapatkan Penetapan | 30 Persen | 30 Persen | 2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Luas Areal Tanah Ulayat yang Ditetapkan | 0.5 Ha | 0.5 Ha | 2.10.07.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | Persentase Luas Tanah Kosong yang Termanfaatkan | 30 Persen | 30 Persen | 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | Luas Areal Tanah Kosong yang Tidak Memiliki Masalah | 1 Kasus | 1 Kasus | 2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW | 60 Persen | 60 Persen | 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Luas penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW | 6600 Ha | 6600 Ha | 2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Pembangunan Kabupate n | 100 Persen | 100 Persen | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Cakupan Wilayah Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 100 Persen 100 Persen | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumah lokasi pengukuran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota yang terlaksana<br>Jumlah Laboratorium lingkungan yang tersedia<br>Jumlah lokasi pengukuran pencemaran | 32 Lokasi<br>1 Unit<br>32 Lokasi | 32 Lokasi<br>1 Unit<br>32 Lokasi | 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan<br>Jumlah Dokumen Kontribusi Sektor Persampahan terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 0 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 0 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Laboratorium Lingkungan yang tersedia<br>Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 1 Unit<br>1 Dokumen | 1 Unit<br>1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau | terlaksananya penanggulan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota | 32 Lokasi | 32 Lokasi | 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada | 40 Laporan | 40 Laporan | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | | | |
| | | | | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi wilayah yang mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat dipulihkan | 32 Lokasi / 32 Lokasi | 2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | **2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | Persentase luas wilayah yang tertutup pepohonan | 5 Persen / 5 Persen | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Luas areal keanekaragaman hayati (KEHATI) yang dikelola termasuk taman kebun raya dan RTH | 16.17 Persen / 16.17 Persen | 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 90 Ha | 90 Ha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | **2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | Persentase Volume Limbah B3 yang tertangani sesuai ketentuan berlaku | 100 Persen / 100 Persen | 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tersedia | 50 Lokasi / 50 Lokasi | 2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 50 Laporan | 50 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LImbah B3 yang terpantau | 50 Lokasi / 50 Lokasi | 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN** | Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan | 100 Persen / 100 Persen | 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau | Jumlah unit usaha yang memiliki izin PPLH yang berada dalam pengawasan pemerintah Kabupaten | 30 Unit Usaha / 30 Unit Usaha | 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, | 30 Laporan | 30 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | **2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | Pensentase keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) terkait PPLH | 100 Persen | 100 Persen | 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Jumah pengakuan MHA terkait PPLH | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | **2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang lingkungan hidup | 75 Persen | 75 Persen | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | 0 Lembaga | 0 Lembaga | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | 14 Lembaga | 14 Lembaga | | |
| | | | | | | | | | 2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | | 2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 14 Orang | 14 Orang | Semua Kab/Kota | |
| | **2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Persentase Partisipasi Masyarakat secara Aktif Dalam Penghargaan Lingkungan Hidup | 75 Persen | 75 Persen | 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penghargaan lingkungan hidup | 212.116 Orang | 212.116 Orang | 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 0 Entitas | 0 Entitas | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diterima | 10 Penghargaan | 10 Penghargaan | | |
| | **2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup yang diselesaikan | 100 Persen | 100 Persen | 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang | Jumlah kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diselesaikan | 10 Kasus | 10 Kasus | 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | 1 Dokumen 1 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | **2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Persentase sampah yang tertangani 96.23 Persen 96.23 Persen | | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | Jumlah sampah yang tertangani 198.527 Ton 198.527 Ton | | 2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan | 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 14 Laporan 14 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 0 Ton 0 Ton | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Tenaga Operasional Persampahan | 450 Orang 450 Orang | | |
| | | | | | | | 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 150 Kelompok 150 Kelompok | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan yang diadakan | 12 Unit 12 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 15 Unit | 15 Unit | | |
| | **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 100 persen | 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/bulan | 75 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | umlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 2 Dokumen 8 Jenis | 2 Dokumen 8 Jenis | 2.12.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 65 Orang | 65 Orang | 2.12.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 140 Paket | 140 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 70 Orang | 70 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | 100 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 75 Orang | 75 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 7 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 20 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 Paket | 20 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 25 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6600 Dokumen | 6600 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 2.12.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 7 Unit | 7 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 12 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.12.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit<br>3 Unit<br>2 Unit | 1 Unit<br>3 Unit<br>2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8 Jenis | 8 Jenis | 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 200 Laporan | 200 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | umlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 8 Jenis | 8 Jenis | 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.12.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit<br>5 Unit | 0 Unit<br>5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.12.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi | | | | |
| | **2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Persentase Penduduk diatas 17 Tahun yang memiliki KTP Berbasis NIK | 89 persen | 89 persen | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dengan Sistem Layanan Stesel Pasif | 95 Persen | 95 Persen | 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | | 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 16000 Dokumen | 16000 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | 24000 Orang | 24000 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 16000 Dokumen | 16000 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Jenis Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 5000 Dokumen | 5000 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | Program | | | | 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftran Penduduk | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | Persentase Penduduk Yang Mengalami Peristiwa Penting dan Terdata dalam Pencatatan Sipil | 95 persen | 95 persen | 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan Sistem Layanan Stelsel Pasif | 90 Persen | 90 Persen | 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 21600 Dokumen | 21600 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 4 Layanan | 4 Layanan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.03.2.01.03 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 3 Paket | 3 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | ersentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat Miskin | 95 Persen | 95 Persen | 2.12.03.2.02.03 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 3000 Laporan | 3000 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 20 Laporan | 20 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.03.2.02.08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.12.03.2.03.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.03.2.03.04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 2 Laporan | 2 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | |
| | **2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | Persentase pemanfaatan data dan Informasi Kependudukan | 100 Persen | 100 Persen | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase Ketersediaan Data Base Kependudukan Untuk Pemanfaatan Data | 100 Persen | 100 Persen | 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 20 Dokumen | 20 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.12.04.2.01.03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PIAK | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.04.2.03.06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PIAK | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN** | Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan | 100 persen | 100 persen | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil | Jumlah Jenis Media Profil Data Base Kependudukan | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ~~PROFIL KEPENDUDUKAN~~ | ~~Program~~ | | ~~Kependudukan~~ | ~~Kegiatan~~ | | | ~~Sub Kegiatan~~ | | |
| **No** | **Program** | **Indikator Kinerja** | | **Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | **Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | **Lokasi Sub Kegiatan** | **Ket.** |
| | | **Hasil Program** | **Target Capaian** | | **Keluaran Kegiatan** | **Target Capaian** | | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Target Capaian** | | |
| | | | **Sebelum** **Sesudah** | | | **Sebelum** **Sesudah** | | | **Sebelum** **Sesudah** | | |
| | **2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | |
| | **2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan. 100 Persen 100 Persen | | 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah 19 Dokumen 19 Dokumen | | 2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen | | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.13.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.13.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen SAKIP-PD 1 Laporan 1 Laporan | | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan 57 Dokumen 57 Dokumen | | 2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 14 Dokumen 14 Dokumen<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.13.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.13.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verfikasi 12 Dokumen 12 Dokumen | | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Keuangan PD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen | | | | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD 1 Dokumen 1 Dokumen | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Dokumen 18 Dokumen | | | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 27 Dokumen 27 Dokumen | | | 2.13.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen<br>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan BMD-PD 12 Dokumen 12 Dokumen<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian BMD-PD 12 Dokumen 12 Dokumen<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD-PD 1 Dokumen 1 Dokumen<br>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan BMD-PD 1 Dokumen 1 Dokumen | | | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.13.01.2.05 Administrasi | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian 62 Orang 62 Orang | | | 2.13.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 62 Stell 62 Stell | | | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian PD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilian Kerja Pagawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 8 Jenis | 8 Jenis | 2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Jenis | 1 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Jenis | 1 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga | 1 Jenis | 1 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor | 1 Jenis | 1 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Jenis | 1 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Jenis Bahan/Material | 1 Jenis | 1 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12000 Orang | 12000 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2000 Kali | 2000 Kali | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | 2.13.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 15 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Jenis | 5 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | 2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Jenis | 7 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | 7 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | **2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA** | Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa | 60 Persen | 60 Persen | 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa | 80 Desa | 80 Desa | 2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 5 Desa | 5 Desa | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 80 Desa | 80 Desa | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 80 Desa | 80 Desa | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.02.2.01.04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 12 Desa | 12 Desa | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.02.2.01.05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Sebelum | Sesudah | Keluaran Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | Keluaran Sub Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | Persentase Desa yang memiliki kerja sama baik antar Pemerintah Desa Maupun dengan Pihak ketiga dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 100 Persen | 100 Persen | 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen kerja sama yang difasilitasi dalam rangka pembangunan Desa | 80 Kerjasama | 80 Kerjasama | 2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | 20 Persen | 20 Persen | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku | 80 Desa | 80 Desa | 2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 80 Orang | 80 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 16 Laporan | 16 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 16 Laporan | 16 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 80 Orang | 80 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 40 Desa | 40 Desa | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | 100 Persen | 100 Persen | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan | 103 Lembaga | 103 Lembaga | 2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 103 Lembaga | 103 Lembaga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 15 Unit | 15 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.10 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 80 Keluarga | 80 Keluarga | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.13.05.2.01.11 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 80 Keluarga | 80 Keluarga | Kab. Maros | |
| | **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk | 1,59 Persen | 1,59 Persen | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Singkronisai Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan | 2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) ) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.04 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.06 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.07 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.08 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 10 Satuan Pendidikan | 10 Satuan Pendidikan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | 10 Dokumen | 10 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.12 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | 7 Organisasi | 7 Organisasi | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.13 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | 20 Organisasi | 20 Organisasi | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan ketersediaan Perkiraan Pengendalian Penduduk | 100 persen | 100 persen | 2.14.02.2.02.01 Perumusan Parameter Kependudukan | Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.04 Pemetaan Kependudukan | Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.06 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan | Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.07 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) | Jumlah Pengukuran dan perhitungan indikator Kerentanan Dampak Kependudukankerentanan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 165 Orang | 165 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN** | Persentase Akseptor KB | 80,16 Persen | 80,16 Persen | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, | Cakupan Pellaksanaan Kegiatan advokasi, komunikasi dan Informasi | 100 persen | 100 persen | 2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan | Jumlah Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan | 20 Organisasi | 20 Organisasi | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB | | | Mitra Kerja | Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 0 Organisasi | 0 Organisasi | | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 420 Dokumen | 420 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 3122 Unit | 3122 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.01.05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | Jumlah Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | 0<br>2 Media | 0<br>2 Media | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Target Capaian | | | Kegiatan | Target Capaian | | | Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | Hasil Program | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 100 persen | 100 persen | 2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 100 Organisasi | 100 Organisasi | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | 14 Unit | 14 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pendistribusian kebutuhan alat dan Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB | 100 persen | 100 persen | 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.03.05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 12 Unit | 12 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.03.07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 400 Orang | 400 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.03.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | 420 Orang | 420 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan | Cakupan Pemberdayaan dan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan KB | 100 persen | 100 persen | 2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 50 Organisasi | 50 Organisasi | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 30 Kampung | 30 Kampung | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Persentase Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | 60 Persen | 60 Persen | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Pelaksanaan PembangunanKeluarga Melalui Pembinaan Ketahahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100 persen | 100 persen | 2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk | 30 Kelompok | 30 Kelompok | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 14 Unit | 14 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 240 Orang | 240 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 30 Kelompok | 30 Kelompok | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2 Laporan | 2 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan | 100 persen | 100 persen | 2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 2 Laporan | 2 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Persentase layanan angkutan darat | 27.89 Persen | 27.89 Persen | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.15.02.2.02 Penyediaan | Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersdia | 7 Jenis | 7 Jenis | 2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 500 Unit | 500 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | |
| | | Program | | | Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 300 Unit | 300 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 300 Unit | 300 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 300 Unit | 300 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Terminal Tipe C Yang Tersedia | 1 Unit | 1 Unit | 2.15.02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 Orang | 3 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah fasilitas pelayanan parkir yang memiliki izin | 40 Lokasi | 40 Lokasi | 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Laporan | 10 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah kendaraan wajib uji berkala | 5000 Unit | 5000 Unit | 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 13 Unit | 13 Unit | | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 5 Orang | 5 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 5000 Unit | 5000 Unit | | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 5000 Dokumen | 5000 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | JumlahLaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 3 Laporan | 3 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 50 Laporan | 50 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 50 Laporan | 50 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 5 Unit | 5 Unit | | |
| | | | | | | | | 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 4 Laporan | | |
| | | | | 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan | 30 Rekomendasi | 30 Rekomendasi | 2.15.02.2.07.02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 Orang | 3 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | 2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Persentase arus penumpang angkutan penyeberangan sungai yang melalui dermaga/ | 40 Persen 40 Persen | 2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi | Jumlah dokumen Izin Usaha Angkutan Laut yang Diterbitkan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.15.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 2.15.03.2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang diterbitkan | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 2.15.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.15.03.2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | Jumlah kapal yang memiliki izin operasi | 50 Unit | 50 Unit | 2.15.03.2.06.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | Jumlah Izin Usaha yang terbitkan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.15.03.2.08.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | | 2.15.03.2.12.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 4 Laporan | 4 Laporan | | |
| | | | | | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah pelabuhan yang memiliki izin pembangunan dan operasi | 7 Unit | 7 Unit | 2.15.03.2.13.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.15.03.2.13.05 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia | 1 Unit | | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | | | 2.15.03.2.13.06 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan — 1 Unit / 1 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.15.03.2.13.07 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara — 1 Unit / 1 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | 2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah pelabuhan yang memiliki izin untuk pelabuhan Pengumpan Lokal — 10 Unit / 10 Unit | | 2.15.03.2.15.03 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia — 10 Unit / 10 Unit | | Kab. Maros | |
| | **2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | |
| | **2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah — 100 Persen / 100 Persen | | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan — 29 Dokumen / 29 Dokumen | | 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah — 2 Dokumen / 2 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD — 2 Dokumen / 2 Dokumen | | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD — 2 Dokumen / 2 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD — 2 Dokumen / 2 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD — 2 Dokumen / 2 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD — 1 Laporan / 1 Laporan | | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah — 12 Laporan / 12 Laporan | | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengeloaan Keuangan Perangkat Daerah | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 62 Orang/bulan | 62 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Dokumen | 18 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 2.16.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 62 Orang | 62 Orang | 2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 62 Paket | 62 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 10 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Pd Yang Dilaksanakan | 8 Jenis | 8 Jenis | 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Penunjang PD | 4 Jenis | 4 Jenis | 2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 92 Unit | 92 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Penunjang PD | 3 Jenis | 3 Jenis | 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 92 Unit | 92 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 100 Persen | 100 Persen | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | 5 Orang | 5 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 14 Unit | 14 Unit | Kab. Maros | |
| | **2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Persentas e Aplikasi Informati ka Yang Terintegra si Dalam SPBE | 65 Persen | 65 Persen | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Informasi Yang terintegrasi | 3 Sistem | 3 Sistem | 2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-goverment dalam penyelenggaraan Pemerintahan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 40 Perangkat Daerah | 40 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 66 Orang/bulan | 66 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 18 Laporan | 18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 2.17.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 2.17.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | Program | | | Kegiatan | | | 2.17.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 1 Laporan / 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 66 Orang / 66 Orang | 2.17.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit / 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket / 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang / 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang / 50 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang / 50 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 9 Jenis / 9 Jenis | 2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket / 10 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Paket / 15 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 7 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 6 Jenis | 6 Jenis | 2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 15 Unit | 15 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 10 Jenis | 10 Jenis | 2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit | 14 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 120 Unit | 120 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 26 Unit | 26 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 26 Unit | 26 Unit | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 26 Unit | 26 Unit | Kab. Maros | |
| | **2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah | 85 Persen 85 Persen | 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam<br>Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam | 50 Koperasi<br>2 Unit | 50 Koperasi<br>2 Unit | 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit Usaha | 2 Unit Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin pembukaan<br>Jumlah koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam | 25 Koperasi<br>2 Unit | 25 Koperasi<br>2 Unit | 2.17.02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit Usaha | 2 Unit Usaha | Kab. Maros | |
| | **2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah | 2,36 Persen 2,36 Persen | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi berkualitas<br>Jumlah Koperasi yang berkualitas | 66 Unit<br>50 Koperasi | 66 Unit<br>50 Koperasi | 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 66 Unit Usaha | 66 Unit Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja | 66 Unit Usaha | 66 Unit Usaha | Kab. Maros | |
| | **2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | Persentase Koperasi Berkategori Sehat | 50 Persen 50 Persen | 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang memperoleh sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi | 66 Unit | 66 Unit | 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 50 Unit Usaha | 50 Unit Usaha | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan | 50 Unit Usaha / 50 Unit Usaha | Kab. Maros | |
| | **2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase Koperasi Berkinerja Baik | 71,62 Persen / 71,62 Persen | 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengurus Koperasi yang di latih<br>Jumlah pengurus koperasi yang memiliki peningkatan kualitas dan kapasitas | 30 Koperasi / 30 Koperasi<br>100 Orang / 100 Orang | 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 100 Orang / 100 Orang | Kab. Maros | |
| | **2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Persentase Koperasi Aktif | 71,62 Persen / 71,62 Persen | 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha dan pemberdayaan koperasi<br>Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha dan pemberdayaan koperasi | 50 Unit / 50 Unit<br>100 Koperasi / 100 Koperasi | 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Unit Usaha / 100 Unit Usaha<br>0 Unit Usaha / 0 Unit Usaha | Kab. Maros | |
| | **2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 100 Persen / 100 Persen | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha.<br>Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha. | 150 UKM / 150 UKM<br>33475 Unit / 33475 Unit | 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro<br>Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarnisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | 0 Dokumen / 0 Dokumen<br>1400 UKM / 1400 UKM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 1400 UKM / 1400 UKM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 1400 UKM / 1400 UKM | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 60 Unit Usaha | 60 Unit Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro | 60 UKM | 60 UKM | | |
| | | | | | | | | 2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingandalam pemberdayaan usaha mikro | 1400 UKM | 1400 UKM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 0 Orang | 0 Orang | | |
| | | | | | | | | 2.17.07.2.01.06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | **2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Persentase UMKM Yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas Produksi. | 65 Persen / 65 Persen | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 150 Unit | 150 Unit | 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 150 Unit Usaha | 150 Unit Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | | Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi | 150 UKM | 150 UKM | | Jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan tehnologi | 150 UKM | 150 UKM | | |
| | **2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | |
| | **2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjan g Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen / 100 Persen | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | RKA-SKPD | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen SAKIP PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Dokumen | 14 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Atas hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil | 0 Laporan | 0 Laporan | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Dokumen | 18 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | | |
| | | | | | 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Admnistrasi Barang Milik Daerah pada PD | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 2.18.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | | |
| | | | | | | | | | 2.18.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah aparatur PD yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 110 Orang | 110 Orang | 2.18.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 5 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | 5 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | 15 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum | Jumlah Jenis layanan Adiminitrasi Umum PD Yang dilaksanakan | 11 Jenis | 11 Jenis | 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | Perangkat Daerah | | | | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Disediakan | | | | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan PD | 6 Jenis | 6 Jenis | 2.18.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis jasa Penunjang Urusan PD | 4 Jenis | 4 Jenis | 2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan PD | 5 Jenis | 5 Jenis | 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | 2.18.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Jenis Pelayanan BLUD | 1 Jenis | 1 Jenis | 2.18.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | Kab. Maros | |
| | **2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Persentase Pertumbuhan Investasi 12.06 Persen 12.06 Persen | | 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | 1 Kegiatan Usaha | 1 Kegiatan Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen peta potensi investasi | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi 85 Persen 85 Persen | | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah minat investasi | 100 Pengunjung | 100 Pengunjung | 2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinana | 100 Persen 100 Persen | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | 3500 Izin | 3500 Izin | 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 50 Pelaku Usaha | 50 Pelaku Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | 1 Kegiatan Usaha | 1 Kegiatan Usaha | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | ~~Sebelum~~ | ~~Sesudah~~ | | Keluaran Kegiatan | ~~Sebelum~~ | ~~Sesudah~~ | | Keluaran Sub Kegiatan | ~~Sebelum~~ | ~~Sesudah~~ | | |
| | | | | | | | | | 2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 15 Orang | 15 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 1 Kegiatan Usaha | 1 Kegiatan Usaha | Kab. Maros | |
| | **2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase Perusahaan Yang Menyamp aikan Laporan Kegiatan Penanam an Modal Secara Tepat Waktu | 85 Persen | 85 Persen | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen LKPM | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 Kegiatan Usaha. | 100 Kegiatan Usaha. | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 Pelaku Usaha | 100 Pelaku Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 50 Kegiatan Usaha | 50 Kegiatan Usaha | Kab. Maros | |
| | **2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Moda | 65 Persen | 65 Persen | 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diklelola | 3500 Izin | 3500 Izin | 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 100 Persen | 100 Persen | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader yang mendapatkan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas | 183 Orang | 183 Orang | 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 32 Orang | 32 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 25 Orang | 25 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | 45 Orang | 45 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan | 1 Unit | | | |
| | | | | | | | | | 2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan | 78 Orang | 78 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kepemudaan dan wirausaha yang mendapatkan peningkatan kapasitas | 40 Organiasasi | 40 Organiasasi | 2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha | 44 OKP | 44 OKP | | |
| | | | | | | Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | 100 Persen | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Cakupan pembinaan olahraga | 100 Persen | 100 Persen | 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang mendapatkan pembinaan | 27 Cabor | 27 Cabor | 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan pada tingkat daerah | 27 Cabor | 27 Cabor | 2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupten | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah cabang Olahraga yang dipertandingkan | 5 Cabor | 5 Cabor | | |
| | | | | | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan pada tingkat propinsi | 15 Cabor | 15 Cabor | 2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | 100 Orang | 100 Orang | | |
| | | | | | | | | | 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan | 250 Orang | 250 Orang | | |
| | | | | | | | | | 2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan | 27 Cabor | 27 Cabor | 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 5 Organisasi | 5 Organisasi | | |
| | | | | | | | | | 2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | |
| | | | | | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dikembangkan dan mendapatkan pembinaan | 5 Cabor | 5 Cabor | 2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | JJumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 1 Laporan | 1 Laporan | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 0 Laporan / 0 Laporan | | |
| | | | | | | | 2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | JJumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | 3 Unit / 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | 0 Unit / 0 Unit | | |
| | | | | | | | 2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 2 Dokumen / 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | 2 Dokumen / 2 Dokumen | | |
| | **2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi | 100 Persen / 100 Persen | 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah Anggota Pramuka yang dibina | 4500 Orang / 4500 Orang | 2.19.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | 3 Dokumen / 3 Dokumen | | |
| | | Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi,Sosial Kemasyrakatan, Organisasi organisasi dan mengeluarkan pendapat | 80 Persen / 80 Persen | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 100 Persen / 100 Persen | | | | | |
| | | | | | | | 2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 0 Organisasi / 0 Organisasi | | |
| | | | | | | | | Jumlah pemuda yang ikut serta dalam kegiatan kepramukaan | 4500 Orang / 4500 Orang | | |
| | | | | | | | 2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 4500 Orang / 4500 Orang | | |
| | | | | | | | 2.19.04.2.01.04 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | 1 Unit / 1 Unit | | |
| | | | | | | | 2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 6 Laporan / 6 Laporan | | |
| | | | | | | | 2.19.04.2.01.07 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan | 1 Unit | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | | | 2.19.04.2.01.08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | **2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | |
| | **2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Tersedian ya sistem data dan statistik yang terintegr<br>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | 100 Persen 100 Persen<br>100 Persen 100 Persen | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik sektoral | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 40 Orang | 40 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | |
| | **2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah | 100 Persen 100 Persen | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam berkomunikasi | 40 PD | 40 PD | 2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan | 40 Perangkat Daerah | 40 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | Layanan Keamanan Informasi | | | | |
| | | | | | 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Berita sandi yang terdisribusikan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 40 Perangkat Daerah | 40 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |
| | **2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan dan Dikembangkan | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 6 Objek | 6 Objek | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kesenian tradisional yang dikelola dengan baik | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 5 Objek | 5 Objek | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 14 Sertifikat | 14 Sertifikat | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Event dan Lembaga Adat yang dibina secara terpadu | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 14 Objek | 14 Objek | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | 14 Unit | 14 Unit | Kab. Maros | |
| | **2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Persentase Peserta Didik Yang Menguasai Kesenian Tradisional Lokal | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Event yang dibina dan dilestarikan | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 60 Orang | 60 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi | 10 Sertifikat | 10 Sertifikat | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 14 Lembaga | 14 Lembaga | Kab. Maros | |
| | **2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | Persentase Penduduk usia 15 Tahun keatas yang mengetahui Sejarah Lokal | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Situs Sejarah Lokal yang dibina dan dilestarikan secara terpadu | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | 14 Unit | 14 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Situs Cagar Budaya yang dimiliki dan dikelola secara terpadu | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | 2 Objek | 2 Objek | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 2 Objek | 2 Objek | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Cagar Budaya yang dikelola dengan baik | 100 Persen | 100 Persen | 2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 67 Objek | 67 Objek | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | 67 Objek | 67 Objek | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | 2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | 67 Objek | 67 Objek | Kab. Maros | |
| | | | | 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya | 100 Persen 100 Persen | 2.22.05.2.03.01 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi | 10 Objek | 10 Objek | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.22.05.2.03.02 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang berkunjung ke Museum minimal 1 Kali dalam setahun | 100 Persen 100 Persen | 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten Kota | 100 Persen 100 Persen | 2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 67 Unit | 67 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | **2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | |
| | **2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 Persen 100 Persen | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen 19 Dokumen | 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 7 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan administrasi keuangan | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 Orang/bulan | 70 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 71 Dokumen | 71 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 71 Dokumen | 71 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian | 70 Orang / 70 Orang | 2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket / 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan | 11 Jenis / 11 Jenis | 2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket / 6 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket / 5 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket / 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 30 Paket / 30 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket / 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 22 Laporan / 22 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan / 150 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 50 Dokumen / 50 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis BMD PD penunjang kebutuhan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang berada dalam kondisi baik | 11 Jenis / 11 Jenis | 2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 8 Unit / 8 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit / 13 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit / 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit / 4 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.23.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 43 Unit | 43 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11 Laporan | 11 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis BMD PD penunjang kebutuhan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang berada dalam kondisi baik | 11 Jenis | 11 Jenis | 2.23.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 50 Unit | 50 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 50 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 20 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | **2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | 0,96 Rasio 0,96 Rasio | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota | 5 Jenis | 5 Jenis | 2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 1 Layanan | 1 Layanan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 70 Eksemplar | 70 Eksemplar | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 15 Perpustakaan | 15 Perpustakaan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 2 Perpustakaan | 2 Perpustakaan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 10 Orang | 10 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | 5 Layanan | 5 Layanan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | 1.575 Eksemplar | 1.575 Eksemplar | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 2 Eksemplar | 2 Eksemplar | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis kegiatan yang menunjang peningkatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota | 5 Jenis | 5 Jenis | 2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 4 Lokus | 4 Lokus | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 10 Orang | 10 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 9 Perpustakaan | 9 Perpustakaan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya | 3 Orang | 3 Orang | Kab. Maros | |
| | **2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | Persentase penambahan koleksi nasional dan naskah kuno perpustakaan yang lengkap | 6 Persen 6 Persen | 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis naskah kuno yang bernilai sejarah yang dilestarikan | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 50 Orang | 50 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 18 Eksemplar | 18 Eksemplar | Kab. Maros | |
| | | | | 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan | 40 Eksemplar | 40 Eksemplar | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan | 40 Eksemplar | 40 Eksemplar | Kab. Maros | |
| | **2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku | 100 Persen | 100 Persen | 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen arsip dinamis yang dikelola | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 150 Berkas | 150 Berkas | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 150 Berkas | 150 Berkas | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen arsip statis yang dikelola | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 2.24.02.2.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI | 50 Arsip | 50 Arsip | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 100 Arsip | 100 Arsip | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah sistem simpul jaringan informasi kearsipan yang dikelola | 1 Sistem | 1 Sistem | 2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 440 Pengguna | 440 Pengguna | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | **2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | Persentase dokumen arsip yang diakuisisi dan terpelihara | 100 Persen | 100 Persen | 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah dokumen arsip yang dimusnahkan | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 5 Arsip | 5 Arsip | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 5 Berkas | 5 Berkas | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | |
| | | | | | 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | Jumlah jenis dokumen arsip yang terlindungi dan terselamatkan akibat bencana | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 15 Arsip | 15 Arsip | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.24.03.2.02.02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 15 Arsip | 15 Arsip | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Jumlah jenis dokumen arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabungkan dan/atau dibubarkan | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 15 Daftar | 15 Daftar | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 15 Arsip | 15 Arsip | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Jumlah autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Perangkat Daerah | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 2 Arsip | 2 Arsip | Kab. Maros | |
| | | | | | 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Jumlah dokumen arsip statis yang dinyatakan hilang | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | 2 Arsip | 2 Arsip | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.24.03.2.05.02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 2 Arsip | 2 Arsip | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 2.24.03.2.05.03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | 2 Arsip | 2 Arsip | Kab. Maros | |
| | **2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | Persentase arsip yang menjadi bahan informasi | 100 Persen | 100 Persen | 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | Jumlah jenis pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup | 2 Jenis | 2 Jenis | 2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | 1 SOP | 1 SOP | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 500 Arsip | 500 Arsip | Kab. Maros | |
| | **3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran , dan EvaluasKinerja Perangkat Daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan AdministrasiKeuangan | 43 Dokumen | 43 Dokumen | 3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | 85 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.25.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 85 Orang | 85 Orang | 3.25.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 7 Unit | 7 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 85 Orang | 85 Orang | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | | | Kab. Maros | |
| | | | | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 11 Jenis | 11 Jenis | 3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | 3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | Program | | Kegiatan | Kegiatan | | Sub Kegiatan | Sub Kegiatan | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indikator Kinerja | | | Indikator Kinerja | | | Indikator Kinerja | | | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | |
| | | | | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | 3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berada Dalam Kondisi Baik | 4 Jenis | 4 Jenis | 3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit 1 Unit | Kab. Maros | |
| | **3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 0.15 Persen | 0.15 Persen | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya | 3250 Ton | 3250 Ton | 3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 5 Unit 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 3062 Unit 3062 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Tangkap | | | | | |
| | | | | | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapasitasnya | 240 Orang | 240 Orang | 3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 240 Orang | 240 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 15 Kelompok | 15 Kelompok | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 25 Unit Usaha | 25 Unit Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola dan menyelenggarakan kegiatan sesuai fungsinya | 1 Unit | 1 Unit | 3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 2 Layanan | 2 Layanan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang diterbitkan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.25.03.2.04.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | 70 Rekomendasi | 70 Rekomendasi | Kab. Maros | |
| | **3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.25.04.2.01.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal | 20 Rekomendasi | 20 Rekomendasi | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.01.02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan | 20 Rekomendasi | 20 Rekomendasi | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan | 85 Kelompok | 85 Kelompok | 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 15 Kelompok | 15 Kelompok | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 25 Kelompok | 25 Kelompok | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | 25 Kelompok | 25 Kelompok | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 20 Kelompok | 20 Kelompok | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.25.04.2.03.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah | 20 Rekomendasi | 20 Rekomendasi | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.03.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 20 Rekomendasi | 20 Rekomendasi | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar | 40 Kelompok | 40 Kelompok | 3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7 Unit | 7 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.04.06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | 4 Ha | 4 Ha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.04.2.04.07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 120 Orang | 120 Orang | Kab. Maros | |
| | **3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan | 0.97 Persen | 0.97 Persen | 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang diterbitkan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | Kab. Maros | |

| No | Program | Program<br>Indikator Kinerja<br>Hasil Program | Target Capaian<br>Sebelum | Target Capaian<br>Sesudah | Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Keluaran Kegiatan | Target Capaian<br>Sebelum | Target Capaian<br>Sesudah | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian<br>Sebelum | Target Capaian<br>Sesudah | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah jenis bahan baku industri yang tersedia dan disalurkan | 2 Jenis | 2 Jenis | 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 285 Ton | 285 Ton | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 15 Pelaku Usaha | 15 Pelaku Usaha | Kab. Maros | |
| | **3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, BB Nilai BB Nilai<br>Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,Pemuda dan Olahraga BB Nilai BB Nilai | | | 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | JJumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen<br>0 Dokumen | 1 Dokumen<br>0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.26.01.2.02 Administrasi | Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 102 Orang/bulan | 102 Orang/bulan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Keuangan Perangkat Daerah | Keuangan | | | | Tunjangan ASN | | | | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | JJumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | JJumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 3.26.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.26.01.2.05 Administrasi | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | ~~Sebelum~~ | ~~Sesudah~~ | | | ~~Sebelum~~ | ~~Sesudah~~ | | | ~~Sebelum~~ | ~~Sesudah~~ | | |
| | | Program | | | Kepegawaian Perangkat Daerah | Kegiatan | | | 3.26.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 3.26.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 Unit | 30 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 3.26.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.26.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.26.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 40 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.26.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 3 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | **3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Rata - Rata Lama Kunjungan Wisata | 1 Hari 1 Hari | 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Obyek Wisata yang dikelola dengan Baik | 5 Destinasi | 5 Destinasi | 3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang terkelola dengan baik | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Pembangunan dengan pengadaan sarana dan prasaranan dalam peneglolaan kawasan wisata | 9 Paket | 9 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Destinasi | 3 | 3 | 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | JJumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Destinasi | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan destinasi wisata Kabupaten/Kota | 12 Bulan | 12 Bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | **3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Persentase Kunjungan Wisata | 40,74 Persen 40,74 Persen | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 195.119 Orang | 195.119 Orang | 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | JJumlah Pelaksanaan Promosi Media Cetak dan Media lainnya | 12 Bulan | 12 Bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 7 Laporan | 7 Laporan | | |
| | **3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | Persentase Usaha Ekonomi Kreatif Lokal Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual | 100 Persen 100 Persen | 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah prasarana yang disiapkan bagi insan kreatif untuk berkespresi, berpromosi dan berinteraksi | 1 Unit | 1 Unit | 3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Persentase Berembang Ekosistem Ekonomi Kreatif | 100 Persen | 100 Persen | 3.26.04.2.02.04 Penyediaan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.26.04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Ekonomi Kreatif | | | | |
| | | | | | | | | | 3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | 85 Persen | 85 Persen | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah sumber daya manusia pariwsata dan ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | 300 Orang | 300 Orang | 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | 60 Orang | 60 Orang | | |
| | | | | | | | | | 3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | 150 Orang | 150 Orang | | |
| | | | | | | | | | 3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 6 Laporan | 6 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 105 Orang | 105 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | 300 Orang | 300 Orang | 3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | **3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.27.01 PROGRAM PENUNJANG** | Perentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | 100 Persen | 3.27.01.2.01 Perencanaan, | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Program | | | Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan | | | Daerah | Sub Kegiatan | | | Lokasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indikator Kinerja | | | | Indikator Kinerja | | | | Indikator Kinerja | | | | |
| | Program | Hasil Program | Target Capaian | | Kegiatan | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Sub Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sub Kegiatan | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 55 Dokumen | 55 Dokumen | 3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 195 Orang/bulan | 195 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.27.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD yang mendapatkan Layanan Administrasi | 195 Orang | 195 Orang | 3.27.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang dilaksanakan | 100 Persen | 100 Persen | 3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan | 9 Jenis | 9 Jenis | 3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 15 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Sebelum | Sesudah | Keluaran Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4500 Laporan | 4900 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.08.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 10 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan | 11 Jenis | 11 Jenis | 3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 14 Unit | 14 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | | | | | 3.27.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | **3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar | 53,97 Ton/Ha | 53,97 Ton/Ha | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka peningkatan Produksi Pertanian | 6 Jenis | 6 Jenis | 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Sumber Daya Genetik (SDG) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian | 1 VUB | 1 VUB | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak yang ditingkatkan mutunya | 5 Jenis | 5 Jenis | 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Obat Hewan ditingkat Pengecer | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak yang diawasi persediaannya | 5 Jenis | 5 Jenis | 3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar | 2000 Ekor | 2000 Ekor | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan | 5 Jenis | 5 Jenis | 3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 1144 Ekor | 1144 Ekor | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 5 Ton | 5 Ton | Kab. Maros | |
| | **3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar | 100 Persen / 100 Persen | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Jenis Prasarana Pertanian yang dikembangkan dan mendukung peningkatan produksi | 3 Jenis | 3 Jenis | 3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan | 16 Dokumen | 16 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan mendukung Peningkatan Produksi | 3 Jenis | 3 Jenis | 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara | 24 Unit | 24 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 14 Unit | 14 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 7 Unit | 7 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.02.05 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage | Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 6 Unit | 6 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 7 Unit | 7 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | 1 Laporan | | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak | 80 Persen | 80 Persen | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Wilayah yang terkena Penyakit Wabah Penyakit Hewan Menular dan dapat dikendalikan | 14 Kecamatan | 14 Kecamatan | 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Lalu Lintas Hewan yang diawasi | 14 Lokasi | 14 Lokasi | 3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang diberikan kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku | 3500 Layanan | 3500 Layanan | 3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Peraturan dan Persyaratan Tekhnis yang dikeluarkan dalam rangka penerapan kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan | 2 Laporan | 2 Laporan | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | 3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | Jumlah Layanan Kesejahteraan Hewan | 25 Layanan | 25 Layanan | 3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | 3 Laporan | 3 Laporan | Kab. Maros | |
| | **3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen | 100 Persen 100 Persen | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan | 204 Ha | 204 Ha | 3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 6 Ha | 6 Ha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 100 Ha | 100 Ha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 100 Ha | 100 Ha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.27.05.2.01.04 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | 1 laporan | 1 laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB | 0,70 Persen 0,70 Persen | 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | 10 Laporan | 10 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit | Jumlah usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah | 6 Izin | 6 Izin | 3.27.06.2.02.01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang memiliki Izin | | Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | |
| | | | | | | | 3.27.06.2.02.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi 1 Laporan 1 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.27.06.2.02.05 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi 1 Laporan 1 Laporan | | Kab. Maros | |
| | **3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Pembinaan 8,38 Persen 8,38 Persen | | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pembinaan 253 Kelompok Tani 253 Kelompok Tani | | 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 14 Unit 14 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1229 Lembaga 1229 Lembaga | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 24 Unit 24 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk 4 Unit 4 Unit | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 6 Unit 6 Unit | | Kab. Maros | |
| | **3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | |
| | **3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | Persentase Permohonan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang singkat, Murah, dan Mudah 95 Persen 95 Persen | | 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Jumlah penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 50 Izin 50 Izin | | 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50 Dokumen 50 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan 30 TDP 30 TDP | | 3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 50 Dokumen 50 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran | Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk 20 STPW 20 STPW | | 3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam 35 Dokumen 35 Dokumen | | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | | Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | | | |
| | | | | | | | 3.30.02.2.03.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | 35 Dokumen / 35 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri | Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri | 20 STPW / 20 STPW | 3.30.02.2.04.01 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | 20 Dokumen / 20 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.30.02.2.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | 20 Dokumen / 20 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat yang diterbitkan | 100 Izin / 100 Izin | 3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 100 Dokumen / 100 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota<br>Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat yang diterbitkan | 50 Gudang / 50 Gudang<br>100 Izin / 100 Izin | 3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | 1 Laporan / 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.30.02.2.06.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | | | | |
| | | | | | | | | | 3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) yang dikeluarkan | 100 Persen | 100 Persen | 3.30.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 50 Dokumen | 50 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat | 95 Persen | 95 Persen | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik | 25 Unit | 25 Unit | 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 25 Unit | 25 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 25 Unit | 25 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang memiliki kapasitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan berlaku | 125 Orang | 125 Orang | 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran | 95 Persen | 95 Persen | 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia | 18 Jenis | 18 Jenis | 3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 243 Laporan | 243 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan | 243 Laporan | 243 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | |
| | | | | | | | | | 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 243 Laporan | 243 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Fungsi Pengawasan Stok dan Operasi Pasar | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 243 Laporan | 243 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan | 0,99 Persen | 0,99 Persen | 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi | Jumlah jenis produk ekspor unggulan yang dipromosikan melalui pameran daganga dan misi dagang | 10 Jenis | 10 Jenis | 3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | 10 Pelaku Usaha | 10 Pelaku Usaha | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan eksportir yang mengikuti pameran produk ekspor | 50 Perusahaan Eksportir 50 Perusahaan Eksportir | | | | | |
| | | | | | | | 3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | 10 Produk 10 Produk | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina | 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha | Kab. Maros | |
| | **3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen | 85 Persen 85 Persen | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah pedagang/ pemilik UTTP wajib tera dan alat UTTP yang telah melaksanakan metrologi legal<br>Jumlah unit usaha perdagangan yang memiliki cap tanda tera | 1500 Pedagang 1500 Pedagang<br>570 Unit 570 Unit | 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 943 Unit 943 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 88 Orang 88 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | 1 Unit 1 Unit | Kab. Maros | |
| | **3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | Persentase Produk Dalam Negeri Yang Dipasarkan Di Pasar Rakyat Dan Ritel Modern | 83 Persen 83 Persen | 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah perusahaan dalam negeri yang melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk | 100 Perusahaan 100 Perusahaan | 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 100 UMKM 100 UMKM | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 100 UMKM 100 UMKM | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Penyedia Jasa Akomodasi | | | | |
| | | | | | | | | | 3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.30.07.2.01.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | **3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri | 95 Persen | 95 Persen | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Luas areal pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan RTRW | 200 Ha | 200 Ha | 3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 7 Dokumen | 7 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | Persentase Pengendalian Usaha Industri | 100 Persen | 100 Persen | 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) | Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional | 85 Persen | 85 Persen | 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | Jumlah jenis informasi yang tersedia dan termanfaatkan untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI | 1 Jenis | 1 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase Kesesuaian Kawasan Transmigrasi dengan RTRW | 65 Persen | 65 Persen | 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Jumlah lokasi calon penempatan transmigrasi yang dijajaki | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 3.32.02.2.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.32.02.2.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi | 1 Kawasan Transmigrasi | 1 Kawasan Transmigrasi | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.32.02.2.01.03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 50 Hektar | 50 Hektar | Kab. Maros | |
| | **3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase transmigran swakarsa | 66.67 Persen | 66.67 Persen | 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta transmigran yang ditempatkan | 20 KK | 20 KK | 3.32.03.2.01.02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan | 35 Kepala Keluarga | 35 Kepala Keluarga | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | 3.32.03.2.01.06 Pelatihan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | 25 Orang | 25 Orang | Kab. Maros | |
| | **3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase Pengembangan kawasan transmigrasi 65 Persen 65 Persen | | 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | Jumlah dokumen penguatan infrastruktur sosial, ekonomi 1 Dokumen 1 Dokumen | | 3.32.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 1 Satuan Permukiman | 1 Satuan Permukiman | Kab. Maros | |
| | **4.01 SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | |
| | **4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen | | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah 19 Dokumen 19 Dokumen | | 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan 71 Dokumen 71 Dokumen | | 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 192 Orang/bulan | 192 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 196 PNS | 196 PNS | 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 340 Paket | 340 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 11 Jenis | 11 Jenis | 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 11 Jenis | 11 Jenis | 4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 24 Unit | 24 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 25 Unit | 25 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berada Dalam Kondisi Baik | 11 Jenis | 11 Jenis | 4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 50 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | 8 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | 2 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi | 3 Layanan | 3 Layanan | 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 7 Dokumen | 7 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 4 Dokumen / 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Rasio Jumlah Berita Positif di Media Massa | 65 Media / 65 Media | 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 4 Laporan / 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 3 Laporan / 3 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 Laporan / 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | **4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Presentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan | 100 Persen / 100 Persen | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3 Laporan / 3 Laporan | 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 46 Dokumen / 46 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 10 Dokumen / 10 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 4 Dokumen / 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Kegiatan Hari-Hari Keagamaan yang dilaksanakan | 8 Kegiatan / 8 Kegiatan | 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 4 Dokumen / 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 6 Dokumen / 6 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | | | Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | |
| | | | | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Berlaku | 1600 Dokumen / 1600 Dokumen | 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 1600 Dokumen / 1600 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 10 Kasus / 10 Kasus | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 1600 Dokumen / 1600 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan | 100 Persen / 100 Persen | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Angka Pertumbuhan Ekonomi | 4.5 Persen / 4.5 Persen | 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 5 Dokumen / 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 11 Laporan / 11 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 2 Dokumen / 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 18 Dokumen / 18 Dokumen | 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 2 Laporan / 2 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 12 Laporan / 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 700 Paket / 700 Paket | 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 700 Dokumen / 700 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 3 Dokumen / 3 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 5 Orang | 5 Orang | Kab. Maros | |
| | **4.02 SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan perangkat Daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 6 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 720 Orang/bulan | 720 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 14 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah | 29 Dokumen | 29 Dokumen | 4.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian | 57 Orang | 57 Orang | 4.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 12 Unit | 12 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 70 Paket | 70 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 30 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang | 30 Orang | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | | | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | jumlah jenis layanan Administrasi umum PD 11 Jenis 11 Jenis yang dilaksanakan | | | 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3000 Laporan | 3000 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Pelayanan Kebutuhan 11 Jenis 11 Jenis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yg berbeda dalam kondisi baik | 11 Jenis | 11 Jenis | 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | 7 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | jumlah pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | 12 Layanan 12 Layanan | 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 35 Orang/Bulan | 35 Orang/Bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 35 Orang | 35 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | Jumlah layanan administrasi DPRD | 12 Layanan 12 Layanan | 4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 15 Laporan | 15 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | **4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan | 95 Persen 95 Persen | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang disahkan | 12 Dokumen 12 Dokumen | 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase pelayanan pembahasan kebijakan anggaran DPRD | 100 Persen 100 Persen | 4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah layanan pengawasan penyelenggaran pemerintahan yang dilaksanakan DPRD<br>persentase pelayanan pengawasan penyelenggaraan pemerintah | 8 Layanan<br>100 Persen | 8 Layanan<br>100 Persen | 4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase pelayanan pembahasan kebijakan anggaran DPRD | 35 Orang<br>100 Persen | 35 Orang<br>100 Persen | 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 35 Dokumen | 35 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 3 Orang | 3 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 Orang | 7 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah usulan dan aspirasi maysrakat yang difasilutasi<br>Persentase penyerapan aspirasi masyarakat | 5 Usulan<br>100 Persen | 5 Usulan<br>100 Persen | 4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DPRD<br>Persentase pelayanan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD | 0 Kasus<br>100 Persen | 0 Kasus<br>100 Persen | 4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah | Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi<br>Persentase pelayanan pembahasan kerja sama Daerah | 3 Dokumen<br>100 Persen | 3 Dokumen<br>100 Persen | 4.02.02.2.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD<br>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 12 Dokumen<br>100 Persen | 12 Dokumen<br>100 Persen | 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | 4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 4.02.02.2.08.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **5.01 PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 57 Dokumen | 57 Dokumen | 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 56 Orang/bulan | 56 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 5.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 3 Unit | 3 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 45 Paket | 45 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | 7 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 14 Orang | 14 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | 15 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 8 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 9 Paket | 9 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 13 Unit | 13 Unit | 5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 35 Unit | 35 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 73 Unit | 73 Unit | 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48 Laporan | 48 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 73 Unit | 73 Unit | 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 34 Unit | 34 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 23 Unit | 23 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | **5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI** | ersentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 Persen | 100 Persen | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Tersusun | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | PEMBANGUNAN DAERAH | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 10000 Usulan | 10000 Usulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Jenis Data dan Informasi yang Dianalisis Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah | 406 Jenis | 406 Jenis | 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 4 Masukan | 4 Masukan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 90 Orang | 90 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1 Buku | 1 Buku | Kab. Maros | |
| | | | | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang Dikeluarkan | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | Jumlah Kerja Sama Daerah yang dikoordinasikan Pelaksanaannya | 1 Kerja sama | 1 Kerja sama | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah | Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibidang Pembangunan Daerah | 1 Sistem | 1 Sistem | 5.01.02.2.04.01 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | | di Bidang Pembangunan Daerah | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | |
| No | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | | | | 5.01.02.2.04.02 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.01.02.2.04.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | 100 Persen 100 Persen | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia | 12 Dokumen 12 Dokumen | 5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 8 Laporan 8 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 4 Laporan 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 8 Perangkat Daerah 8 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 7 Laporan 7 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Dan Bidang SDA | 22 Dokumen 22 Dokumen | 5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan | 7 Perangkat Daerah 7 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Renstra/Renja Bidang Perekonomian | | | | |
| | | | | | | | | 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 11 Laporan | 11 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 2 Laporan | 2 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 2 Perangkat Daerah | 2 Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 3 Perangkat Daerah | 3 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | 14 Perangkat Daerah | 14 Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | 5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan | 4 Perangkat Daerah | 4 Perangkat Daerah | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | | | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | | | |
| | | | | | | | 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 5 Laporan / 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | **5.02 KEUANGAN** | | | | | | | | | | |
| | **5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan: 100 Persen / 100 Persen<br>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: 100 Persen / 100 Persen | | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah: 19 Dokumen / 19 Dokumen<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BKAD: 19 Dokumen / 19 Dokumen | | 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen / 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-BKAD | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen / 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen / 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | 5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-BKAD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-BKAD | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen / 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen / 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | 5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen / 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKAD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKAD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Keuangan BKAD | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Dokumen | 14 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 71 Dokumen | 71 Dokumen | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 59 Orang/bulan | 59 Orang/bulan | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BKAD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BKAD<br>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen<br>0 Dokumen | 12 Dokumen<br>0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen<br>1 Laporan | 1 Dokumen<br>1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Dokumen<br>18 Laporan | 18 Dokumen<br>18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi BMD<br>Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 62 Dokumen<br>29 Dokumen | 62 Dokumen<br>29 Dokumen | 5.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Penilaian Barang Milik Daerah BKAD | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada BKAD | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKAD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BKAD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan BarangMilik Daerah BKAD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pendapatan Retribusi Daerah | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 5.02.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 9 Dokumen | 9 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian<br>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Pada BKAD | 59 orang<br>59 Dokumen | 59 orang<br>59 Dokumen | 5.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket<br>80 Unit | 2 Paket<br>80 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | 2 Orang | 2 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindah tugaskan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 5 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang | 3 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | umlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang | 3 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Pada BKAD | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang Dilaksanakan | 11 Jenis | 11 Jenis | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Tahun | 1 Tahun | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Tahun | 1 Tahun | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Tahun | 1 Tahun | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Tahun | 1 Tahun | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket<br>1 Paket<br>1 Tahun | 0 Paket<br>1 Paket<br>1 Tahun | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan<br>12 bulan | 1 Laporan<br>12 bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKAD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan<br>0 Laporan<br>12 Bulan | 2 Laporan<br>0 Laporan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota<br>Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada BKAD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BKAD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah PD penunjang Kebutuhan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah<br>Jumlah Dok. Pengadaan BMD | 11 Jenis<br>8 Jenis | 11 Jenis<br>8 Jenis | 5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit<br>1 Tahun<br>30 Unit | 0 Unit<br>1 Tahun<br>30 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Tahun | 1 Tahun | | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Tahun | 1 Tahun | | |
| | | | | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dok Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah | 11 Jenis | 11 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 206 Unit | 206 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 30 Unit | 30 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Tahun | 1 Tahun | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 31 Unit | 31 Unit | | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 2 Unit | 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | | | | | | | | 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 0 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Tahun | 1 Tahun | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 3 Unit | | |
| | **5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target | 80 Persen | 80 Persen | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 171 Dokumen | 171 Dokumen | 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 40 Dokumen | 40 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 40 Dokumen | 40 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 40 Dokumen | 40 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 40 Dokumen | 40 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen<br>0 Dokumen | 2 Dokumen<br>0 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 40 Orang | 40 Orang | Kab. Maros | | |
| | | | | | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 33 Dokumen | 33 Dokumen | 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 9 Dokumen | 9 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 9 Dokumen | 9 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 9 Laporan | 9 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 9 Dokumen | 9 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 57 Orang | 57 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 90 Dokumen | 90 Dokumen | 5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PelaksanaanAkuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD danLaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 8 Dokumen | 8 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 40 Orang | 40 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 15 Lembaga | 15 Lembaga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.03.13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 600 Dokumen | 600 Dokumen | 5.02.02.2.04.01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.04.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.04.03 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.04.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.04.05 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.04.07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 600 Dokumen | 600 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 5.02.02.2.05.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 40 Orang | 40 Orang | Kab. Maros | |
| | **5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Persentase Perangkat Daerah Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | 82 Dokumen | 82 Dokumen | 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah BKAD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah BKAD | 25 Laporan | 25 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 15 Dokumen | 15 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 40 Orang | 40 Orang | Kab. Maros | |
| | **5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Realisasi Pendapatan | 100 Persen | 100 Persen | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | jumlah dokumen kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah | 54 Dokumen | 54 Dokumen | 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 9 Dokumen | 9 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 0 Obyek Pajak | 0 Obyek Pajak | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 0 Layanan | 0 Layanan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 9 Dokumen | 9 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 9 Jenis | 9 Jenis | | |
| | | | | | | | | | 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 10 Dokumen | 10 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **5.03 KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. 100 Persen 100 Persen | | | 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah 19 Dokumen 19 Dokumen | | | 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan 71 Dokumen 71 Dokumen | | | 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.03.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 126 Orang | 126 Orang | 5.03.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 60 Paket | 60 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 66 Orang | 66 Orang | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | 60 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 11 Jenis | 11 Jenis | 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 66 Unit | 66 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | 30 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 4 Jenis | 4 Jenis | 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 60 Unit | 60 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 10 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 5.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH<br>Indikator Program: Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian | Hasil Program | Target Capaian: Sebelum / Sesudah | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Indikator Kegiatan: Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian | Keluaran Kegiatan | Target Capaian: Sebelum / Sesudah | 5.03.02.2.01.01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian: Sebelum / Sesudah | |
| | | 100 Persen | 100 Persen | | 6193 Orang | 6193 Orang | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | 1 Lembaga | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.09 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Mutasi dan Promosi | 1668 Dokumen | 1668 Dokumen | 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 30 Dokumen | 30 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1488 Dokumen | 1488 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 150 Dokumen | 150 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | Sub Kegiatan | |
| | | Hasil Program | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang meningkat komptensinya | 625 Orang | 625 Orang | 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 7 Dokumen | 7 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.03.03 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina | 625 Orang | 625 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | 100 Orang | 100 Orang | Semua Kab/Kota | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | 2 Laporan | 2 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang mendapatkan penilaian dan evaluasi kinerja | 544 Orang | 544 Orang | 5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 154 Orang | 154 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 300 Orang | 300 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 90 Orang | 90 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota | |
| | **5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100 Persen | 100 Persen | 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi | Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas | 334 Orang | 334 Orang | 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan | 4 Laporan | 4 Laporan | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Manajerial dan Fungsional | | | | 5.04.02.2.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Semua Kab/Kota | |
| | **5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | |
| | **5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | 100 Persen | 100 Persen | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 8 Laporan | 8 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.05.02.2.01.05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.05.02.2.02.04 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | 8 Dokumen | 8 Dokumen | | |
| | | | | | 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.05.02.2.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 5.05.02.2.03.13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | 8 Dokumen | 8 Dokumen | Kab. Maros | |
| | **6.01 INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | **6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 0Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan | 4 Jenis | 4 Jenis | 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 90 Orang/bulan | 90 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Layanan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan | 11 Layanan | 11 Layanan | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 1 laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran | 14 Dokumen | 14 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen | 6.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi | 3 laporan | 3 laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | 6.01.01.2.05 Administrasi | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen | 6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Yang Dibeli | 121 pasang | 121 pasang | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | Program | | | | Kepegawaian Perangkat Daerah | Kegiatan | | | Kelengkapannya | Sub Kegiatan | | | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | jumlah laporan administrasi kepegawaian | 4 laporan | 4 laporan | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | 0 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 86 rang | 86 rang | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pengawai yang mengikuti Sosialisasi Perundang undangan | 600 rang | 600 rang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen | 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5 Jenis | 5 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 18 Jenis | 18 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga | 7 Jenis | 7 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah jenis alat tulis kantor | 35 Jenis | 35 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Jenis | 4 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan Material | 10 Jenis | 10 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Jenis | 2 Jenis | | |
| | | | | | | | | | 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Diikuti | 270 Kali | 270 Kali | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 6.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | jumlah aplikasi yang dikelola | 1 Jumlah | 1 Jumlah | Kab. Maros | |
| | | | | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen | 6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Jenis Mebeleur yang di beli | 4 Jenis | 4 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainya<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Jenis<br>0 Unit | 10 Jenis<br>0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 6.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Jenis Asset tetap Lainya | 1 Jenis | 1 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 6.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis sarana dan prasarana gedung kantor | 2 Jenis | 2 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen | 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>jumlah materai | 0 Laporan<br>450 Materai | 0 Laporan<br>450 Materai | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Layanan Komunikasi, Sumberdaya Air, Dan Listrik | 1 Jenis | 1 Jenis | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang diservice<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis<br>0 Laporan | 4 Jenis<br>0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>jumlah penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor | 0 Laporan<br>13 rang | 0 Laporan<br>13 rang | Kab. Maros | |
| | | | | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen | 6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara | 0 Unit<br>2 Jenis | 0 Unit<br>2 Jenis | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | **6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Persentase Pelanggaran Pegawai 015 Persen 015 Persen<br>Persentase Pelanggaran Pegawai 0,15 Persen 0,15 Persen | | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Pelanggaran Pegawai 15 persen 15 persen | | 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan 118 laporan 118 laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 0 Laporan 0 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | jumlah laporan 150 laporan 150 laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 0 Laporan 0 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan 2 laporan 2 laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 0 Laporan 0 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan 2 laporan 2 laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 0 Laporan 0 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa | Jumlah Laporan 80 laporan 80 laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 0 Laporan 0 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 0 Kesepakatan 0 Kesepakatan<br>Jumlah Laporan 4 laporan 4 laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 0 Dokumen 0 Dokumen<br>Jumlah Laporan 4 laporan 4 laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Nilai SPIP 3 Level 3 Level | | 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 10 Laporan 10 Laporan | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 82 Laporan 82 Laporan | | Kab. Maros | |
| | **6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Nilai Kapabilitas APIP 66 Persen 66 Persen | | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Nilai Kapabilitas APIP 66 persen 66 persen | | 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Perbup/Pedoman 3 Perbup 3 Perbup<br>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 0 Rekomendasi 0 Rekomendasi | | Kab. Maros | |
| | | | | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan | Nilai Kapabilitas APIP 66 persen 66 persen | | 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan | Jumlah Laporan 3 laporan 3 laporan | | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | |
| | | | | Asistensi | | | Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 0 perangkat daerah | 0 perangkat daerah | |
| | | | | | | | | Nilai Kapabilitas APIP | Persentase | 3 laporan | 3 laporan |
| | | | | | | | | tindak lanjut temuan | | | |
| | | | | | | | 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan | 4 laporan | 4 laporan | Kab. Maros |
| | | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 0 perangkat daerah | 0 perangkat daerah | |
| | | | | | | | 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | Kab. Maros |
| | | | | | | | | jumlah Laporan | 3 laporan | 3 laporan | |
| | | | | | | | 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 45 perangkat daerah | 45 perangkat daerah | Kab. Maros |
| | **7.01 KECAMATAN** | | | | | | | | | | |
| | **7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 dokumen 3 dokumen | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen 19 Dokumen | 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros |
| | | Persentase Layanan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen 100 Persen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 dokumen 19 dokumen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | | Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daera | 100 Persen 100 Persen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen 19 Dokumen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |
| | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen 100 Persen | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19 Dokumen 19 Dokumen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | |
| | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen 100 persen | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 dokumen 3 dokumen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19 Dokumen | 19 Dokumen | |
| | | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen 100 Persen | | umlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah | 19 Dokumen 19 Dokumen | | Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |
| | | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen 100 Persen | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA- PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen SAKIP - PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen SAKIP- PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan | 0 Laporan | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 Laporan | 14 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 71 Dokumen | 71 Dokumen | 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Dokumen | 14 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 26 dokumen | 26 dokumen | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 26 Dokumen | 26 Dokumen | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 57 Dokumen | 57 Dokumen | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 71 Dokumen | 71 Dokumen | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 orang | 30 orang | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 46 Orang/bulan | 46 Orang/bulan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 60 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Tunjangan ASN | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 66 Orang/bulan | 66 Orang/bulan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80 Orang/bulan | 80 Orang/bulan | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Pemeriksaan | Pemeriksaan | | | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD | 18 Dokumen | 18 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan | 3 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | |
| | | | | | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 14 Dokumen | 14 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 23 Dokumen | 23 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29 Dokumen | 29 Dokumen | | | | | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 29 Dokumen | 29 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 2 jenis | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan BMD - PD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan BMD - PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 30 Orang | 30 Orang | 7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 48 Orang | 48 Orang | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 5 Unit | 5 Unit | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 66 Orang | 66 Orang | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 12 Unit | 12 Unit | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 30 Orang | 30 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 31 orang | 31 orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 42 Orang | 42 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 60 orang | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 60 Orang | 60 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 80 Orang | 80 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 130 Orang | 130 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian | 57 Orang | 57 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 dokumen | 12 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas PD beserta atribut kelengkapannya | 300 Steel | 300 Steel | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 30 Paket | 30 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 31 Paket | 31 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 33 Paket | 33 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 37 Paket | 37 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 59 Paket | 59 Paket | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 60 Paket | 60 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 66 Paket | 66 Paket | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 80 Paket | 80 Paket | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 37 Dokumen | 37 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 2 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 30 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 31 Orang | 31 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 40 Orang | 40 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang | 50 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang | 60 Orang | | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang | 30 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 50 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | 60 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 66 Orang | 66 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 70 Orang | 70 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | 100 Orang | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 20 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 50 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | 60 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 67 Orang | 67 Orang | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 70 Orang | 70 Orang | | |
| | | | | | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 6 Jenis | 6 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 6 jenis | 6 jenis | | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4 Jenis | 4 Jenis | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 6 Jenis | 6 Jenis | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 7 Jenis | 7 Jenis | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 7 Paket | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 10 Jenis | 10 Jenis | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 11 Dokumen | 11 Dokumen | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 11 jenis / 11 jenis | | | | | |
| | | | | | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan | 11 Jenis / 11 Jenis | | | | | |
| | | | | | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan | 6 Jenis / 6 Jenis | | | | | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 16 item / 16 item | | | | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | JJumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 12 Jenis / 12 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Laporan / 25 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket / 1 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket / 5 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket / 10 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 18 Paket / 18 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Paket / 25 Paket | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11 Jenis / 11 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17 Jenis / 17 Jenis | | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | 8 Jenis / 8 Jenis | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket / 0 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket / 1 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket / 5 Paket | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 18 Paket | 18 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 25 Paket | 25 Paket | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 27 Jenis | 27 Jenis | | |
| | | | | | | | | JumlahJenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Jenis | 3 Jenis | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 16 item | 16 item | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 30 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 52 Paket | 52 Paket | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan | 4 Jenis | 4 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Jenis | 2 Jenis | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 25 Paket | 25 Paket | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Jenis | 2 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 7 Paket | 7 Paket | | |
| | | | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 20 Paket | 20 Paket | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 Laporan | 0 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 120 Laporan | 120 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 150 Laporan | 150 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 750 Laporan | 750 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6800 Laporan | 6800 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah tamu yang berkunjung dan terfasilitasi | 2875 Orang | 2875 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi | 750 Orang | 750 Orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi | 2750 Orang | 2750 Orang | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | 0 Laporan | 0 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 225 Laporan | 225 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250 Laporan | 250 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 252 Laporan | 252 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 255 Laporan | 255 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 350 Laporan | 350 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi internal PD | 150 Kali | 150 Kali | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD | 255 Kali | 255 Kali | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal Perangkat Daerah | 366 Orang/Kali | 366 Orang/Kali | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 9 Dokumen | 9 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | |
| | | | | | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 11 Jenis | 11 Jenis | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 2 jenis | 2 jenis | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Jenis | 2 Jenis | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 4 jenis | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 7 Jenis | 7 Jenis | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 3 Jenis | 3 Jenis | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel | 20 Unit | 20 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit | 6 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 30 Unit | 30 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | 50 Unit | | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan/mesin kebutuhan kantor | 10 Unit | 10 Unit | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 6 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 7 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 15 Unit | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit | | |
| | | | | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Pengantar surat (Caraka) | 1 Orang | 1 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 jenis | 2 jenis | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Jenis | 2 Jenis | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 250 Laporan | 250 Laporan | | |
| | | | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1200 Laporan | 1200 Laporan | | |
| | | | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 jenis | 4 jenis | | Jumlah Surat Yang Terdistribusi | 700 Surat | 700 Surat | | |
| | | | | | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Jenis | 4 Jenis | | Jumlah Surat Yang Terdistribusi | 1200 surat | 1200 surat | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 laporan | 4 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 4 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa petugas kebersihan kantor | 4 Orang | 4 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 Jenis | 10 Jenis | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jenis jasa layanan umum kantor | 4 Jenis | 4 Jenis | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum Kantor | 3 Jenis | 3 Jenis | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang | 0 Laporan | 0 Laporan | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Disediakan | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 4 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 7 Laporan | 7 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 96 Laporan | 96 Laporan | | |
| | | | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Baik | 2 Jenis | 2 Jenis | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 2 Unit | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berada Dalam Kondisi Baik | 2 Jenis | 2 Jenis | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 3 Unit | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 2 jenis | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 2 jenis | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 2 Jenis | 2 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 4 Jenis | 4 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan | 5 Jenis | 5 Jenis | | | | | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 11 jenis 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik | 11 Jenis 11 Jenis | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 unit 6 unit | | | | | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 6 Unit | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | 5 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 0 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 2 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 6 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 21 Unit | 21 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 30 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 35 Unit | 35 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Peralatan/ Mesin Kebutuhan Kantor dalam Kondisi Baik | 6 Unit | 6 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik | 20 Unit | 20 Unit | | |
| | | | | | | | 7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 2 Unit | Kab. | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Tetap Lainnya | | | | Maros | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik<br>Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik<br>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit 2 Unit<br>1 Unit 1 Unit<br>1 Unit 1 Unit<br>2 Unit 2 Unit | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit 1 Unit<br>2 Unit 2 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit 3 Unit | Kab. Maros | |
| | **7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 0Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di KecamatanPersentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional<br>Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PuPersentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan<br>Persentasen Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Kecamatan | 100 persen 100 persen<br>2 dokumen 2 dokumen<br>100 Persen 100 Persen<br>100 persen 100 persen<br>100 Persen 100 Persen<br>100 PERSEN 100 PERSEN<br>100 Persen 100 Persen<br>100 Persen 100 Persen<br>100 persen 100 persen | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahanyang dilaksanakan<br>Jumlah Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan<br>Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan<br>Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 dokumen 2 dokumen<br>12 Dokumen 12 Dokumen<br>12 Urusan 12 Urusan<br>1 kegiatan 1 kegiatan<br>1 kegiatan 1 kegiatan<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>4 Urusan 4 Urusan | 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan 1 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah masyarakat dalam kegiatan peningkatan efektifitas keg pemerintahan di tingkat kecamatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | |
| | | Persentase Pembinaan terhadap aparatur dan Masyarakat tentang Idologi Negara | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 5 pokmas/pokja | 5 pokmas/pokja | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 1120 Orang | 1120 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | 60 Orang | 60 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan | 3 urusan | 3 urusan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 1 Urusan | 1 Urusan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 2 urusan | 2 urusan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 3 urusan | 3 urusan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 4 urusan | 4 urusan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang | 4 Urusan | 4 Urusan | | | | | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | | dilaksanakan pada tingkat kecamatan | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan | 1 Laporan 1 Laporan | | | | | |
| | | | | | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan pada Tingkat kecamatan | 4 urusan 4 urusan | | | | | |
| | | | | | Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Pada Tingkat Kecamatan | 4 Urusan 4 Urusan | | | | | |
| | | | | | Jumlah Urusan Yang Dilaksanakan Pada Tingkat Kecamatan | 4 Urusan 4 Urusan | | | | | |
| | | | | | | | 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 85 Dokumen 85 Dokumen | | |
| | | | | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayan Kepada Masyarakat di Kecamatan | 1 Dokumen 1 Dokumen | 7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan | 12 Layanan 12 Layanan | | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 2 Dokumen 2 Dokumen | | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan | 1 Kegiatan 1 Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkanumlah urusan peemrintahan yang dilimpahkan kepada camat | 1 kegiatan 1 kegiatan | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan | 3 laporan 3 laporan | | | | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 4 Laporan | 4 Laporan | | | | | | |
| | | | | | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 4 layanan | 4 layanan | | | | | | |
| | | | | | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 4 Layanan | 4 Layanan | | | | | | |
| | | | | | Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan | 5 Layanan | 5 Layanan | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan | 4 Layanan | 4 Layanan | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan | 4 Layanan | 4 Layanan | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 1 Urusan | 1 Urusan | | | | | | |
| | | | | | | | | 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 2 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 5 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 6 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 84 Laporan | 84 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0 Laporan | 0 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 2 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 3 Laporan | 3 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 5 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 12 Laporan | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 24 Laporan | 24 Laporan | | |
| | | | | 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | JUmlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2 laporan | 2 laporan | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | |
| | | | | | Jumlah urusan peemrintahan yang dilimpahkan kepada camat | 3 urusan | 3 urusan | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | |
| | | | | | Jumlah urusan peemrintahan yang dilimpahkan kepada camat | 3 Urusan | 3 Urusan | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | Jumlah Urusan Pemerintahan yan didelegasikan kepada Camat dan terlaksana sesuai ketenrtuan yang berlaku | 3 Urusan | 3 Urusan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 3 laporan | 3 laporan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 3 urusan | 3 urusan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 3 Urusan | 3 Urusan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | 2 Urusan | 2 Urusan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah urusan pemrintahan yang dilimpahkan kepada camat | 3 Urusan | 3 Urusan | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 4 Laporan | 4 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 11 Laporan | 11 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 13 Laporan | 13 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2 Laporan | 2 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 Laporan | 4 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 25000000 Laporan | 25000000 Laporan | | |
| | **7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 1 laporan | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | 100 persen | 100 persen | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisifasi dalam Forun Musyawah Perencanaan di Desa Pembangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | |
| | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 1.085 orang | 1.085 orang | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kecamatan Dalam kegiatan Pembangunan | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 420 Orang | 420 Orang | | Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 400 Orang | 400 Orang | | |
| | | Persentase Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 500 Orang | 500 Orang | | | | | | |
| | | Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 600 Orang | 600 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 645 Orang | 645 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 800 Orang | 800 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 900 orang | 900 orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 1000 Orang | 1000 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 1050 Orang | 1050 Orang | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat pada kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan | 600 Orang | 600 Orang | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi | 2 kegiatan | 2 kegiatan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | |
| | | | | | | | 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 Laporan | 7 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 2 Laporan | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 3 Laporan | 3 Laporan | | |
| | | | | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyaratan Desa | 1 Dokumen / 1 Dokumen | 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | JJumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Kab. Maros | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3 Kegiatan / 3 Kegiatan | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 5 pokmas/pokja / 5 pokmas/pokja | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga | 1 Lembaga | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan | 900 orang / 900 orang | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 Pokja/Pokmas | 5 Pokja/Pokmas | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | 500 Orang / 500 Orang | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 7 lembaga | 7 lembaga | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | 60 Orang / 60 Orang | | | | | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | 70 Orang / 70 Orang | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 8 Lembaga / 8 Lembaga | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | 75 Orang / 75 Orang | | Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 400 Orang / 400 Orang | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | 80 Orang / 80 Orang | | Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 500 Orang / 500 Orang | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan | 500 Orang / 500 Orang | | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan | 300 Orang / 300 Orang | | |
| | | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan | 80 Orang / 80 Orang | | | | | |
| | | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakanPemberdayaan Desa yang dilaksanakan | 80 Orang / 80 Orang | | | | | |
| | | | | | | | 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun | 4 Paket / 4 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 4 unit / 4 unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 20 Unit / 20 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit / 1 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 3 Unit / 3 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit / 4 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit / 5 Unit | | |
| | | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 7 Unit / 7 Unit | | |
| | | | | | | | 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan | 0 Pokmas / Ormas / 0 Pokmas / Ormas | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indikator Kinerja | | | Indikator Kinerja | | | Indikator Kinerja | | | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | | Sebelum | Sesudah | |
| | | | | | | | | Masyarakat di Kelurahan | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 4 Pokmas / Ormas | |
| | | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | |
| | | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Pokmas / Ormas | 6 Pokmas / Ormas | |
| | | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 7 Pokmas / Ormas | 7 Pokmas / Ormas | |
| | | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 10 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | |
| | | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 15 Pokmas / Ormas | 15 Pokmas / Ormas | |
| | | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 30 Pokmas / Ormas | 30 Pokmas / Ormas | |
| | | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 55 Pokmas / Ormas | 55 Pokmas / Ormas | |
| | | | | | | | 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 2 Laporan | 2 Laporan | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 4 Laporan | 4 Laporan | |
| | | | | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 dan pasca Coviddi Tingkat Desa dan Kelurahan | 2 dokumen | 2 dokumen | 7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Keluharan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.05.02 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.05.03 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang mengikut Pembentukn dan Penumbahan Karekter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingan penghayatan dan pengalama Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermanfaat, berbangsa, dan Bernegara | 3279 Orang | 3279 Orang | 7.01.03.2.06.01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 150 Keluarga | 150 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.06.02 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 150 Keluarga | 150 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 75 Keluarga | 75 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.06.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 75 Keluarga | 75 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 150 Keluarga | 150 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 150 Keluarga | 150 Keluarga | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.06.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 350 Keluarga | 350 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.06.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 150 Keluarga | 150 Keluarga | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.03.2.06.12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 3279 Keluarga | 3279 Keluarga | Kab. Maros | |
| | **7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional — 100 persen / 100 persen<br>Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional — 100 Persen / 100 Persen<br>Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan — 100 Persen / 100 Persen<br>Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan — 100 Persen / 100 Persen<br>Persentase penurunan kasus pelanggran K3 dan pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan — 100 Persen / 100 Persen<br>Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 Dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan — 100 Persen / 100 Persen<br>Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan — 100 Persen / 100 Persen<br>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan — 5 Laporan / 5 Laporan | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan — 1 Kegiatan / 1 Kegiatan<br>"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan" — 2 Laporan / 2 Laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan — 5 laporan / 5 laporan<br>Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum — 200 Orang / 200 Orang<br>Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum — 300 orang / 300 orang<br>Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum — 450 Orang / 450 Orang<br>Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum — 500 Orang / 500 Orang<br>Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum — 700 Orang / 700 Orang | 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan — 1 laporan / 1 laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan — 1 Laporan / 1 Laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan — 4 Laporan / 4 Laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan — 5 Laporan / 5 Laporan<br>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan — 7 Laporan / 7 Laporan<br>Jumlah masyarakat yang mengikuti keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi — 200 Orang / 200 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 400 Orang | 400 Orang | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan | | | | |
| | | | | | | | | | 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 196 Orang | 196 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Penurunan Kasus K3 dan Perda di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | 7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | "Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan" | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.01.04.7.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 500 orang | 500 orang | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 7 Laporan | 7 Laporan | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 500 Orang | 500 Orang | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 24 Laporan | 24 Laporan | | |
| | **7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 350 orang | 350 orang | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kgiatan yang terkait urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1200 Orang | 1200 Orang | Kab. Maros | |
| | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan, Waawasan dan Ketahanan Nasional | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 350 orang | 350 orang | | | | | | |
| | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 100 persen | 100 persen | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan | 800 Orang | 800 Orang | | | | | | |
| | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 100 persen | 100 persen | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian | 1.418 Orang | 1.418 Orang | | |
| | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan | 100 Persen | 100 Persen | | | | | | | | | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| | | Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 100 Persen / 100 Persen | | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | 2 urusan / 2 urusan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang / 200 Orang | | |
| | | | | | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | 2 Urusan / 2 Urusan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 400 Orang / 400 Orang | | |
| | | | | | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | 3 urusan / 3 urusan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 500 Orang / 500 Orang | | |
| | | | | | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | 3 Urusan / 3 Urusan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 800 Orang / 800 Orang | | |
| | | | | | Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | 4 Urusan / 4 Urusan | | | | | |
| | | | | | Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan | 3 Urusan / 3 Urusan | | | | | |
| | | | | | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku | 4 Urusan / 4 Urusan | | | | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1045 Orang | 1045 Orang | | |
| | | | | | | | | 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 0 Orang | 0 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 200 Orang | 200 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 288 Orang | 288 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 300 Orang | 300 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 400 Orang | 400 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 500 Orang | 500 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 620 Orang | 620 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 0 Orang | 0 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 300 Orang | 300 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 350 Orang | 350 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 400 Orang | 400 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 500 Orang | 500 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan | 566 Orang | 566 Orang | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 600 Orang | 600 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 700 Orang | 700 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 800 Orang | 800 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 13000 Orang | 13000 Orang | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 800 Orang | 800 Orang | | |
| | | | | | | | | 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di | JJumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | **Program** | | | | **Kegiatan** | | | | Kecamatan | **Sub Kegiatan** | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 150 Orang | 150 Orang | | |
| | **7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5 desa | 5 desa | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi peemrintah desa sesuai ketentuan yang berlaku | 4 desa | 4 desa | 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi peemrintah desa sesuai ketentuan yang berlaku | 4 Desa | 4 Desa | | | | | | |
| | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi peemrintah desa sesuai ketentuan yang berlaku | 7 Desa | 7 Desa | | | | | | |
| | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 100 persen | 100 persen | | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi peemrintah desa sesuai ketentuan yang berlaku | 8 Desa | 8 Desa | | | | | | |
| | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 100 Persen | 100 Persen | | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa sesuai ketentuan yang berlaku | 6 Desa | 6 Desa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa sesuai ketentuan yang berlaku | 8 Desa | 8 Desa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku | 6 Desa | 6 Desa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku | 7 Desa | 7 Desa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan | 6 Desa | 6 Desa | | | | | | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku | | | | | | | | |
| | | | | | | "Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa" | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 5 desa | 5 desa | | | | | | |
| | | | | | | umlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi peemrintah desa sesuai ketentuan yang berlaku | 1 Desa | 1 Desa | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang di Fasilitasi | 6 Desa/ Kelurahan | 6 Desa/ Kelurahan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka | 7 Dokumen | 7 Dokumen | | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 8 Dokumen | 8 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 5 Desa | 5 Desa | | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | **8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | |
| | **8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase<br>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen 100 Persen<br>100 Persen 100 Persen | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 3 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 9 Dokumen | 9 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | 15 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 8.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 44 Paket | 44 Paket | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 5 Dokumen | 5 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25 Laporan | 25 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 Laporan | 15 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | | | | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 2 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | | Sebelum / Sesudah | | |
| | | | | | | | 8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan / 12 Laporan | Kab. Maros | |
| | | | | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Pememeliharaan Barang Milik Daerah | 5 Unit / 5 Unit | 8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit / 2 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Maros | |
| | **8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan / 20 Persen / 20 Persen | | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan / 2 Dokumen / 2 Dokumen<br>Jumlah Laporan Hasil Kelompok Sasaran Masyarakat yang Mendapat Pembinaan dan Informasi tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan / 20 Dokumen / 20 Dokumen | | 8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 2 Dokumen / 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 2 Dokumen / 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1000 Orang / 1000 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100 Orang / 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran | 4 Laporan / 4 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum Sesudah | | |
| | | | | | | | Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | |
| | | | | | | | 8.01.02.2.01.06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 100 Keluarga 100 Keluarga | Kab. Maros | |
| | **8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik | 20 Persen 20 Persen | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan<br>Jumlah Laporan Hasil Kelompok Sasaran Masyarakat yang telah mendapatkan Pendidikan, Etika Budaya Politik dan Peningkatan Demokrasi<br>Jumlah Partai Politik yang diverifikasi untuk mendapatkan dana hibah | 2 Dokumen 2 Dokumen<br>10 Dokumen 10 Dokumen<br>10 parpol 10 parpol | 8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala | 2000 Orang 2000 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | | Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | 8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | **8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas | 15 Persen | 15 Persen | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan<br>Jumlah Laporan Ormas dan LSM yang telah Mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Organisasi | 1 Dokumen<br>23 Dokumen | 1 Dokumen<br>23 Dokumen | 8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, | 100 Orang | 100 Orang | Kab. Maros | |

| No | Program | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | |
| | | | | | | | | 8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 5 Laporan | 5 Laporan | Kab. Maros | |
| | **8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 20 Persen 20 Persen | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan<br>Jumlah Laporan Kegiatan Masyarakat yang mendapatkan Informasi dan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 10 Dokumen<br>5 Dokumen | 10 Dokumen<br>5 Dokumen | 8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1000 Orang | 1000 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 20 Orang | 20 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | 8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat | 4 Laporan | 4 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | |
| | | | | | | | | | Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | |
| | **8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Konflik | 20 Persen | 20 Persen | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan<br>Jumlah Laporan Kegiatan Masyarakat yang telah mendapatkan Pembinaan dalam Penanganan Konflik | 8 Dokumen<br>2 Dokumen | 8 Dokumen<br>2 Dokumen | 8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 200 Orang | 200 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 150 Orang | 150 Orang | Kab. Maros | |
| | | | | | | | | | 8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan | 10 Laporan | 10 Laporan | Kab. Maros | |

| No | Program | | | | Kegiatan | | | | Sub Kegiatan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program | Indikator Kinerja | | | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. | |
| | | Hasil Program | Target Capaian | | | Keluaran Kegiatan | Target Capaian | | | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian | | | | |
| | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | Sebelum | Sesudah | | | |
| | | | | | | | | | Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 12 Dokumen | Kab. Maros | | |

# BAB IV

# PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN

## 4.1. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan proyeksi perubahan anggaran pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, maka disusun perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, seperti pada table 4.1 berikut :

**TABEL 4.1**

**PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA T.A 2023**

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **420.066.320.485** | **447.356.289.980** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **420.066.320.485** | **447.356.289.980** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **420.066.320.485** | **447.356.289.980** | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **291.716.953.385** | **305.015.364.330** | |
| **1.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **21.650.000** | **23.750.000** | |
| 1.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.900.000 | 3.600.000 | |
| 1.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.200.000 | 3.200.000 | |
| 1.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.200.000 | 3.900.000 | |
| 1.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.200.000 | 3.200.000 | |
| 1.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.200.000 | 3.900.000 | |
| 1.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.050.000 | 3.050.000 | |
| 1.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.900.000 | 2.900.000 | |
| **1.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **289.655.067.185** | **302.802.756.030** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 288.882.247.185 | 302.230.096.030 | |
| 1.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 765.820.000 | 564.260.000 | |
| 1.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.500.000 | 4.900.000 | |
| 1.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| **1.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **29.600.000** | **35.600.000** | |
| 1.01.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 17.300.000 | 17.300.000 | |
| 1.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12.300.000 | 18.300.000 | |
| **1.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **75.650.000** | **75.650.000** | |
| 1.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 49.750.000 | 49.750.000 | |
| 1.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 25.900.000 | 25.900.000 | |
| **1.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **924.886.200** | **983.508.300** | |
| 1.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.596.200 | 22.148.300 | |
| 1.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.387.000 | 15.387.000 | |
| 1.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 120.873.000 | 120.873.000 | |
| 1.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 53.110.000 | 53.110.000 | |
| 1.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 87.500.000 | 143.500.000 | |
| 1.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 477.420.000 | 498.490.000 | |
| 1.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 130.000.000 | 130.000.000 | |
| **1.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **365.000.000** | **449.000.000** | |
| 1.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 365.000.000 | 449.000.000 | |
| **1.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **480.100.000** | **480.100.000** | |
| 1.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14.500.000 | 14.500.000 | |
| 1.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 16.800.000 | 16.800.000 | |
| 1.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 448.800.000 | 448.800.000 | |
| **1.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | **165.000.000** | **165.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Daerah** | | | |
| 1.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| 1.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| 1.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 1.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **128.212.684.600** | **142.204.243.150** | |
| **1.01.02.2.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **72.701.617.000** | **82.362.700.450** | |
| 1.01.02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 3.403.950.000 | 3.740.650.000 | |
| 1.01.02.2.01.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 498.206.000 | 498.206.000 | |
| 1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.023.234.000 | 3.461.134.000 | |
| 1.01.02.2.01.07 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 404.500.000 | 404.500.000 | |
| 1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 10.740.749.000 | 15.110.527.650 | |
| 1.01.02.2.01.09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 980.723.000 | 1.220.723.000 | |
| 1.01.02.2.01.10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 49.811.000 | 279.311.000 | |
| 1.01.02.2.01.11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 520.192.000 | 1.011.517.000 | |
| 1.01.02.2.01.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 517.250.000 | 517.250.000 | |
| 1.01.02.2.01.13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 378.000.000 | 378.000.000 | |
| 1.01.02.2.01.16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 2.620.200.000 | 5.854.970.800 | |
| 1.01.02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 1.905.200.000 | 1.716.309.000 | |
| 1.01.02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 2.250.000.000 | 3.000.000.000 | |
| 1.01.02.2.01.23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 44.250.000 | 44.250.000 | |
| 1.01.02.2.01.24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | 9.145.000 | 9.145.000 | |
| 1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 279.550.000 | 279.550.000 | |
| 1.01.02.2.01.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 277.855.000 | 277.855.000 | |
| 1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 16.150.000 | 16.150.000 | |
| 1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 41.250.840.000 | 41.250.840.000 | |
| 1.01.02.2.01.30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 82.400.000 | 82.400.000 | |
| 1.01.02.2.01.31 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 2.147.112.000 | 2.147.112.000 | |
| 1.01.02.2.01.35 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 29.100.000 | 29.100.000 | |
| 1.01.02.2.01.39 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 33.200.000 | 33.200.000 | |
| **1.01.02.2.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **33.512.398.600** | **37.165.386.700** | |
| 1.01.02.2.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 315.000.000 | 630.000.000 | |
| 1.01.02.2.02.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 538.341.000 | 538.341.000 | |
| 1.01.02.2.02.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 749.464.000 | 749.464.000 | |
| 1.01.02.2.02.06 | Pembangunan Laboratorium | 1.247.184.000 | 1.247.184.000 | |
| 1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 321.248.000 | 478.748.000 | |
| 1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 630.000.000 | 1.169.354.700 | |
| 1.01.02.2.02.15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | 210.000.000 | 580.000.000 | |
| 1.01.02.2.02.17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 0 | 367.500.000 | |
| 1.01.02.2.02.18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | 315.000.000 | 315.000.000 | |
| 1.01.02.2.02.24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 94.500.000 | 94.500.000 | |
| 1.01.02.2.02.27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 3.075.200.000 | 5.314.392.400 | |
| 1.01.02.2.02.28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 3.585.200.000 | 2.764.641.000 | |
| 1.01.02.2.02.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 1.125.000.000 | 1.875.000.000 | |
| 1.01.02.2.02.36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 45.447.000 | 45.447.000 | |
| 1.01.02.2.02.37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 8.710.000 | 8.710.000 | |
| 1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 327.820.000 | 327.820.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.01.02.2.02.39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| 1.01.02.2.02.40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 164.860.000 | 164.860.000 | |
| 1.01.02.2.02.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 135.800.000 | 135.800.000 | |
| 1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 18.778.280.100 | 18.778.280.100 | |
| 1.01.02.2.02.43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 69.412.000 | 69.412.000 | |
| 1.01.02.2.02.44 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU | 210.000.000 | 945.000.000 | |
| 1.01.02.2.02.48 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 34.650.000 | 34.650.000 | |
| 1.01.02.2.02.52 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 31.282.500 | 31.282.500 | |
| **1.01.02.2.03** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **17.419.119.000** | **18.096.606.000** | |
| 1.01.02.2.03.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 124.925.000 | 334.925.000 | |
| 1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 450.500.000 | 495.500.000 | |
| 1.01.02.2.03.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 315.000.000 | 737.487.000 | |
| 1.01.02.2.03.09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 0 | 4.725.200.000 | |
| 1.01.02.2.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | 2.625.200.000 | 1.825.200.000 | |
| 1.01.02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 39.100.000 | 39.100.000 | |
| 1.01.02.2.03.14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | 17.300.000 | 17.300.000 | |
| 1.01.02.2.03.15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 4.280.400.000 | 4.280.400.000 | |
| 1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 228.965.000 | 228.965.000 | |
| 1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 217.604.000 | 217.604.000 | |
| 1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 4.900.800.000 | 4.900.800.000 | |
| 1.01.02.2.03.19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 77.000.000 | 77.000.000 | |
| 1.01.02.2.03.24 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 43.475.000 | 43.475.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.01.02.2.03.26 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 129.250.000 | 129.250.000 | |
| 1.01.02.2.03.27 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 44.400.000 | 44.400.000 | |
| **1.01.02.2.04** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **4.579.550.000** | **4.579.550.000** | |
| 1.01.02.2.04.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 | |
| 1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 773.500.000 | 773.500.000 | |
| 1.01.02.2.04.13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 8.650.000 | 8.650.000 | |
| 1.01.02.2.04.15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 44.150.000 | |
| 1.01.02.2.04.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 586.100.000 | 586.100.000 | |
| 1.01.02.2.04.18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 17.150.000 | 17.150.000 | |
| **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **71.700.000** | **71.700.000** | |
| **1.01.04.2.01** | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **71.700.000** | **71.700.000** | |
| 1.01.04.2.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 20.950.000 | 20.950.000 | |
| 1.01.04.2.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 50.750.000 | 50.750.000 | |
| **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | **64.982.500** | **64.982.500** | |
| **1.01.06.2.01** | **Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **64.982.500** | **64.982.500** | |
| 1.01.06.2.01.02 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota | 64.982.500 | 64.982.500 | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **269.888.611.134** | **299.539.817.131** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KESEHATAN** | **269.888.611.134** | **299.539.817.131** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KESEHATAN** | **125.763.243.148** | **131.282.299.731** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **56.950.023.720** | **56.952.259.649** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **187.096.600** | **161.051.200** | |
| 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 34.784.900 | 38.464.900 | |
| 1.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 65.094.000 | 59.621.000 | |
| 1.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12.421.700 | 11.681.700 | |
| 1.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 11.970.000 | 11.970.000 | |
| 1.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 9.180.000 | 9.180.000 | |
| 1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13.684.000 | 13.698.600 | |
| 1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39.962.000 | 16.435.000 | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **54.942.844.070** | **55.020.777.453** | |
| 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 54.138.808.070 | 54.224.866.453 | |
| 1.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 612.808.000 | 612.808.000 | |
| 1.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 169.463.000 | 169.103.000 | |
| 1.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 1.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 1.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| **1.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **10.790.000** | **10.790.000** | |
| 1.02.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.02.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.02.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.890.000 | 4.890.000 | |
| 1.02.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.900.000 | 2.900.000 | |
| 1.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| **1.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **31.000.000** | **16.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 9.500.000 | 9.500.000 | |
| 1.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 1.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| **1.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.108.184.550** | **1.074.232.496** | |
| 1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 21.604.350 | 9.510.796 | |
| 1.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.582.000 | 17.275.000 | |
| 1.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 67.680.500 | 34.766.000 | |
| 1.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 279.702.700 | 229.657.700 | |
| 1.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.225.000 | 8.875.000 | |
| 1.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 36.450.000 | 30.450.000 | |
| 1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 475.340.000 | 583.598.000 | |
| 1.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 165.600.000 | 160.100.000 | |
| **1.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **250.600.000** | **250.600.000** | |
| 1.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 250.600.000 | 250.600.000 | |
| **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **91.640.500** | **64.440.500** | |
| 1.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.740.500 | 9.740.500 | |
| 1.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.900.000 | 3.700.000 | |
| 1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 51.000.000 | 51.000.000 | |
| **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **327.868.000** | **354.368.000** | |
| 1.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| 1.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 102.868.000 | 57.368.000 | |
| 1.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 80.000.000 | 222.000.000 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **65.558.198.951** | **71.195.885.205** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **41.266.334.850** | **40.437.372.805** | |
| 1.02.02.2.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 5.100.000.000 | 5.225.492.600 | |
| 1.02.02.2.01.06 | Pengembangan Puskesmas | 9.202.000.000 | 9.202.000.000 | |
| 1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 395.500.000 | 395.500.000 | |
| 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 5.200.000.000 | 5.370.239.700 | |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 4.456.000.000 | 4.574.793.655 | |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 8.160.330.039 | 8.160.330.039 | |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | 4.546.583.811 | 4.546.583.811 | |
| 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 4.189.214.000 | 2.945.726.000 | |
| 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 16.707.000 | 16.707.000 | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **23.444.414.101** | **29.797.953.099** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 250.842.000 | 381.382.000 | |
| 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 338.980.000 | 340.959.699 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 235.000.000 | 235.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 0 | 330.388.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 549.698.000 | 612.100.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 100.000.000 | 226.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 0 | 41.680.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 0 | 158.760.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 0 | 149.360.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 0 | 301.320.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 0 | 94.790.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 0 | 66.850.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.02.2.02.21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 0 | 96.559.000 | |
| 1.02.02.2.02.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 696.210.000 | 687.600.000 | |
| 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 18.003.967.800 | 24.003.988.400 | |
| 1.02.02.2.02.27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | 101.300.000 | 101.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 230.319.000 | 245.319.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 1.715.960.000 | 698.365.000 | |
| 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 588.617.301 | 392.712.000 | |
| 1.02.02.2.02.38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 133.520.000 | 133.520.000 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **561.250.000** | **561.250.000** | |
| 1.02.02.2.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 561.250.000 | 561.250.000 | |
| **1.02.02.2.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **286.200.000** | **399.309.301** | |
| 1.02.02.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | 40.000.000 | 44.500.000 | |
| 1.02.02.2.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 17.100.000 | 5.170.000 | |
| 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 189.100.000 | 309.639.301 | |
| 1.02.02.2.04.04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **2.475.716.600** | **1.865.585.000** | |
| **1.02.03.2.02** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **19.660.000** | **104.644.000** | |
| 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 19.660.000 | 104.644.000 | |
| **1.02.03.2.03** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **2.456.056.600** | **1.760.941.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.456.056.600 | 1.760.941.000 | |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **202.595.000** | **202.538.000** | |
| **1.02.04.2.03** | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **72.650.000** | **72.593.000** | |
| 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan | 72.650.000 | 72.593.000 | |
| | Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | |
| **1.02.04.2.06** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **129.945.000** | **129.945.000** | |
| 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 129.945.000 | 129.945.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **576.708.877** | **1.066.031.877** | |
| **1.02.05.2.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **78.835.000** | **78.835.000** | |
| 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 78.835.000 | 78.835.000 | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **185.308.877** | **987.196.877** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 185.308.877 | 987.196.877 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0001** | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI** | **103.524.730.074** | **127.656.879.488** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **71.630.305.724** | **95.735.903.138** | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **23.430.305.724** | **23.965.191.846** | |
| 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.430.305.724 | 23.965.191.846 | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **48.200.000.000** | **71.770.711.292** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 48.200.000.000 | 71.770.711.292 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **31.894.424.350** | **31.920.976.350** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **31.894.424.350** | **31.920.976.350** | |
| 1.02.02.2.01.05 | Pengembangan Rumah Sakit | 5.503.350.000 | 5.169.199.700 | |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 9.570.000.000 | 9.938.702.300 | |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 16.821.074.350 | 16.813.074.350 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0002** | **Puskesmas LAU** | **3.796.373.480** | **3.593.925.870** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.776.994.980** | **2.580.212.870** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **2.776.994.980** | **2.580.212.870** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.776.994.980 | 2.580.212.870 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA** | **915.241.000** | **1.008.013.000** | |
| | **KESEHATAN MASYARAKAT** | | | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **915.241.000** | **1.008.013.000** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 86.050.000 | 98.570.000 | |
| 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 9.240.000 | 9.240.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 49.795.000 | 10.080.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 34.440.000 | 30.450.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 49.635.000 | 23.100.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 34.950.000 | 11.280.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 5.460.000 | 9.240.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 26.740.000 | 19.740.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 17.580.000 | 8.820.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 77.000.000 | 298.695.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 15.480.000 | 35.640.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 58.941.000 | 31.120.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.100.000 | 37.760.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 2.100.000 | 11.620.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 15.510.000 | 7.700.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 234.090.000 | 134.670.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 0 | 4.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 157.880.000 | 222.728.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1.680.000 | 3.360.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **104.137.500** | **5.700.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **43.507.500** | **5.700.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 43.507.500 | 5.700.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0003** | **Puskesmas MAROS BARU** | **2.393.243.100** | **2.614.959.000** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.357.774.000** | **1.556.000.000** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.357.774.000** | **1.556.000.000** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.357.774.000 | 1.556.000.000 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.015.518.500** | **1.026.529.000** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.015.518.500** | **1.026.529.000** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 51.060.000 | 57.220.000 | |
| 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 0 | 1.960.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 107.680.000 | 25.445.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 40.390.000 | 35.350.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 47.640.000 | 22.690.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.460.000 | 15.400.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 34.760.000 | 27.320.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 41.980.000 | 30.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 20.590.000 | 7.910.000 | |
| 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 16.080.000 | 1.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 26.455.000 | 265.770.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 16.683.000 | 40.920.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 68.403.500 | 52.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 61.687.000 | 59.960.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 3.470.000 | 12.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 33.380.000 | 16.865.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 257.370.000 | 106.530.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 3.930.000 | 6.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 119.970.000 | 239.429.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 | 980.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **19.950.600** | **32.430.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **11.734.000** | **32.430.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 11.734.000 | 32.430.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0004** | **Puskesmas BANTIMURUNG** | **4.896.562.200** | **4.051.254.321** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.745.159.700** | **2.902.062.321** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **3.745.159.700** | **2.902.062.321** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.745.159.700 | 2.902.062.321 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.110.488.500** | **1.143.692.000** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan** | **1.110.488.500** | **1.143.692.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 102.030.000 | 79.280.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 116.480.000 | 2.100.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 68.600.000 | 49.140.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 50.130.000 | 33.040.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 20.160.000 | 50.480.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 18.480.000 | 15.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 21.840.000 | 22.050.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 28.140.000 | 9.100.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 42.000.000 | 370.023.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 15.180.000 | 45.540.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 88.530.000 | 30.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12.550.000 | 23.670.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4.340.000 | 15.260.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 52.080.000 | 15.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 219.370.000 | 127.350.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 5.040.000 | 7.840.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 48.808.500 | 243.539.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 20.160.000 | 4.480.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **40.914.000** | **5.500.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **11.114.000** | **5.500.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya | 11.114.000 | 5.500.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0005** | **Puskesmas SIMBANG** | **2.621.112.000** | **2.209.886.761** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.695.570.800** | **1.280.851.261** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.695.570.800** | **1.280.851.261** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.695.570.800 | 1.280.851.261 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **876.416.200** | **924.235.500** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **876.416.200** | **924.235.500** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 86.630.000 | 60.960.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 105.220.000 | 10.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 48.900.000 | 30.800.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 49.630.000 | 15.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 0 | 16.520.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 74.839.800 | 9.240.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 33.780.000 | 21.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 10.360.000 | 9.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 21.630.000 | 288.486.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 11.230.000 | 31.710.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 55.622.000 | 30.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 22.110.000 | 13.600.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20.160.000 | 31.220.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0 | 13.820.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 262.089.400 | 110.381.500 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 5.040.000 | 7.490.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 20.525.000 | 219.978.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 3.360.000 | 3.360.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **49.125.000** | **4.800.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **33.945.000** | **4.800.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 33.945.000 | 4.800.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0006** | **Puskesmas MANDAI** | **3.173.048.803** | **3.508.580.927** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.014.641.303** | **2.350.418.027** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **2.014.641.303** | **2.350.418.027** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.014.641.303 | 2.350.418.027 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.113.067.500** | **1.155.962.900** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.113.067.500** | **1.155.962.900** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 39.570.000 | 64.940.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 167.940.000 | 10.640.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 64.150.000 | 30.870.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 35.885.000 | 8.260.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 0 | 46.895.200 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 31.760.000 | 12.320.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 14.280.000 | 14.770.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 7.560.000 | 9.730.000 | |
| 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 2.870.000 | 1.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 28.560.000 | 313.885.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 76.590.000 | 93.290.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 106.822.500 | 30.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Lingkungan | | | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 43.740.000 | 92.850.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 43.080.000 | 12.040.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0 | 17.980.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 317.740.000 | 150.903.700 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 111.240.000 | 241.829.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 | 3.360.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **45.340.000** | **2.200.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat** | **35.860.000** | **2.200.000** | |
| | **(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 35.860.000 | 2.200.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0007** | **Puskesmas MALLAWA** | **2.063.592.400** | **2.135.366.721** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.056.000.000** | **1.127.776.721** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.056.000.000** | **1.127.776.721** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.056.000.000 | 1.127.776.721 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **991.089.900** | **1.003.090.000** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **991.089.900** | **1.003.090.000** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 72.850.000 | 61.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 59.600.000 | 7.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 23.000.000 | 34.900.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 35.600.000 | 31.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 95.181.600 | 37.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 58.908.300 | 22.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 19.800.000 | 23.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 9.800.000 | 6.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 21.600.000 | 293.250.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 52.125.000 | 41.550.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 109.000.000 | 30.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 68.250.000 | 22.050.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 77.000.000 | 21.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0 | 11.360.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 121.175.000 | 118.060.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 0 | 4.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 121.300.000 | 235.420.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 | 2.200.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **16.502.500** | **4.500.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **15.002.500** | **4.500.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 15.002.500 | 4.500.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0008** | **Puskesmas TANRALILI** | **3.060.278.500** | **3.360.278.000** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.950.190.000** | **2.250.190.000** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.950.190.000** | **2.250.190.000** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.950.190.000 | 2.250.190.000 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **939.644.500** | **1.107.688.000** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **939.644.500** | **1.107.688.000** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 73.820.000 | 82.865.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 51.725.000 | 1.960.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 29.280.000 | 62.640.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 34.600.000 | 16.240.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 0 | 20.640.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 52.190.000 | 12.320.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 58.990.000 | 24.150.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 81.760.000 | 12.880.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 56.000.000 | 388.760.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 19.559.500 | 27.330.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 24.800.000 | 29.470.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 65.540.000 | 28.610.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 18.200.000 | 16.450.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0 | 26.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 157.260.000 | 102.050.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 14.000.000 | 7.560.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 93.680.000 | 246.243.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 | 1.120.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **170.444.000** | **2.400.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **16.940.000** | **2.400.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 16.940.000 | 2.400.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0009** | **Puskesmas MARUSU** | **2.620.076.829** | **2.703.879.350** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.624.253.129** | **1.696.029.850** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.624.253.129** | **1.696.029.850** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1.624.253.129 | 1.696.029.850 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BLUD | | | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **955.122.700** | **1.001.919.500** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **955.122.700** | **1.001.919.500** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 72.930.000 | 54.180.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 115.558.000 | 19.670.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 73.510.000 | 57.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 110.685.000 | 17.220.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 44.091.100 | 21.560.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 58.240.000 | 8.540.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 7.420.000 | 11.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 17.750.000 | 12.740.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 9.100.000 | 304.781.500 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 45.580.000 | 49.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 38.123.500 | 30.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 15.430.000 | 29.225.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 9.800.000 | 2.520.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0 | 21.860.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 139.835.100 | 125.710.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 0 | 2.100.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 92.200.000 | 228.033.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan | 0 | 5.880.000 | |
| | Pemberian Obat Massal) | | | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **40.701.000** | **5.930.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **40.701.000** | **5.930.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 40.701.000 | 5.930.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0010** | **Puskesmas MONCONGLOE** | **1.913.656.300** | **2.015.467.121** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.041.200.000** | **1.142.976.721** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.041.200.000** | **1.142.976.721** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.041.200.000 | 1.142.976.721 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **844.981.300** | **870.490.400** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **844.981.300** | **870.490.400** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 96.000.000 | 84.750.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 46.450.000 | 8.600.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 40.000.000 | 51.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 13.300.000 | 8.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 52.650.000 | 15.750.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 30.000.000 | 12.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 27.100.000 | 27.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 13.500.000 | 5.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 26.900.000 | 248.800.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 15.150.000 | 27.340.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 68.100.000 | 24.700.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 20.050.000 | 16.880.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1.800.000 | 7.700.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 73.000.000 | 119.205.400 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke | 4.800.000 | 2.600.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laboratorium Rujukan/Nasional | | | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 98.400.000 | 207.165.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2.831.300 | 3.000.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **27.475.000** | **2.000.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **10.000.000** | **2.000.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10.000.000 | 2.000.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0011** | **Puskesmas TOMPOBULU** | **2.585.779.800** | **2.501.878.199** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.455.625.000** | **1.385.625.000** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.455.625.000** | **1.385.625.000** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.455.625.000 | 1.385.625.000 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.053.594.800** | **1.116.253.199** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.053.594.800** | **1.116.253.199** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 83.500.000 | 71.949.699 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 135.200.000 | 47.600.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 34.400.000 | 35.900.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 25.700.000 | 19.880.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 29.100.000 | 19.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 32.800.000 | 17.600.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 41.400.000 | 25.600.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 34.100.000 | 16.600.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 15.000.000 | 360.789.500 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 10.000.000 | 35.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 62.500.000 | 30.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Lingkungan | | | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 52.200.000 | 39.680.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 2.000.000 | 16.600.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0 | 11.900.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 198.250.000 | 117.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 0 | 7.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 101.600.000 | 242.654.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan | 1.000.000 | 500 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Pemberian Obat Massal) | | | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0012** | **Puskesmas BONTOA** | **3.610.847.900** | **3.463.640.000** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.404.875.000** | **2.254.875.000** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **2.404.875.000** | **2.254.875.000** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.404.875.000 | 2.254.875.000 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.111.687.000** | **1.208.765.000** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.111.687.000** | **1.208.765.000** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 81.330.000 | 64.035.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 119.800.000 | 29.680.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 69.035.000 | 39.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 116.325.000 | 38.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 0 | 41.580.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 38.380.000 | 13.860.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 32.690.000 | 49.350.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 37.240.000 | 13.440.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 26.020.000 | 384.458.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 15.050.000 | 43.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 82.970.000 | 31.680.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 37.770.000 | 25.430.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1.120.000 | 13.930.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0 | 5.320.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 296.347.000 | 146.395.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 0 | 6.720.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 102.160.000 | 254.327.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 | 7.560.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0013** | **Puskesmas TURIKALE** | **3.563.045.000** | **3.909.448.921** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.397.500.000** | **2.732.076.721** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **2.397.500.000** | **2.732.076.721** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.397.500.000 | 2.732.076.721 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.039.335.000** | **1.168.892.200** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.039.335.000** | **1.168.892.200** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 87.190.000 | 80.990.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 179.165.000 | 39.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 32.620.000 | 36.680.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 115.590.000 | 15.960.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 16.170.000 | 17.840.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 40.000.000 | 17.640.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 33.740.000 | 30.310.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 45.000.000 | 417.387.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 20.000.000 | 20.590.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 33.600.000 | 30.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 46.740.000 | 68.550.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 3.080.000 | 10.360.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 10.780.000 | 18.775.500 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 220.120.000 | 88.209.700 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 4.200.000 | 7.420.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 66.820.000 | 258.940.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 4.900.000 | 10.040.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **70.910.000** | **8.480.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **47.100.000** | **8.480.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 47.100.000 | 8.480.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0014** | **Puskesmas CENRANA** | **1.947.764.900** | **2.081.658.721** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.022.940.000** | **1.094.716.721** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.022.940.000** | **1.094.716.721** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.022.940.000 | 1.094.716.721 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **897.674.900** | **980.592.000** | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **897.674.900** | **980.592.000** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 102.300.000 | 61.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 145.100.000 | 12.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 41.700.000 | 30.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 96.580.000 | 34.700.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 6.105.600 | 21.700.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 29.500.000 | 15.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 35.000.000 | 24.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 35.100.000 | 5.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 15.400.000 | 321.190.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 92.400.000 | 35.790.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 51.313.000 | 30.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 68.150.000 | 21.880.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12.200.000 | 12.500.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0 | 14.600.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 47.826.300 | 100.820.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 0 | 7.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 48.000.000 | 230.712.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 | 1.200.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **27.150.000** | **6.350.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **27.150.000** | **6.350.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 27.150.000 | 6.350.000 | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0015** | **Puskesmas CAMBA** | **2.355.256.700** | **2.450.414.000** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.191.087.301** | **1.380.000.000** | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **1.191.087.301** | **1.380.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.191.087.301 | 1.380.000.000 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **1.123.206.899** | **1.063.864.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.123.206.899** | **1.063.864.000** | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 176.691.899 | 60.800.000 | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 78.400.000 | 14.100.000 | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 47.000.000 | 29.700.000 | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 44.150.000 | 18.400.000 | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 48.600.000 | 18.800.000 | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 53.840.000 | 24.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 25.800.000 | 24.300.000 | |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 23.600.000 | 18.100.000 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 24.000.000 | 350.320.000 | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 50.875.000 | 36.490.000 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 80.150.000 | 30.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 33.650.000 | 23.845.000 | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1.500.000 | 11.800.000 | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 0 | 35.490.000 | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 167.750.000 | 124.900.000 | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 0 | 7.200.000 | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 189.600.000 | 234.219.000 | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0 | 1.200.000 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **40.962.500** | **6.550.000** | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **40.962.500** | **6.550.000** | |
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 40.962.500 | 6.550.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **191.508.072.196** | **208.628.033.298** | |
| **1.03.2.10.2.15.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN** | **191.508.072.196** | **208.628.033.298** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **1.03.2.10.2.15.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN** | **191.508.072.196** | **208.628.033.298** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **16.754.938.273** | **16.893.200.112** | |
| **1.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.375.000** | **12.375.000** | |
| 1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.050.000 | 1.050.000 | |
| 1.03.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.025.000 | 2.025.000 | |
| 1.03.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.175.000 | 2.175.000 | |
| 1.03.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.100.000 | 2.100.000 | |
| 1.03.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.300.000 | 3.300.000 | |
| 1.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.425.000 | 1.425.000 | |
| 1.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 300 | 300 | |
| **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12.174.049.273** | **12.313.412.112** | |
| 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.510.249.273 | 11.649.612.112 | |
| 1.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 659.780.000 | 659.780.000 | |
| 1.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.850.000 | 2.850.000 | |
| 1.03.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.170.000 | 1.170.000 | |
| **1.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **850.000** | **850.000** | |
| 1.03.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 850.000 | 850.000 | |
| **1.03.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **10.850.000** | **10.850.000** | |
| 1.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 10.850.000 | 10.850.000 | |
| **1.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **913.584.000** | **912.483.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.440.000 | 14.340.000 | |
| 1.03.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.439.000 | 3.439.000 | |
| 1.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 194.105.000 | 202.104.000 | |
| 1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 62.600.000 | 62.600.000 | |
| 1.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 610.000.000 | 610.000.000 | |
| **1.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2.234.500.000** | **2.234.500.000** | |
| 1.03.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 70.000.000 | 70.000.000 | |
| 1.03.01.2.07.03 | Pengadaan Alat Besar | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 1.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 164.500.000 | 164.500.000 | |
| **1.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.080.930.000** | **1.080.930.000** | |
| 1.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 600.000 | 600.000 | |
| 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.072.830.000 | 1.072.830.000 | |
| **1.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **327.800.000** | **327.800.000** | |
| 1.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 1.03.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 228.800.000 | 228.800.000 | |
| 1.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.000.000 | 29.000.000 | |
| 1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **10.483.082.000** | **16.965.943.983** | |
| **1.03.02.2.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **4.725.400.000** | **8.234.951.000** | |
| 1.03.02.2.01.06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 1.052.000.000 | 1.052.000.000 | |
| 1.03.02.2.01.07 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | 368.400.000 | 368.400.000 | |
| 1.03.02.2.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 3.305.000.000 | 5.314.551.000 | |
| 1.03.02.2.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 0 | 1.500.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.03.02.2.02** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **5.757.682.000** | **8.730.992.983** | |
| 1.03.02.2.02.02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | 2.973.310.983 | |
| 1.03.02.2.02.08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.955.000.000 | 1.955.000.000 | |
| 1.03.02.2.02.09 | Peningkatan Bendung Irigasi | 517.600.000 | 517.600.000 | |
| 1.03.02.2.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 2.200.807.000 | 2.200.807.000 | |
| 1.03.02.2.02.15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | 728.000.000 | 728.000.000 | |
| 1.03.02.2.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 356.275.000 | 356.275.000 | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **6.690.400.000** | **6.690.400.000** | |
| **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **6.690.400.000** | **6.690.400.000** | |
| 1.03.03.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| 1.03.03.2.01.03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 150.000.000 | 150.000.000 | |
| 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 2.270.400.000 | 2.070.400.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 1.03.03.2.01.06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 770.000.000 | 970.000.000 | |
| 1.03.03.2.01.17 | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | |
| 1.03.03.2.01.19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 700.000.000 | 700.000.000 | |
| **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **0** | **1.500.000.000** | |
| **1.03.04.2.01** | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **1.500.000.000** | |
| 1.03.04.2.01.03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 0 | 1.500.000.000 | |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **1.880.000.000** | **1.880.000.000** | |
| **1.03.05.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1.880.000.000** | **1.880.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 1.880.000.000 | 1.880.000.000 | |
| **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **8.109.200.000** | **7.909.200.000** | |
| **1.03.06.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **8.109.200.000** | **7.909.200.000** | |
| 1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 8.109.200.000 | 7.909.200.000 | |
| **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **9.310.400.000** | **11.410.400.000** | |
| **1.03.07.2.01** | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **9.310.400.000** | **11.410.400.000** | |
| 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 9.310.400.000 | 11.410.400.000 | |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **29.150.000.000** | **29.859.469.680** | |
| **1.03.08.2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **29.150.000.000** | **29.859.469.680** | |
| 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 29.150.000.000 | 29.859.469.680 | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **106.468.113.423** | **112.856.441.023** | |
| **1.03.10.2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **106.468.113.423** | **112.856.441.023** | |
| 1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan | 47.411.676.423 | 41.080.346.623 | |
| 1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan | 48.881.437.000 | 57.351.894.400 | |
| 1.03.10.2.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 0 | 4.000.000.000 | |
| 1.03.10.2.01.12 | Pembangunan Jembatan | 10.175.000.000 | 10.424.200.000 | |
| **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **703.154.500** | **704.183.500** | |
| **1.03.11.2.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **293.169.500** | **297.017.500** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 1.03.11.2.01.01 | Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 32.445.000 | 32.445.000 | |
| 1.03.11.2.01.02 | Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan | 18.150.000 | 18.150.000 | |
| 1.03.11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 224.554.500 | 228.402.500 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.03.11.2.01.08 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 18.020.000 | 18.020.000 | |
| **1.03.11.2.02** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **175.035.000** | **172.206.000** | |
| 1.03.11.2.02.02 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 3.550.000 | 3.550.000 | |
| 1.03.11.2.02.03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | 75.595.000 | 64.820.000 | |
| 1.03.11.2.02.06 | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | 28.190.000 | 31.850.000 | |
| 1.03.11.2.02.07 | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | 42.290.000 | 56.370.000 | |
| 1.03.11.2.02.10 | Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi | 25.410.000 | 15.616.000 | |
| **1.03.11.2.04** | **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | **234.950.000** | **234.960.000** | |
| 1.03.11.2.04.02 | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 189.250.000 | 189.250.000 | |
| 1.03.11.2.04.03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 45.700.000 | 45.710.000 | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **1.958.784.000** | **1.958.795.000** | |
| **1.03.12.2.01** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **668.938.000** | **663.061.000** | |
| 1.03.12.2.01.01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 135.439.000 | 125.489.000 | |
| 1.03.12.2.01.02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 533.499.000 | 537.572.000 | |
| **1.03.12.2.02** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **753.196.000** | **704.116.000** | |
| 1.03.12.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 753.196.000 | 704.116.000 | |
| **1.03.12.2.04** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **536.650.000** | **591.618.000** | |
| 1.03.12.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 74.600.000 | 42.600.000 | |
| 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 462.050.000 | 549.018.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **10.004.038.846** | **9.714.324.946** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **1.04.2.11.0.00.01.0000** | **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | **10.004.038.846** | **9.714.324.946** | |
| **1.04.2.11.0.00.01.0000** | **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | **10.004.038.846** | **9.714.324.946** | |
| **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **8.394.978.846** | **8.105.222.546** | |
| **1.04.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.000.100** | **15.105.100** | |
| 1.04.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.883.000 | 1.883.000 | |
| 1.04.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.287.500 | 2.287.500 | |
| 1.04.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.050.000 | 2.155.000 | |
| 1.04.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.229.600 | 2.229.600 | |
| 1.04.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.140.000 | 2.140.000 | |
| 1.04.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| 1.04.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.160.000 | 2.160.000 | |
| **1.04.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.434.559.246** | **7.253.373.846** | |
| 1.04.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.105.859.246 | 6.924.673.846 | |
| 1.04.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 322.200.000 | 322.200.000 | |
| 1.04.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 1.04.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| **1.04.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **33.500.000** | **32.000.000** | |
| 1.04.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 24.000.000 | |
| 1.04.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 33.500.000 | 8.000.000 | |
| **1.04.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **348.944.500** | **389.268.600** | |
| 1.04.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| 1.04.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 73.144.500 | 71.009.500 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.04.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 32.180.000 | 32.544.100 | |
| 1.04.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 36.640.000 | 21.045.000 | |
| 1.04.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 189.480.000 | 257.170.000 | |
| **1.04.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **133.000.000** | **33.000.000** | |
| 1.04.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 33.000.000 | 33.000.000 | |
| **1.04.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **327.475.000** | **327.475.000** | |
| 1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.475.000 | 16.475.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 1.04.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 311.000.000 | 311.000.000 | |
| **1.04.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **102.500.000** | **55.000.000** | |
| 1.04.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35.000.000 | 35.000.000 | |
| 1.04.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **536.380.000** | **532.580.000** | |
| **1.04.02.2.02** | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **9.730.000** | **6.790.000** | |
| 1.04.02.2.02.03 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | 9.730.000 | 6.790.000 | |
| **1.04.02.2.03** | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **522.500.000** | **521.500.000** | |
| 1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| 1.04.02.2.03.02 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 22.500.000 | 21.500.000 | |
| 1.04.02.2.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **1.04.02.2.04** | **Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **4.150.000** | **4.290.000** | |
| 1.04.02.2.04.02 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 4.150.000 | 4.290.000 | |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **785.840.000** | **779.722.400** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.04.03.2.01** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | **82.000.000** | **104.462.800** | |
| 1.04.03.2.01.02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 82.000.000 | 104.462.800 | |
| **1.04.03.2.02** | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **19.550.000** | **19.550.000** | |
| 1.04.03.2.02.01 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 13.850.000 | 13.850.000 | |
| 1.04.03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 5.700.000 | 5.700.000 | |
| **1.04.03.2.03** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **684.290.000** | **655.709.600** | |
| 1.04.03.2.03.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | 350.000.000 | 314.522.200 | |
| 1.04.03.2.03.02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 334.290.000 | 341.187.400 | |
| **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **258.200.000** | **264.360.000** | |
| **1.04.04.2.01** | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah** | **258.200.000** | **264.360.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **Kabupaten/Kota** | | | |
| 1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 258.200.000 | 264.360.000 | |
| **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **28.640.000** | **32.440.000** | |
| **1.04.05.2.01** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **28.640.000** | **32.440.000** | |
| 1.04.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 4.900.000 | 9.700.000 | |
| 1.04.05.2.01.04 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | 23.740.000 | 22.740.000 | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **31.223.944.655** | **31.891.428.889** | |
| **1.05.0.00.0.00.01.0000** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | **14.011.203.971** | **14.407.136.165** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.05.0.00.0.00.01.0000** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | **14.011.203.971** | **14.407.136.165** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **13.232.318.971** | **13.527.851.773** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.225.000** | **15.225.000** | |
| 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.075.000 | 2.025.000 | |
| 1.05.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.075.000 | 2.025.000 | |
| 1.05.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.075.000 | 2.025.000 | |
| 1.05.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.075.000 | 2.025.000 | |
| 1.05.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.075.000 | 2.025.000 | |
| 1.05.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.475.000 | 2.775.000 | |
| 1.05.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.375.000 | 2.325.000 | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.685.551.471** | **7.972.764.273** | |
| 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.554.856.371 | 7.842.069.173 | |
| 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 122.430.000 | 122.430.000 | |
| 1.05.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0 | 8.265.100 | |
| **1.05.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **14.400.000** | |
| 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 14.400.000 | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **118.605.500** | **138.108.500** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 3.034.000 | |
| 1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.650.500 | 21.399.500 | |
| 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.255.000 | 11.255.000 | |
| 1.05.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 74.700.000 | 92.420.000 | |
| **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **17.345.000** | **17.280.000** | |
| 1.05.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.345.000 | 17.280.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **5.395.592.000** | **5.370.074.000** | |
| 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.992.000 | 4.224.000 | |
| 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5.390.600.000 | 5.365.850.000 | |
| **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **290.442.000** | **368.321.392** | |
| **1.05.02.2.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **264.630.000** | **267.110.000** | |
| 1.05.02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 196.400.000 | 207.180.000 | |
| 1.05.02.2.01.02 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 21.900.000 | 21.900.000 | |
| 1.05.02.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 20.400.000 | 27.010.000 | |
| 1.05.02.2.01.08 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 5.930.000 | 5.920.000 | |
| 1.05.02.2.01.09 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 20.000.000 | 5.100.000 | |
| **1.05.02.2.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **20.680.000** | **96.079.392** | |
| 1.05.02.2.02.01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 8.050.000 | 60.105.000 | |
| 1.05.02.2.02.02 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 7.845.000 | 7.845.000 | |
| 1.05.02.2.02.03 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 4.785.000 | 28.129.392 | |
| **1.05.02.2.03** | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | **5.132.000** | **5.132.000** | |
| 1.05.02.2.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 5.132.000 | 5.132.000 | |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON** | **488.443.000** | **510.963.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **KEBAKARAN** | | | |
| **1.05.04.2.01** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan** | **464.698.000** | **487.218.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 209.500.000 | 242.820.000 | |
| 1.05.04.2.01.03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 10.200.000 | 10.200.000 | |
| 1.05.04.2.01.05 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 181.998.000 | 181.998.000 | |
| 1.05.04.2.01.06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 51.000.000 | 51.000.000 | |
| 1.05.04.2.01.08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | 12.000.000 | 1.200.000 | |
| **1.05.04.2.02** | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | **9.150.000** | **9.150.000** | |
| 1.05.04.2.02.02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 9.150.000 | 9.150.000 | |
| **1.05.04.2.04** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **14.595.000** | **14.595.000** | |
| 1.05.04.2.04.02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 14.595.000 | 14.595.000 | |
| **1.05.0.00.0.00.02.0000** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | **17.212.740.684** | **17.484.292.724** | |
| **1.05.0.00.0.00.02.0000** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | **17.212.740.684** | **17.484.292.724** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.479.937.684** | **4.516.489.724** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.220.850** | **10.220.850** | |
| 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.230.000 | 1.230.000 | |
| 1.05.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.492.000 | 1.492.000 | |
| 1.05.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 1.05.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.900.000 | 1.900.000 | |
| 1.05.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.080.000 | 2.080.000 | |
| 1.05.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | 1.190.850 | 1.190.850 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| 1.05.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 828 | 828 | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.183.644.580** | **3.225.476.620** | |
| 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.025.715.580 | 3.077.267.620 | |
| 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 147.120.000 | 137.400.000 | |
| 1.05.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2.726.500 | 2.726.500 | |
| 1.05.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.082.500 | 4.082.500 | |
| 1.05.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **429.113.425** | **427.733.425** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.153.425 | 14.673.425 | |
| 1.05.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.997.500 | 13.997.500 | |
| 1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 43.662.500 | 43.662.500 | |
| 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 23.200.000 | 23.200.000 | |
| 1.05.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.000.000 | 22.600.000 | |
| 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 306.100.000 | 309.600.000 | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **722.240.000** | **723.340.000** | |
| 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14.500.000 | 15.600.000 | |
| 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.000.000 | 18.000.000 | |
| 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 689.740.000 | 689.740.000 | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **134.718.829** | **129.718.829** | |
| 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 1.05.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 64.718.829 | 64.718.829 | |
| 1.05.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 15.000.000 | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **12.732.803.000** | **12.967.803.000** | |
| **1.05.03.2.01** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **99.450.000** | **99.450.000** | |
| 1.05.03.2.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 59.450.000 | 59.450.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.05.03.2.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| **1.05.03.2.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **12.418.826.000** | **12.653.826.000** | |
| 1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 37.200.000 | 37.200.000 | |
| 1.05.03.2.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 220.000.000 | |
| 1.05.03.2.02.07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 12.368.226.000 | 12.368.226.000 | |
| 1.05.03.2.02.10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 13.400.000 | 28.400.000 | |
| **1.05.03.2.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **199.647.000** | **199.647.000** | |
| 1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 53.177.000 | 53.127.000 | |
| 1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 146.470.000 | 146.520.000 | |
| **1.05.03.2.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **14.880.000** | **14.880.000** | |
| 1.05.03.2.04.04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | 14.880.000 | 14.880.000 | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **6.410.408.952** | **6.874.481.385** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS SOSIAL** | **6.410.408.952** | **6.874.481.385** | |
| **1.06.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS SOSIAL** | **6.410.408.952** | **6.874.481.385** | |
| **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.501.801.602** | **4.476.028.537** | |
| **1.06.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.045.000** | **8.265.000** | |
| 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.495.000 | 1.495.000 | |
| 1.06.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.220.000 | 1.227.500 | |
| 1.06.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.075.000 | 1.075.000 | |
| 1.06.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.050.000 | 1.262.500 | |
| 1.06.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 855.000 | 855.000 | |
| 1.06.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 1.325.000 | 1.325.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SKPD | | | |
| 1.06.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.025.000 | 1.025.000 | |
| **1.06.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.080.191.202** | **4.018.518.137** | |
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.918.736.302 | 3.894.673.237 | |
| 1.06.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 158.950.000 | 120.340.000 | |
| 1.06.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.240.000 | 2.240.000 | |
| 1.06.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.264.900 | 1.264.900 | |
| **1.06.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **12.750.000** | **12.750.000** | |
| 1.06.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.750.000 | 12.750.000 | |
| **1.06.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **128.395.400** | **165.075.400** | |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.480.000 | 1.480.000 | |
| 1.06.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.430.000 | 20.146.000 | |
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.345.400 | 7.845.400 | |
| 1.06.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.250.000 | 11.750.000 | |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 91.890.000 | 121.854.000 | |
| **1.06.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **248.920.000** | **235.920.000** | |
| 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 520 | 520 | |
| 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 248.400.000 | 235.400.000 | |
| **1.06.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **23.500.000** | **35.500.000** | |
| 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12.000.000 | 20.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| 1.06.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.000.000 | 7.000.000 | |
| **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **307.432.000** | **306.382.000** | |
| **1.06.02.2.03** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **307.432.000** | **306.382.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 107.432.000 | 106.382.000 | |
| 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **105.072.850** | **105.072.850** | |
| **1.06.04.2.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **75.132.850** | **75.132.850** | |
| 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 55.941.850 | 55.941.850 | |
| 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 19.191.000 | 19.191.000 | |
| **1.06.04.2.02** | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **29.940.000** | **29.940.000** | |
| 1.06.04.2.02.14 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 29.940.000 | 29.940.000 | |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **1.308.742.500** | **1.796.837.998** | |
| **1.06.05.2.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **1.308.742.500** | **1.796.837.998** | |
| 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 437.347.500 | 685.582.500 | |
| 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 121.975.000 | 123.700.000 | |
| 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 749.420.000 | 987.555.498 | |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **184.300.000** | **184.300.000** | |
| **1.06.06.2.02** | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **184.300.000** | **184.300.000** | |
| 1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 184.300.000 | 184.300.000 | |
| **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **3.060.000** | **5.860.000** | |
| **1.06.07.2.01** | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **3.060.000** | **5.860.000** | |
| 1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 3.060.000 | 5.860.000 | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | **287.642.900** | **301.592.900** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **TENAGA KERJA** | | | |
| **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN** | **287.642.900** | **301.592.900** | |
| **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN** | **287.642.900** | **301.592.900** | |
| **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **8.695.800** | **8.695.800** | |
| **2.07.02.2.01** | **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** | **8.695.800** | **8.695.800** | |
| 2.07.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 8.695.800 | 8.695.800 | |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **131.135.000** | **131.135.000** | |
| **2.07.03.2.01** | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **131.135.000** | **131.135.000** | |
| 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 131.135.000 | 131.135.000 | |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **60.200.000** | **60.200.000** | |
| **2.07.04.2.01** | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **10.200.000** | **10.200.000** | |
| 2.07.04.2.01.02 | Pelayanan antar Kerja | 10.200.000 | 10.200.000 | |
| **2.07.04.2.03** | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **50.000.000** | **50.000.000** | |
| 2.07.04.2.03.03 | Job Fair/Bursa Kerja | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **87.612.100** | **101.562.100** | |
| **2.07.05.2.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **56.814.000** | **74.764.000** | |
| 2.07.05.2.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 56.814.000 | 74.764.000 | |
| **2.07.05.2.02** | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **30.798.100** | **26.798.100** | |
| 2.07.05.2.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.798.100 | 26.798.100 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **6.846.550.175** | **7.116.730.162** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **6.846.550.175** | **7.116.730.162** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **6.846.550.175** | **7.116.730.162** | |
| **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.806.940.175** | **6.077.120.162** | |
| **2.08.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **15.850.000** | **15.850.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.08.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 2.08.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| 2.08.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.650.000 | 1.650.000 | |
| 2.08.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| 2.08.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.350.000 | 1.350.000 | |
| 2.08.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.150.000 | 2.150.000 | |
| 2.08.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.900.000 | 2.900.000 | |
| **2.08.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.418.822.575** | **5.685.492.562** | |
| 2.08.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.329.152.575 | 5.538.732.562 | |
| 2.08.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 80.520.000 | 137.610.000 | |
| 2.08.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.350.000 | 2.350.000 | |
| 2.08.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.800.000 | 6.800.000 | |
| **2.08.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **185.318.600** | **193.328.600** | |
| 2.08.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.337.650 | 6.337.650 | |
| 2.08.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.765.000 | 3.300.000 | |
| 2.08.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 51.260.950 | 51.260.950 | |
| 2.08.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.200.000 | 17.200.000 | |
| 2.08.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 16.000.000 | 20.500.000 | |
| 2.08.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | 84.755.000 | 94.730.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Konsultasi SKPD | | | |
| **2.08.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **163.300.000** | **158.800.000** | |
| 2.08.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.500.000 | 2.250.000 | |
| 2.08.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 158.800.000 | 156.550.000 | |
| **2.08.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **23.649.000** | **23.649.000** | |
| 2.08.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 16.049.000 | 16.049.000 | |
| 2.08.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.600.000 | 7.600.000 | |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **269.840.000** | **269.840.000** | |
| **2.08.02.2.01** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **42.640.000** | **42.640.000** | |
| 2.08.02.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 29.215.000 | 29.215.000 | |
| 2.08.02.2.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 13.425.000 | 13.425.000 | |
| **2.08.02.2.02** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada** | **209.200.000** | **209.200.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | |
| 2.08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 162.000.000 | 162.000.000 | |
| 2.08.02.2.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 47.200.000 | 47.200.000 | |
| **2.08.02.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **18.000.000** | **18.000.000** | |
| 2.08.02.2.03.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.000.000 | 18.000.000 | |
| **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **418.000.000** | **418.000.000** | |
| **2.08.03.2.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **106.750.000** | **106.750.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.08.03.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 93.750.000 | 93.750.000 | |
| 2.08.03.2.01.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 13.000.000 | 13.000.000 | |
| **2.08.03.2.02** | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **247.500.000** | **247.500.000** | |
| 2.08.03.2.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| 2.08.03.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 217.500.000 | 217.500.000 | |
| **2.08.03.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **63.750.000** | **63.750.000** | |
| 2.08.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 63.750.000 | 63.750.000 | |
| **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **141.040.000** | **141.040.000** | |
| **2.08.04.2.01** | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **37.395.000** | **37.395.000** | |
| 2.08.04.2.01.03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 37.395.000 | 37.395.000 | |
| **2.08.04.2.02** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **29.345.000** | **29.345.000** | |
| 2.08.04.2.02.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan | 16.645.000 | 16.645.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.08.04.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12.700.000 | 12.700.000 | |
| **2.08.04.2.03** | **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **74.300.000** | **74.300.000** | |
| 2.08.04.2.03.01 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 74.300.000 | 74.300.000 | |
| **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **16.520.000** | **16.520.000** | |
| **2.08.05.2.01** | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **16.520.000** | **16.520.000** | |
| 2.08.05.2.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 16.520.000 | 16.520.000 | |
| **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **148.330.000** | **148.330.000** | |
| **2.08.06.2.01** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **64.187.500** | **64.187.500** | |
| 2.08.06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 15.812.500 | 15.812.500 | |
| 2.08.06.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 48.375.000 | 48.375.000 | |
| **2.08.06.2.02** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | **84.142.500** | **84.142.500** | |
| 2.08.06.2.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.322.500 | 31.322.500 | |
| 2.08.06.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 37.595.000 | 37.595.000 | |
| 2.08.06.2.02.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15.225.000 | 15.225.000 | |
| **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **45.880.000** | **45.880.000** | |
| **2.08.07.2.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **13.780.000** | **13.780.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.08.07.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 13.780.000 | 13.780.000 | |
| **2.08.07.2.02** | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **13.050.000** | **13.050.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.08.07.2.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 13.050.000 | 13.050.000 | |
| **2.08.07.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **19.050.000** | **19.050.000** | |
| 2.08.07.2.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 19.050.000 | 19.050.000 | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **821.321.990** | **810.954.590** | |
| **3.27.2.09.0.00.01.0000** | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH** | **821.321.990** | **810.954.590** | |
| **3.27.2.09.0.00.01.0000** | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH** | **821.321.990** | **810.954.590** | |
| **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | **12.887.600** | **12.887.600** | |
| **2.09.02.2.01** | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **12.887.600** | **12.887.600** | |
| 2.09.02.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | 12.887.600 | 12.887.600 | |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **610.407.390** | **610.407.390** | |
| **2.09.03.2.01** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **134.212.990** | **134.212.990** | |
| 2.09.03.2.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 33.167.200 | 33.167.200 | |
| 2.09.03.2.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 26.569.890 | 26.569.890 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.09.03.2.01.04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 34.977.600 | 34.977.600 | |
| 2.09.03.2.01.05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 19.379.700 | 19.379.700 | |
| 2.09.03.2.01.06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | 20.118.600 | 20.118.600 | |
| **2.09.03.2.04** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **476.194.400** | **476.194.400** | |
| 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 455.000.000 | 455.000.000 | |
| 2.09.03.2.04.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 21.194.400 | 21.194.400 | |
| **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **149.636.300** | **148.276.300** | |
| **2.09.04.2.01** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **18.994.900** | **17.634.900** | |
| 2.09.04.2.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 18.994.900 | 17.634.900 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **2.09.04.2.02** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **130.641.400** | **130.641.400** | |
| 2.09.04.2.02.02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 130.641.400 | 130.641.400 | |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **48.390.700** | **39.383.300** | |
| **2.09.05.2.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **48.390.700** | **39.383.300** | |
| 2.09.05.2.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 21.845.900 | 25.845.900 | |
| 2.09.05.2.01.03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 13.537.400 | 13.537.400 | |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **83.925.000** | **83.986.000** | |
| **1.03.2.10.2.15.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN** | **83.925.000** | **83.986.000** | |
| **1.03.2.10.2.15.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN** | **83.925.000** | **83.986.000** | |
| **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **50.025.000** | **40.425.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.10.04.2.01** | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **50.025.000** | **40.425.000** | |
| 2.10.04.2.01.01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 31.525.000 | 26.725.000 | |
| 2.10.04.2.01.02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 18.500.000 | 13.700.000 | |
| **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | **10.850.000** | **23.430.000** | |
| **2.10.06.2.01** | **Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **10.850.000** | **23.430.000** | |
| 2.10.06.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 10.850.000 | 23.430.000 | |
| **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **23.050.000** | **20.131.000** | |
| **2.10.10.2.01** | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | **23.050.000** | **20.131.000** | |
| 2.10.10.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 23.050.000 | 20.131.000 | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **9.046.298.900** | **9.354.827.400** | |
| **1.04.2.11.0.00.01.0000** | **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | **9.046.298.900** | **9.354.827.400** | |
| **1.04.2.11.0.00.01.0000** | **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | **9.046.298.900** | **9.354.827.400** | |
| **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **417.535.000** | **325.020.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **2.11.02.2.02** | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | **287.400.000** | **325.020.000** | |
| 2.11.02.2.02.02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 287.400.000 | 325.020.000 | |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **231.404.900** | **255.329.900** | |
| **2.11.03.2.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **231.404.900** | **255.329.900** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 9.200.000 | 5.200.000 | |
| 2.11.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 36.089.900 | 64.974.900 | |
| 2.11.03.2.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 186.115.000 | 185.155.000 | |
| **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **150.000.000** | **150.000.000** | |
| **2.11.04.2.01** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **150.000.000** | **150.000.000** | |
| 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 150.000.000 | 150.000.000 | |
| **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **6.480.000** | **6.360.000** | |
| **2.11.05.2.02** | **Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **6.480.000** | **6.360.000** | |
| 2.11.05.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 6.480.000 | 6.360.000 | |
| **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **9.640.000** | **21.470.000** | |
| **2.11.06.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **9.640.000** | **21.470.000** | |
| 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 9.640.000 | 21.470.000 | |
| **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **82.850.000** | **82.850.000** | |
| **2.11.08.2.01** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **82.850.000** | **82.850.000** | |
| 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi | 25.000.000 | 25.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan | | | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 57.850.000 | 57.850.000 | |
| **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **77.265.000** | **68.265.000** | |
| **2.11.09.2.01** | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **77.265.000** | **68.265.000** | |
| 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 77.265.000 | 68.265.000 | |
| **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **5.390.000** | **9.070.000** | |
| **2.11.10.2.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **5.390.000** | **9.070.000** | |
| 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 5.390.000 | 9.070.000 | |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **8.065.734.000** | **8.436.462.500** | |
| **2.11.11.2.01** | **Pengelolaan Sampah** | **8.065.734.000** | **8.436.462.500** | |
| 2.11.11.2.01.01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 11.750.000 | 7.750.000 | |
| 2.11.11.2.01.02 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 28.350.000 | 28.350.000 | |
| 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 5.989.000.000 | 5.989.000.000 | |
| 2.11.11.2.01.04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 86.400.000 | 86.400.000 | |
| 2.11.11.2.01.07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 1.950.234.000 | 2.324.962.500 | |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **5.896.873.068** | **6.077.516.725** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **5.896.873.068** | **6.077.516.725** | |
| **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **5.896.873.068** | **6.077.516.725** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.684.527.268** | **4.865.170.925** | |
| **2.12.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **13.950.000** | **13.950.000** | |
| 2.12.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| 2.12.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.050.000 | 1.050.000 | |
| 2.12.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.650.000 | 1.650.000 | |
| 2.12.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.050.000 | 1.050.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.12.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.650.000 | 1.650.000 | |
| 2.12.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 2.12.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.100.000 | 5.100.000 | |
| **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.234.420.568** | **4.415.064.225** | |
| 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.089.010.568 | 4.269.654.225 | |
| 2.12.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 134.310.000 | 134.310.000 | |
| 2.12.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| 2.12.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.600.000 | 6.600.000 | |
| **2.12.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **49.650.200** | **49.650.200** | |
| 2.12.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 22.750.000 | 22.750.000 | |
| 2.12.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2.000.200 | 2.000.200 | |
| 2.12.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 24.900.000 | 24.900.000 | |
| **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **119.336.500** | **119.336.500** | |
| 2.12.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.868.000 | 8.868.000 | |
| 2.12.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23.888.500 | 23.888.500 | |
| 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.100.000 | 3.100.000 | |
| 2.12.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 74.480.000 | 74.480.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.12.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **197.600.000** | **197.600.000** | |
| 2.12.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 173.600.000 | 173.600.000 | |
| **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **69.570.000** | **69.570.000** | |
| 2.12.01.2.09.04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 43.360.000 | 43.360.000 | |
| 2.12.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26.210.000 | 26.210.000 | |
| **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **481.881.800** | **481.881.800** | |
| **2.12.02.2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **68.733.500** | **68.733.500** | |
| 2.12.02.2.01.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 9.971.000 | 9.971.000 | |
| 2.12.02.2.01.03 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | 8.630.000 | 8.630.000 | |
| 2.12.02.2.01.05 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 50.132.500 | 50.132.500 | |
| **2.12.02.2.02** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **353.100.000** | **353.100.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.12.02.2.02.02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 353.100.000 | 353.100.000 | |
| **2.12.02.2.03** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **42.976.300** | **42.976.300** | |
| 2.12.02.2.03.02 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 24.303.000 | 24.303.000 | |
| 2.12.02.2.03.05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 18.673.300 | 18.673.300 | |
| **2.12.02.2.04** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **17.072.000** | **17.072.000** | |
| 2.12.02.2.04.02 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk | 17.072.000 | 17.072.000 | |
| **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **204.525.000** | **204.525.000** | |
| **2.12.03.2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **99.925.000** | **99.925.000** | |
| 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 79.925.000 | 79.925.000 | |
| 2.12.03.2.01.05 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| **2.12.03.2.02** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **85.940.000** | **85.940.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.12.03.2.02.03 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | 49.440.000 | 49.440.000 | |
| 2.12.03.2.02.04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 15.130.000 | 15.130.000 | |
| 2.12.03.2.02.08 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | 21.370.000 | 21.370.000 | |
| **2.12.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **18.660.000** | **18.660.000** | |
| 2.12.03.2.03.02 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil | 18.660.000 | 18.660.000 | |
| **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **515.045.000** | **515.045.000** | |
| **2.12.04.2.01** | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **44.919.000** | **44.919.000** | |
| 2.12.04.2.01.01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 6.134.000 | 6.134.000 | |
| 2.12.04.2.01.02 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 38.785.000 | 38.785.000 | |
| **2.12.04.2.03** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **453.481.500** | **453.481.500** | |
| 2.12.04.2.03.03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 412.000.000 | 412.000.000 | |
| 2.12.04.2.03.04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 10.988.500 | 10.988.500 | |
| 2.12.04.2.03.06 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | 22.728.000 | 22.728.000 | |
| 2.12.04.2.03.08 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | 7.765.000 | 7.765.000 | |
| **2.12.04.2.04** | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **16.644.500** | **16.644.500** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.12.04.2.04.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 16.644.500 | 16.644.500 | |
| **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **10.894.000** | **10.894.000** | |
| **2.12.05.2.01** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **10.894.000** | **10.894.000** | |
| 2.12.05.2.01.01 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 10.894.000 | 10.894.000 | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **7.033.431.215** | **7.226.837.218** | |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **7.033.431.215** | **7.226.837.218** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **7.033.431.215** | **7.226.837.218** | |
| **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.484.247.215** | **4.666.047.218** | |
| **2.13.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.000.000** | **10.000.000** | |
| 2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.670.000 | 1.670.000 | |
| 2.13.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.625.000 | 1.625.000 | |
| 2.13.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.225.000 | 1.225.000 | |
| 2.13.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.625.000 | 1.625.000 | |
| 2.13.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.225.000 | 1.225.000 | |
| 2.13.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.360.000 | 1.360.000 | |
| 2.13.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.270.000 | 1.270.000 | |
| **2.13.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.986.236.015** | **4.184.192.018** | |
| 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.897.476.015 | 4.090.882.018 | |
| 2.13.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 88.760.000 | 88.760.000 | |
| 2.13.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 2.050.000 | |
| 2.13.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0 | 2.500.000 | |
| **2.13.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **12.500.000** | |
| 2.13.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 12.500.000 | |
| **2.13.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **234.491.200** | **220.535.200** | |
| 2.13.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.306.000 | 7.306.000 | |
| 2.13.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.145.000 | 13.344.000 | |
| 2.13.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28.088.100 | 28.088.100 | |
| 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.817.100 | 12.631.100 | |
| 2.13.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 0 | 3.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.13.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.000.000 | 12.000.000 | |
| 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160.135.000 | 144.166.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.13.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **61.500.000** | **61.500.000** | |
| 2.13.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 42.000.000 | 42.000.000 | |
| 2.13.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 19.500.000 | 19.500.000 | |
| **2.13.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **141.400.000** | **126.420.000** | |
| 2.13.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.760.000 | 1.760.000 | |
| 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 139.640.000 | 124.660.000 | |
| **2.13.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **50.620.000** | **50.900.000** | |
| 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.620.000 | 5.900.000 | |
| 2.13.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 2.13.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **15.408.500** | **25.608.500** | |
| **2.13.02.2.01** | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **15.408.500** | **25.608.500** | |
| 2.13.02.2.01.04 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 15.408.500 | 15.408.500 | |
| 2.13.02.2.01.06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 0 | 10.200.000 | |
| **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **1.527.770.000** | **1.518.435.000** | |
| **2.13.03.2.01** | **Fasilitasi Kerja Sama antar Desa** | **1.527.770.000** | **1.518.435.000** | |
| 2.13.03.2.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 15.200.000 | 13.665.000 | |
| 2.13.03.2.01.03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1.512.570.000 | 1.504.770.000 | |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **162.105.000** | **186.921.000** | |
| **2.13.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **162.105.000** | **186.921.000** | |
| 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 0 | 26.312.000 | |
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 20.695.000 | 20.695.000 | |
| 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 60.042.000 | 60.042.000 | |
| 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 53.848.000 | 54.872.000 | |
| 2.13.04.2.01.14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 0 | 25.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **843.900.500** | **829.825.500** | |
| **2.13.05.2.01** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah** | **843.900.500** | **829.825.500** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 25.000.000 | 15.925.000 | |
| 2.13.05.2.01.08 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 10.565.000 | 10.565.000 | |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 808.335.500 | 803.335.500 | |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **5.502.960.000** | **5.452.360.000** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **5.502.960.000** | **5.452.360.000** | |
| **2.08.2.14.0.00.01.0000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **5.502.960.000** | **5.452.360.000** | |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **286.800.000** | **226.200.000** | |
| **2.14.02.2.01** | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **28.000.000** | **28.000.000** | |
| 2.14.02.2.01.02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 28.000.000 | 28.000.000 | |
| **2.14.02.2.02** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **258.800.000** | **198.200.000** | |
| 2.14.02.2.02.12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 110.600.000 | 50.000.000 | |
| 2.14.02.2.02.13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 148.200.000 | 148.200.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **2.953.560.000** | **2.953.560.000** | |
| **2.14.03.2.01** | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **1.166.100.000** | **1.166.100.000** | |
| 2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 150.000.000 | 150.000.000 | |
| 2.14.03.2.01.06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 182.000.000 | 182.000.000 | |
| 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 674.100.000 | 674.100.000 | |
| 2.14.03.2.01.08 | Pengendalian Program KKBPK | 160.000.000 | 160.000.000 | |
| **2.14.03.2.02** | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **273.800.000** | **273.800.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 273.800.000 | 273.800.000 | |
| **2.14.03.2.03** | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **1.132.660.000** | **1.132.660.000** | |
| 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 27.900.000 | 27.900.000 | |
| 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 717.794.000 | 717.794.000 | |
| 2.14.03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 369.866.000 | 369.866.000 | |
| 2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 17.100.000 | 17.100.000 | |
| **2.14.03.2.04** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **381.000.000** | **381.000.000** | |
| 2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 381.000.000 | 381.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **2.262.600.000** | **2.272.600.000** | |
| **2.14.04.2.01** | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **2.262.600.000** | **2.272.600.000** | |
| 2.14.04.2.01.02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 360.000.000 | 360.000.000 | |
| 2.14.04.2.01.05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1.902.600.000 | 1.902.600.000 | |
| 2.14.04.2.01.07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0 | 10.000.000 | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **12.695.265.000** | **14.575.265.000** | |
| **1.03.2.10.2.15.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN** | **12.695.265.000** | **14.575.265.000** | |
| **1.03.2.10.2.15.01.0000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN** | **12.695.265.000** | **14.575.265.000** | |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **12.259.975.000** | **13.259.975.000** | |
| **2.15.02.2.01** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **250.000.000** | **250.000.000** | |
| 2.15.02.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 250.000.000 | 250.000.000 | |
| **2.15.02.2.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **10.597.675.000** | **11.597.675.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 9.761.305.000 | 10.761.305.000 | |
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 836.370.000 | 836.370.000 | |
| **2.15.02.2.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **26.690.000** | **26.690.000** | |
| 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | 8.170.000 | 8.170.000 | |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 18.520.000 | 18.520.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.15.02.2.04** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **10.800.000** | **10.800.000** | |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 10.800.000 | 10.800.000 | |
| **2.15.02.2.05** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **908.390.000** | **908.390.000** | |
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 715.350.000 | 715.350.000 | |
| 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| 2.15.02.2.05.03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 3.010.000 | 3.010.000 | |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 46.400.000 | 46.400.000 | |
| 2.15.02.2.05.05 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 11.650.000 | 11.650.000 | |
| 2.15.02.2.05.06 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 4.410.000 | 4.410.000 | |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 71.000.000 | 71.000.000 | |
| 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 9.610.000 | 9.610.000 | |
| 2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 6.960.000 | 6.960.000 | |
| **2.15.02.2.06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **416.410.000** | **416.410.000** | |
| 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 289.480.000 | 289.480.000 | |
| 2.15.02.2.06.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 5.450.000 | 5.450.000 | |
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 110.400.000 | 110.400.000 | |
| 2.15.02.2.06.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 11.080.000 | 11.080.000 | |
| **2.15.02.2.07** | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan** | **50.010.000** | **50.010.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Kabupaten/Kota** | | | |
| 2.15.02.2.07.02 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| 2.15.02.2.07.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 9.610.000 | 9.610.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.15.02.2.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | 10.400.000 | 10.400.000 | |
| **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **435.290.000** | **1.315.290.000** | |
| **2.15.03.2.01** | **Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota** | **8.610.000** | **8.610.000** | |
| 2.15.03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | 8.610.000 | 8.610.000 | |
| **2.15.03.2.02** | **Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **10.580.000** | **10.580.000** | |
| 2.15.03.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | 10.580.000 | 10.580.000 | |
| **2.15.03.2.08** | **Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal** | **26.800.000** | **26.800.000** | |
| 2.15.03.2.08.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | 26.800.000 | 26.800.000 | |
| **2.15.03.2.12** | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | **9.250.000** | **9.250.000** | |
| 2.15.03.2.12.04 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 9.250.000 | 9.250.000 | |
| **2.15.03.2.13** | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau** | **380.050.000** | **1.260.050.000** | |
| 2.15.03.2.13.04 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 13.800.000 | 13.800.000 | |
| 2.15.03.2.13.05 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau | 0 | 880.000.000 | |
| 2.15.03.2.13.06 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | 350.000.000 | 350.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.15.03.2.13.07 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | 16.250.000 | 16.250.000 | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **11.536.936.475** | **11.643.891.624** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN** | **11.536.936.475** | **11.643.891.624** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN** | **11.536.936.475** | **11.643.891.624** | |
| **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.603.373.341** | **5.601.568.490** | |
| **2.16.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.690.000** | **6.690.000** | |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.080.000 | 1.080.000 | |
| 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 930.000 | 930.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.16.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.080.000 | 1.080.000 | |
| 2.16.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 930 | 930 | |
| 2.16.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.020.000 | 1.020.000 | |
| 2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 900.000 | 900.000 | |
| 2.16.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 750 | 750 | |
| **2.16.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.512.582.376** | **4.519.537.525** | |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.374.672.376 | 4.381.627.525 | |
| 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 135.630.000 | 135.630.000 | |
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 930.000 | 930.000 | |
| 2.16.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.350.000 | 1.350.000 | |
| **2.16.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.350.000** | **1.350.000** | |
| 2.16.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 690.000 | 690.000 | |
| 2.16.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 660.000 | 660.000 | |
| **2.16.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **39.000.000** | **39.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 2.16.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 24.000.000 | 24.000.000 | |
| **2.16.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **235.190.965** | **225.630.965** | |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.728.465 | 4.728.465 | |
| 2.16.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.085.500 | 3.085.500 | |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 40.754.000 | 40.754.000 | |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.950.000 | 18.950.000 | |
| 2.16.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 16.000.000 | 16.000.000 | |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 141.673.000 | 142.113.000 | |
| **2.16.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **530.000.000** | **530.850.000** | |
| 2.16.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 530.000.000 | 530.850.000 | |
| **2.16.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **163.410.000** | **163.410.000** | |
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 600.000 | 600.000 | |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 160.060.000 | 160.060.000 | |
| **2.16.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **115.150.000** | **115.100.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 76.000.000 | 76.000.000 | |
| 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.150.000 | 19.150.000 | |
| 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 19.950.000 | |
| **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **369.313.000** | **479.438.236** | |
| **2.16.02.2.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **369.313.000** | **479.438.236** | |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 38.516.000 | 38.516.000 | |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 193.842.000 | 304.567.236 | |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | 13.955.000 | 13.955.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.16.02.2.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 75.000.000 | 75.000.000 | |
| 2.16.02.2.01.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 2.16.02.2.01.13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 43.000.000 | 42.400.000 | |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **5.564.250.134** | **5.562.884.898** | |
| **2.16.03.2.01** | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **550.650.134** | **550.650.134** | |
| 2.16.03.2.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 540.650.134 | 540.650.134 | |
| **2.16.03.2.02** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **5.013.600.000** | **5.012.234.764** | |
| 2.16.03.2.02.04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 4.544.000.000 | 4.544.000.000 | |
| 2.16.03.2.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 369.600.000 | 368.234.764 | |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **9.355.331.224** | **9.132.947.160** | |
| **2.17.3.31.3.30.01.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **9.355.331.224** | **9.132.947.160** | |
| **2.17.3.31.3.30.01.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **9.355.331.224** | **9.132.947.160** | |
| **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.673.095.024** | **7.140.854.387** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **2.17.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.664.600** | **8.664.600** | |
| 2.17.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 610.000 | 610.000 | |
| 2.17.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.190.000 | 3.190.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.17.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.110.000 | 2.110.000 | |
| 2.17.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 576 | 576 | |
| 2.17.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 576.000 | 576.000 | |
| 2.17.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.057.600 | 1.057.600 | |
| 2.17.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 545 | 545 | |
| **2.17.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.657.949.824** | **5.011.404.325** | |
| 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.480.869.824 | 4.834.324.325 | |
| 2.17.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 175.560.000 | 175.560.000 | |
| 2.17.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.520.000 | 1.520.000 | |
| **2.17.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **2.965.000** | **2.965.000** | |
| 2.17.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.356.000 | 1.356.000 | |
| 2.17.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.609.000 | 1.609.000 | |
| **2.17.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **17.749.500** | **17.749.500** | |
| 2.17.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 14.985.000 | 14.985.000 | |
| 2.17.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 771.000 | 771.000 | |
| 2.17.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 889.500 | 889.500 | |
| 2.17.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1.104.000 | 1.104.000 | |
| **2.17.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **373.806.100** | **420.686.100** | |
| 2.17.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.515.000 | 10.515.000 | |
| 2.17.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.061.100 | 70.061.100 | |
| 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| 2.17.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 67.000.000 | 67.000.000 | |
| 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 180.230.000 | 243.110.000 | |
| **2.17.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.571.960.000** | **1.594.820.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.17.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.440.000 | 5.200.000 | |
| 2.17.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.566.520.000 | 1.589.620.000 | |
| **2.17.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **40.000.000** | **84.564.862** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.000.000 | 64.564.862 | |
| 2.17.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **2.701.500** | **2.701.500** | |
| **2.17.02.2.01** | **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **2.701.500** | **2.701.500** | |
| 2.17.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.701.500 | 2.701.500 | |
| **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **11.223.500** | **11.223.500** | |
| **2.17.03.2.01** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **11.223.500** | **11.223.500** | |
| 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 7.103.500 | 7.103.500 | |
| 2.17.03.2.01.02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 4.120.000 | 4.120.000 | |
| **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **21.592.000** | **21.592.000** | |
| **2.17.04.2.01** | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **21.592.000** | **21.592.000** | |
| 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 8.057.500 | 8.057.500 | |
| 2.17.04.2.01.02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 13.534.500 | 13.534.500 | |
| **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **231.153.500** | **231.153.500** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.17.05.2.01** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **231.153.500** | **231.153.500** | |
| 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 231.153.500 | 231.153.500 | |
| **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **30.520.000** | **74.585.138** | |
| **2.17.06.2.01** | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **30.520.000** | **74.585.138** | |
| 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.520.000 | 74.585.138 | |
| **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA** | **286.430.050** | **578.721.450** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **MIKRO (UMKM)** | | | |
| **2.17.07.2.01** | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **286.430.050** | **578.721.450** | |
| 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 8.760.000 | 304.451.400 | |
| 2.17.07.2.01.02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | 67.485.050 | 64.085.050 | |
| 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 210.185.000 | 210.185.000 | |
| **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **1.098.615.650** | **1.072.115.685** | |
| **2.17.08.2.01** | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **1.098.615.650** | **1.072.115.685** | |
| 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1.098.615.650 | 1.072.115.685 | |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **9.242.775.629** | **9.064.553.117** | |
| **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN** | **9.242.775.629** | **9.064.553.117** | |
| **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN** | **9.242.775.629** | **9.064.553.117** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **8.555.737.629** | **8.378.165.117** | |
| **2.18.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **24.905.000** | **32.025.000** | |
| 2.18.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.886.000 | 4.430.000 | |
| 2.18.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 4.140.000 | 4.140.000 | |
| 2.18.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.760.000 | 2.760.000 | |
| 2.18.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.280.000 | 2.280.000 | |
| 2.18.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.540.000 | 2.540.000 | |
| 2.18.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.847.000 | 7.747.000 | |
| 2.18.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.452.000 | 8.128.000 | |
| **2.18.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.730.408.160** | **6.583.245.648** | |
| 2.18.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.574.769.860 | 6.402.997.348 | |
| 2.18.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 148.200.000 | 162.720.000 | |
| 2.18.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.970.000 | 3.970.000 | |
| 2.18.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.468.300 | 13.558.300 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **2.18.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.555.000** | **1.555.000** | |
| 2.18.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.555.000 | 1.555.000 | |
| **2.18.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **189.949.700** | **199.999.700** | |
| 2.18.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 115.000.000 | 114.900.000 | |
| 2.18.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 67.100.000 | 67.100.000 | |
| 2.18.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 | 10.150.000 | |
| 2.18.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 7.849.700 | 7.849.700 | |
| **2.18.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **525.119.500** | **714.059.500** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.18.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 65.574.000 | 65.574.000 | |
| 2.18.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 231.745.500 | 231.745.500 | |
| 2.18.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.450.000 | 11.450.000 | |
| 2.18.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 90.000.000 | 90.000.000 | |
| 2.18.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 116.350.000 | 315.290.000 | |
| **2.18.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **266.400.000** | **240.550.000** | |
| 2.18.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 266.400.000 | 240.550.000 | |
| **2.18.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **653.900.000** | **593.975.000** | |
| 2.18.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 21.250.000 | 21.245.000 | |
| 2.18.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 264.000.000 | 264.000.000 | |
| 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 359.050.000 | 308.730.000 | |
| **2.18.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **163.500.269** | **12.755.269** | |
| 2.18.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 68.210.269 | 12.755.269 | |
| **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **2.18.02.2.02** | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 2.18.02.2.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **40.000.000** | **40.000.000** | |
| **2.18.03.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **40.000.000** | **40.000.000** | |
| 2.18.03.2.01.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **153.481.000** | **152.831.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **2.18.04.2.01** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **153.481.000** | **152.831.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 52.975.000 | 52.975.000 | |
| 2.18.04.2.01.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 38.850.000 | 38.200.000 | |
| 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 61.656.000 | 61.656.000 | |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **386.000.000** | **386.000.000** | |
| **2.18.05.2.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **386.000.000** | **386.000.000** | |
| 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 286.558.200 | 286.558.200 | |
| 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 99.441.800 | 99.441.800 | |
| **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **47.557.000** | **47.557.000** | |
| **2.18.06.2.01** | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **47.557.000** | **47.557.000** | |
| 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 47.557.000 | 47.557.000 | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **4.643.545.000** | **5.324.042.609** | |
| **3.26.2.19.0.00.01.0000** | **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA** | **4.643.545.000** | **5.324.042.609** | |
| **3.26.2.19.0.00.01.0000** | **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA** | **4.643.545.000** | **5.324.042.609** | |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **720.925.000** | **746.375.000** | |
| **2.19.02.2.01** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **241.125.000** | **266.575.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.19.02.2.01.04 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | 241.125.000 | 266.575.000 | |
| **2.19.02.2.02** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **479.800.000** | **479.800.000** | |
| 2.19.02.2.02.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi | 54.800.000 | 54.800.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | | | |
| 2.19.02.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 425.000.000 | 425.000.000 | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **3.102.620.000** | **3.007.366.000** | |
| **2.19.03.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **96.940.000** | **96.940.000** | |
| 2.19.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 96.940.000 | 96.940.000 | |
| **2.19.03.2.02** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **92.500.000** | **82.500.000** | |
| 2.19.03.2.02.01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 92.500.000 | 82.500.000 | |
| **2.19.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **161.000.000** | **48.000.000** | |
| 2.19.03.2.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 161.000.000 | 48.000.000 | |
| **2.19.03.2.04** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **2.517.680.000** | **2.604.926.000** | |
| 2.19.03.2.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 2.517.680.000 | 2.604.926.000 | |
| **2.19.03.2.05** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **234.500.000** | **175.000.000** | |
| 2.19.03.2.05.02 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 22.000.000 | 22.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.19.03.2.05.03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 27.500.000 | 18.000.000 | |
| 2.19.03.2.05.04 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 165.000.000 | 115.000.000 | |
| 2.19.03.2.05.05 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **820.000.000** | **1.570.301.609** | |
| **2.19.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **820.000.000** | **1.570.301.609** | |
| 2.19.04.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | 11.000.000 | 12.000.000 | |
| 2.19.04.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 729.000.000 | 729.000.000 | |
| 2.19.04.2.01.05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 80.000.000 | 96.000.000 | |
| 2.19.04.2.01.07 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | 0 | 733.301.609 | |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **73.468.000** | **73.468.000** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN** | **73.468.000** | **73.468.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN** | **73.468.000** | **73.468.000** | |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **73.468.000** | **73.468.000** | |
| **2.20.02.2.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **73.468.000** | **73.468.000** | |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 51.684.000 | 51.684.000 | |
| 2.20.02.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 21.784.000 | 21.784.000 | |
| **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **49.122.000** | **49.122.000** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN** | **49.122.000** | **49.122.000** | |
| **2.16.2.20.2.21.01.0000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN** | **49.122.000** | **49.122.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **49.122.000** | **49.122.000** | |
| **2.21.02.2.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **30.156.000** | **30.156.000** | |
| 2.21.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 30.156.000 | 30.156.000 | |
| **2.21.02.2.02** | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **18.966.000** | **18.966.000** | |
| 2.21.02.2.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 18.966.000 | 18.966.000 | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **4.039.901.000** | **4.039.901.000** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **4.039.901.000** | **4.039.901.000** | |
| **1.01.2.22.0.00.01.0000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | **4.039.901.000** | **4.039.901.000** | |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **462.750.000** | **462.750.000** | |
| **2.22.02.2.01** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **170.200.000** | **170.200.000** | |
| 2.22.02.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 170.200.000 | 170.200.000 | |
| **2.22.02.2.02** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **169.700.000** | **169.700.000** | |
| 2.22.02.2.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 150.350.000 | 150.350.000 | |
| 2.22.02.2.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 19.350.000 | 19.350.000 | |
| **2.22.02.2.03** | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **122.850.000** | **122.850.000** | |
| 2.22.02.2.03.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | 122.850.000 | 122.850.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **138.450.000** | **138.450.000** | |
| **2.22.03.2.01** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **138.450.000** | **138.450.000** | |
| 2.22.03.2.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 81.500.000 | 81.500.000 | |
| 2.22.03.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga | 56.950.000 | 56.950.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kesenian Tradisional | | | |
| **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **23.925.000** | **23.925.000** | |
| **2.22.04.2.01** | **Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **23.925.000** | **23.925.000** | |
| 2.22.04.2.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | 23.925.000 | 23.925.000 | |
| **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **2.290.276.000** | **2.290.276.000** | |
| **2.22.05.2.01** | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **190.276.000** | **190.276.000** | |
| 2.22.05.2.01.01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 13.655.000 | 13.655.000 | |
| 2.22.05.2.01.02 | Penetapan Cagar Budaya | 176.621.000 | 176.621.000 | |
| **2.22.05.2.02** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **2.100.000.000** | **2.100.000.000** | |
| 2.22.05.2.02.02 | Pengembangan Cagar Budaya | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | |
| **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **1.124.500.000** | **1.124.500.000** | |
| **2.22.06.2.01** | **Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota** | **1.124.500.000** | **1.124.500.000** | |
| 2.22.06.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 265.850.000 | 265.850.000 | |
| 2.22.06.2.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 446.050.000 | 446.050.000 | |
| 2.22.06.2.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 88.100.000 | 88.100.000 | |
| 2.22.06.2.01.05 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | 324.500.000 | 324.500.000 | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **6.262.241.391** | **6.282.230.944** | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | **6.262.241.391** | **6.282.230.944** | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | **6.262.241.391** | **6.282.230.944** | |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.752.436.391** | **5.708.345.944** | |
| **2.23.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.020.000** | **8.020.000** | |
| 2.23.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.005.000 | 2.005.000 | |
| 2.23.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.005.000 | 2.005.000 | |
| 2.23.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.040.000 | 1.040.000 | |
| 2.23.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.005.000 | 2.005.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.23.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 965 | 965 | |
| **2.23.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.432.216.923** | **4.297.226.476** | |
| 2.23.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.308.926.923 | 4.173.936.476 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 2.23.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 119.290.000 | 119.290.000 | |
| 2.23.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| **2.23.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **211.249.468** | **328.169.468** | |
| 2.23.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000 | 8.500.000 | |
| 2.23.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 47.068.568 | 47.068.568 | |
| 2.23.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.262.900 | 28.082.900 | |
| 2.23.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 16.740.000 | 107.780.000 | |
| 2.23.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 123.178.000 | 136.738.000 | |
| **2.23.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **815.400.000** | **815.400.000** | |
| 2.23.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 184.900.000 | 184.900.000 | |
| 2.23.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 157.500.000 | 175.400.000 | |
| 2.23.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.000.000 | 35.000.000 | |
| 2.23.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 438.000.000 | 420.100.000 | |
| **2.23.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **260.550.000** | **234.530.000** | |
| 2.23.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 650 | 650 | |
| 2.23.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.000.000 | 18.000.000 | |
| 2.23.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.500.000 | 26.700.000 | |
| 2.23.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 228.400.000 | 189.180.000 | |
| **2.23.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **25.000.000** | **25.000.000** | |
| 2.23.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 2.23.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **489.805.000** | **573.885.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.23.02.2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **328.250.000** | **405.970.000** | |
| 2.23.02.2.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 5.500.000 | 5.500.000 | |
| 2.23.02.2.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 6.600.000 | 10.670.000 | |
| 2.23.02.2.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 55.750.000 | 45.320.000 | |
| 2.23.02.2.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 31.400.000 | 115.480.000 | |
| 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 229.000.000 | 229.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **2.23.02.2.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **161.555.000** | **167.915.000** | |
| 2.23.02.2.02.01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 32.190.000 | 32.190.000 | |
| 2.23.02.2.02.03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 84.175.000 | 84.175.000 | |
| 2.23.02.2.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 45.190.000 | 51.550.000 | |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **136.450.000** | **131.470.000** | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | **136.450.000** | **131.470.000** | |
| **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | **136.450.000** | **131.470.000** | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **70.850.000** | **70.850.000** | |
| **2.24.02.2.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **8.780.000** | **8.780.000** | |
| 2.24.02.2.01.01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 7.080.000 | 7.080.000 | |
| 2.24.02.2.01.02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 1.700.000 | 1.700.000 | |
| **2.24.02.2.02** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **12.820.000** | **12.820.000** | |
| 2.24.02.2.02.01 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | 12.820.000 | 12.820.000 | |
| **2.24.02.2.03** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **49.250.000** | **49.250.000** | |
| 2.24.02.2.03.01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 26.400.000 | 26.400.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.24.02.2.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 22.850.000 | 22.850.000 | |
| **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **38.140.000** | **33.160.000** | |
| **2.24.03.2.01** | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun** | **9.440.000** | **9.440.000** | |
| 2.24.03.2.01.01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 9.440.000 | 9.440.000 | |
| **2.24.03.2.04** | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | **28.700.000** | **23.720.000** | |
| 2.24.03.2.04.01 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 28.700.000 | 23.720.000 | |
| **2.24.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **27.460.000** | **27.460.000** | |
| **2.24.04.2.01** | **Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota** | **27.460.000** | **27.460.000** | |
| 2.24.04.2.01.02 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 27.460.000 | 27.460.000 | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **18.706.031.761** | **18.975.247.058** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PERIKANAN DAERAH** | **18.706.031.761** | **18.975.247.058** | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0000** | **DINAS PERIKANAN DAERAH** | **18.624.631.761** | **18.903.847.058** | |
| **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.972.757.241** | **6.072.972.538** | |
| **3.25.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.118.477.941** | **5.207.573.238** | |
| 3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.960.737.941 | 5.059.953.238 | |
| 3.25.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 157.740.000 | 147.620.000 | |
| **3.25.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **8.750.000** | **8.750.000** | |
| 3.25.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 8.750.000 | 8.750.000 | |
| **3.25.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **360.336.300** | **379.456.300** | |
| 3.25.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.316.500 | 6.316.500 | |
| 3.25.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.798.000 | 6.798.000 | |
| 3.25.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 80.960.300 | 80.960.300 | |
| 3.25.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan | 14.551.500 | 14.551.500 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penggandaan | | | |
| 3.25.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 231.710.000 | 260.830.000 | |
| **3.25.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **105.713.000** | **96.713.000** | |
| 3.25.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 30.337.000 | 30.337.000 | |
| 3.25.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 75.376.000 | 66.376.000 | |
| **3.25.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **324.480.000** | **340.480.000** | |
| 3.25.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.680.000 | 4.680.000 | |
| 3.25.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 295.800.000 | 335.800.000 | |
| **3.25.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **55.000.000** | **40.000.000** | |
| 3.25.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 3.25.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 3.25.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 5.000.000 | |
| **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **3.388.800.000** | **3.424.200.000** | |
| **3.25.03.2.01** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **3.329.800.000** | **3.365.200.000** | |
| 3.25.03.2.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 2.675.000.000 | 2.710.400.000 | |
| 3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 654.800.000 | 654.800.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **3.25.03.2.02** | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **59.000.000** | **59.000.000** | |
| 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 3.25.03.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 44.000.000 | 44.000.000 | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **7.542.824.520** | **7.686.424.520** | |
| **3.25.04.2.02** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **130.200.000** | **130.200.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.25.04.2.02.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 130.200.000 | 130.200.000 | |
| **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **7.412.624.520** | **7.556.224.520** | |
| 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.893.893.520 | 1.913.893.520 | |
| 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.518.731.000 | 5.642.331.000 | |
| **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **1.720.250.000** | **1.720.250.000** | |
| **3.25.06.2.01** | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | **46.200.000** | **46.200.000** | |
| 3.25.06.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 46.200.000 | 46.200.000 | |
| **3.25.06.2.02** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **13.950.000** | **13.950.000** | |
| 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 13.950.000 | 13.950.000 | |
| **3.25.06.2.03** | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **1.660.100.000** | **1.660.100.000** | |
| 3.25.06.2.03.01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 22.300.000 | 22.300.000 | |
| 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.637.800.000 | 1.637.800.000 | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0001** | **UPTD Tempat Pelelangan Ikan** | **30.000.000** | **20.000.000** | |
| **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **30.000.000** | **20.000.000** | |
| **3.25.03.2.03** | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | **30.000.000** | **20.000.000** | |
| 3.25.03.2.03.02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 30.000.000 | 20.000.000 | |
| **3.25.0.00.0.00.01.0002** | **UPTD Balai Benih Ikan** | **51.400.000** | **51.400.000** | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **51.400.000** | **51.400.000** | |
| **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **51.400.000** | **51.400.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.25.04.2.04.06 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 51.400.000 | 51.400.000 | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **11.888.609.609** | **15.387.710.152** | |
| **3.26.2.19.0.00.01.0000** | **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA** | **11.888.609.609** | **15.387.710.152** | |
| **3.26.2.19.0.00.01.0000** | **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA** | **11.888.609.609** | **15.387.710.152** | |
| **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **8.542.824.109** | **7.935.552.236** | |
| **3.26.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.000.000** | **10.000.000** | |
| 3.26.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 750.000 | 750.000 | |
| 3.26.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 750.000 | 750.000 | |
| 3.26.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 750.000 | 750.000 | |
| 3.26.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 900 | 900 | |
| 3.26.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 975.000 | 975.000 | |
| 3.26.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.900.000 | 4.900.000 | |
| 3.26.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 975 | 975 | |
| **3.26.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.533.746.521** | **6.907.913.764** | |
| 3.26.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.367.506.521 | 6.741.673.764 | |
| 3.26.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 164.300.000 | 164.300.000 | |
| 3.26.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.940.000 | 1.940.000 | |
| **3.26.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **381.153.850** | **391.703.750** | |
| 3.26.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.550.750 | 28.550.750 | |
| 3.26.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 122.183.100 | 126.503.000 | |
| 3.26.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.550.000 | 22.850.000 | |
| 3.26.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 27.500.000 | 15.000.000 | |
| 3.26.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 146.870.000 | 169.800.000 | |
| 3.26.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 27.500.000 | 29.000.000 | |
| **3.26.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **46.023.738** | **46.023.738** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.26.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 46.023.738 | 46.023.738 | |
| **3.26.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **493.900.000** | **494.800.000** | |
| 3.26.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14.750.000 | 15.000.000 | |
| 3.26.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 479.150.000 | 479.800.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **3.26.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **78.000.000** | **85.110.984** | |
| 3.26.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.000.000 | 35.110.984 | |
| 3.26.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **2.019.826.500** | **6.250.073.300** | |
| **3.26.02.2.02** | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **720.990.000** | **764.794.000** | |
| 3.26.02.2.02.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 720.990.000 | 764.794.000 | |
| **3.26.02.2.03** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **1.298.836.500** | **5.485.279.300** | |
| 3.26.02.2.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.298.836.500 | 5.485.279.300 | |
| **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **710.758.500** | **586.884.116** | |
| **3.26.03.2.01** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **710.758.500** | **586.884.116** | |
| 3.26.03.2.01.01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 36.500.000 | 33.000.000 | |
| 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 674.258.500 | 553.884.116 | |
| **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **30.000.000** | **30.000.000** | |
| **3.26.04.2.01** | **Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota** | **30.000.000** | **30.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.26.04.2.01.01 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana<br>Kota Kreatif | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **585.200.500** | **585.200.500** | |
| **3.26.05.2.01** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **535.639.500** | **535.639.500** | |
| 3.26.05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam<br>Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 251.889.500 | 251.889.500 | |
| 3.26.05.2.01.06 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber<br>Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 283.750.000 | 283.750.000 | |
| **3.26.05.2.02** | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi<br>Kreatif** | **49.561.000** | **49.561.000** | |
| 3.26.05.2.02.01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 49.561.000 | 49.561.000 | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **28.614.325.041** | **29.238.681.417** | |
| **3.27.2.09.0.00.01.0000** | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH** | **28.614.325.041** | **29.238.681.417** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **3.27.2.09.0.00.01.0000** | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH** | **28.614.325.041** | **29.238.681.417** | |
| **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **17.313.216.541** | **18.562.408.594** | |
| **3.27.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah** | **9.185.000** | **13.062.200** | |
| 3.27.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah | 2.235.000 | 2.235.000 | |
| 3.27.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 540.000 | 540.000 | |
| 3.27.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 525.000 | 525.000 | |
| 3.27.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 495 | 495 | |
| 3.27.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 450.000 | 450.000 | |
| 3.27.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.250.000 | 8.120.000 | |
| 3.27.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 690 | 697.2 | |
| **3.27.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **16.222.976.598** | **16.818.156.251** | |
| 3.27.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.012.436.598 | 16.607.616.251 | |
| 3.27.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 208.770.000 | 208.770.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.27.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 945.000 | 945.000 | |
| 3.27.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 825.000 | 825.000 | |
| **3.27.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **150.000** | **150.000** | |
| 3.27.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 150.000 | 150.000 | |
| **3.27.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **350.174.943** | **369.179.943** | |
| 3.27.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.261.043 | 32.261.043 | |
| 3.27.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.161.000 | 3.161.000 | |
| 3.27.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.339.500 | 16.339.500 | |
| 3.27.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.357.300 | 44.357.300 | |
| 3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.502.100 | 14.502.100 | |
| 3.27.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.000.000 | 14.005.000 | |
| 3.27.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 244.554.000 | 244.554.000 | |
| **3.27.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **54.000.000** | **681.530.200** | |
| 3.27.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 27.000.000 | 93.000.000 | |
| 3.27.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.000.000 | 286.550.000 | |
| 3.27.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 301.980.200 | |
| **3.27.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** | **595.580.000** | **595.580.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **Pemerintahan Daerah** | | | |
| 3.27.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| 3.27.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 586.580.000 | 586.580.000 | |
| **3.27.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **81.150.000** | **84.750.000** | |
| 3.27.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 64.000.000 | 66.800.000 | |
| 3.27.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.150.000 | 17.950.000 | |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **3.618.539.900** | **3.752.802.900** | |
| **3.27.02.2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana** | **3.143.408.550** | **3.298.408.550** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Pertanian** | | | |
| 3.27.02.2.01.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 3.113.865.200 | 3.281.615.200 | |
| 3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 29.543.350 | 16.793.350 | |
| **3.27.02.2.02** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **172.766.700** | **162.766.700** | |
| 3.27.02.2.02.02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 172.766.700 | 162.766.700 | |
| **3.27.02.2.05** | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **149.088.000** | **147.351.000** | |
| 3.27.02.2.05.01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | 149.088.000 | 147.351.000 | |
| **3.27.02.2.06** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **153.276.650** | **144.276.650** | |
| 3.27.02.2.06.01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 153.276.650 | 144.276.650 | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **2.458.745.500** | **2.667.627.000** | |
| **3.27.03.2.01** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **308.720.000** | **150.000.000** | |
| 3.27.03.2.01.02 | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 150.000.000 | 150.000.000 | |
| **3.27.03.2.02** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **2.150.025.500** | **2.188.925.500** | |
| 3.27.03.2.02.03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 0 | 188.900.000 | |
| 3.27.03.2.02.08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | 483.905.500 | 483.905.500 | |
| 3.27.03.2.02.09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 1.666.120.000 | 1.516.120.000 | |
| **3.27.03.2.03** | **Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **0** | **328.701.500** | |
| 3.27.03.2.03.01 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | 0 | 328.701.500 | |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT** | **591.875.700** | **516.675.700** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **VETERINER** | | | |
| **3.27.04.2.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **530.536.700** | **455.336.700** | |
| 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 150.575.000 | 150.575.000 | |
| 3.27.04.2.01.02 | Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 122.650.000 | 72.650.000 | |
| 3.27.04.2.01.03 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | 257.311.700 | 232.111.700 | |
| **3.27.04.2.02** | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | **3.000.000** | **3.000.000** | |
| 3.27.04.2.02.01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| **3.27.04.2.03** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **24.000.000** | **24.000.000** | |
| 3.27.04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 24.000.000 | 24.000.000 | |
| **3.27.04.2.04** | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **34.339.000** | **34.339.000** | |
| 3.27.04.2.04.01 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 24.959.000 | 24.959.000 | |
| 3.27.04.2.04.02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 9.380.000 | 9.380.000 | |
| **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **1.350.969.300** | **432.211.500** | |
| **3.27.05.2.01** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **1.350.969.300** | **432.211.500** | |
| 3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 1.221.345.800 | 347.244.000 | |
| 3.27.05.2.01.02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 76.756.400 | 28.880.400 | |
| 3.27.05.2.01.03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 52.867.100 | 56.087.100 | |
| **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **7.076.000** | **7.076.000** | |
| **3.27.06.2.02** | **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan** | **7.076.000** | **7.076.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.27.06.2.02.02 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | 7.076.000 | 7.076.000 | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **3.273.902.100** | **3.299.879.723** | |
| **3.27.07.2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **3.273.902.100** | **3.299.879.723** | |
| 3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 177.365.000 | 177.365.000 | |
| 3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 69.394.500 | 95.372.123 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 3.27.07.2.01.03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 3.027.142.600 | 3.027.142.600 | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **1.498.201.300** | **847.621.300** | |
| **2.17.3.31.3.30.01.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **1.498.201.300** | **847.621.300** | |
| **2.17.3.31.3.30.01.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **1.498.201.300** | **847.621.300** | |
| **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **1.387.760.000** | **739.760.000** | |
| **3.30.03.2.01** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **1.387.760.000** | **739.760.000** | |
| 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.387.760.000 | 739.760.000 | |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **12.530.000** | **12.530.000** | |
| **3.30.04.2.02** | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **7.384.000** | **7.384.000** | |
| 3.30.04.2.02.02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 7.384.000 | 7.384.000 | |
| **3.30.04.2.03** | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **5.146.000** | **5.146.000** | |
| 3.30.04.2.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 5.146.000 | 5.146.000 | |
| **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **15.459.000** | **14.599.000** | |
| **3.30.05.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **15.459.000** | **14.599.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.30.05.2.01.01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk<br>Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | 3.075.000 | 3.075.000 | |
| 3.30.05.2.01.06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | 12.384.000 | 11.524.000 | |
| **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **82.452.300** | **80.732.300** | |
| **3.30.06.2.01** | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **82.452.300** | **80.732.300** | |
| 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera<br>Ulang | 70.452.500 | 70.452.500 | |
| 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 11.999.800 | 10.279.800 | |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **593.394.500** | **3.674.884.948** | |
| **2.17.3.31.3.30.01.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **593.394.500** | **3.674.884.948** | |
| **2.17.3.31.3.30.01.0000** | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | **593.394.500** | **3.674.884.948** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **593.394.500** | **3.650.943.948** | |
| **3.31.02.2.01** | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **593.394.500** | **3.650.943.948** | |
| 3.31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 593.394.500 | 619.453.500 | |
| 3.31.02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 0 | 3.031.490.448 | |
| **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **0** | **23.941.000** | |
| **3.31.04.2.01** | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | **0** | **23.941.000** | |
| 3.31.04.2.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 0 | 23.941.000 | |
| **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | **13.100.000** | **5.600.000** | |
| **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN** | **13.100.000** | **5.600.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN** | **13.100.000** | **5.600.000** | |
| **3.32.02** | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **13.100.000** | **5.600.000** | |
| **3.32.02.2.01** | **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi** | **13.100.000** | **5.600.000** | |
| 3.32.02.2.01.01 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | 13.100.000 | 5.600.000 | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **38.756.919.731** | **39.421.360.928** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **38.756.919.731** | **39.421.360.928** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **38.756.919.731** | **39.421.360.928** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **32.367.104.931** | **33.192.176.709** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **14.775.000** | **14.775.000** | |
| 4.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.875.000 | 3.875.000 | |
| 4.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.725.000 | 3.725.000 | |
| 4.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.725.000 | 3.725.000 | |
| 4.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.725.000 | 1.725.000 | |
| 4.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.725.000 | 1.725.000 | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **13.872.575.669** | **14.513.852.447** | |
| 4.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.481.755.669 | 14.123.032.447 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 4.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 383.520.000 | 383.520.000 | |
| 4.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.525.000 | 3.525.000 | |
| 4.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.775.000 | 3.775.000 | |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **302.582.000** | **354.082.000** | |
| 4.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 302.582.000 | 354.082.000 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **3.993.922.938** | **4.186.489.400** | |
| 4.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 247.562.438 | 292.659.000 | |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 62.720.500 | 86.390.400 | |
| 4.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.811.400.000 | 1.780.200.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.872.240.000 | 2.027.240.000 | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.188.100.000** | **1.323.716.538** | |
| 4.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 305.000.000 | 497.000.000 | |
| 4.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 883.100.000 | 826.716.538 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.032.180.000** | **2.864.650.000** | |
| 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 124.800.000 | 124.800.000 | |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60.000.000 | 20.000.000 | |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.847.380.000 | 2.719.850.000 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.025.000.000** | **1.068.000.000** | |
| 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 575.000.000 | 638.000.000 | |
| 4.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 450.000.000 | 430.000.000 | |
| **4.01.01.2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **1.446.489.324** | **1.446.489.324** | |
| 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 159.539.324 | 159.539.324 | |
| 4.01.01.2.11.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 434.950.000 | 434.950.000 | |
| 4.01.01.2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 252.000.000 | 252.000.000 | |
| 4.01.01.2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 600.000.000 | 600.000.000 | |
| **4.01.01.2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **1.860.000.000** | **1.860.000.000** | |
| 4.01.01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 900.000.000 | 900.000.000 | |
| 4.01.01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil | 720.000.000 | 720.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Kepala Daerah | | | |
| 4.01.01.2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 240.000.000 | 240.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **396.780.000** | **396.772.000** | |
| 4.01.01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 75.750.000 | 84.000.000 | |
| 4.01.01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 51.807.000 | 48.000.000 | |
| 4.01.01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 241.026.000 | 248.142.000 | |
| 4.01.01.2.13.04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 11.747.000 | 8.000.000 | |
| 4.01.01.2.13.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 16.450.000 | 8.630.000 | |
| **4.01.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **5.234.700.000** | **5.163.350.000** | |
| 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | 1.188.700.000 | 1.143.700.000 | |
| 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| 4.01.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 4.038.500.000 | 4.012.150.000 | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **3.058.787.900** | **2.874.992.900** | |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **536.479.900** | **536.444.900** | |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 62.170.000 | 62.135.000 | |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 204.550.000 | 204.550.000 | |
| 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 269.759.900 | 269.759.900 | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **2.216.018.000** | **2.032.258.000** | |
| 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1.365.200.000 | 1.271.600.000 | |
| 4.01.02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 814.518.000 | 724.358.000 | |
| 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 36.300.000 | 36.300.000 | |
| **4.01.02.2.03** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **306.290.000** | **306.290.000** | |
| 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 27.710.000 | 27.710.000 | |
| 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 239.380.000 | 239.380.000 | |
| 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 39.200.000 | 39.200.000 | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **3.331.026.900** | **3.354.191.319** | |
| **4.01.03.2.01** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **284.700.000** | **307.864.419** | |
| 4.01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 228.300.000 | 228.300.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.01.03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 44.400.000 | 67.564.419 | |
| **4.01.03.2.02** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **167.290.000** | **167.290.000** | |
| 4.01.03.2.02.01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 106.700.000 | 48.840.000 | |
| 4.01.03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 35.000.000 | 63.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 4.01.03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 25.590.000 | 55.450.000 | |
| **4.01.03.2.03** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **2.879.036.900** | **2.879.036.900** | |
| 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 2.633.550.000 | 2.633.550.000 | |
| 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 52.532.000 | 52.532.000 | |
| 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 192.954.900 | 192.954.900 | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **38.380.800.920** | **38.736.111.165** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DPRD** | **38.380.800.920** | **38.736.111.165** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **SEKRETARIAT DPRD** | **38.380.800.920** | **38.736.111.165** | |
| **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **26.174.228.920** | **26.051.549.165** | |
| **4.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **24.411.000** | **20.000.000** | |
| 4.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000 | 2.800.000 | |
| 4.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.500.000 | 3.000.000 | |
| 4.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.500.000 | 2.800.000 | |
| 4.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.500.000 | 3.000.000 | |
| 4.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.500.000 | 3.000.000 | |
| 4.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.383.000 | 2.600.000 | |
| 4.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.528.000 | 2.800.000 | |
| **4.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.545.127.781** | **4.400.438.026** | |
| 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.377.897.781 | 4.233.208.026 | |
| 4.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 147.730.000 | 147.730.000 | |
| 4.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.500.000 | 5.500.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 14.000.000 | 14.000.000 | |
| **4.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.973.164.125** | **1.924.598.125** | |
| 4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.511.625 | 11.511.625 | |
| 4.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| 4.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.435.000 | 20.435.000 | |
| 4.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 397.087.500 | 414.351.500 | |
| 4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 475.050.000 | 385.550.000 | |
| 4.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 57.500.000 | 57.500.000 | |
| 4.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 138.900.000 | 148.500.000 | |
| 4.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 340.708.000 | 328.388.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 4.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 501.972.000 | 528.362.000 | |
| **4.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **117.000.000** | **334.500.000** | |
| 4.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 4.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 67.000.000 | 99.500.000 | |
| 4.02.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 185.000.000 | |
| **4.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **673.000.000** | **737.510.000** | |
| 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 23.000.000 | 23.000.000 | |
| 4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 72.000.000 | 72.000.000 | |
| 4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 578.000.000 | 642.510.000 | |
| **4.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **861.929.232** | **872.906.232** | |
| 4.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 296.000.000 | 296.000.000 | |
| 4.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 148.000.000 | 148.000.000 | |
| 4.02.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| 4.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 135.000.000 | 155.000.000 | |
| 4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | 191.500.000 | 191.500.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Bangunan Lainnya | | | |
| 4.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 84.429.232 | 75.406.232 | |
| **4.02.01.2.15** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **16.065.816.782** | **15.895.816.782** | |
| 4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 15.572.066.782 | 15.572.066.782 | |
| 4.02.01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 393.750.000 | 323.750.000 | |
| **4.02.01.2.16** | **Layanan Administrasi DPRD** | **1.913.780.000** | **1.865.780.000** | |
| 4.02.01.2.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | 3.780.000 | 3.780.000 | |
| 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 110.000.000 | 62.000.000 | |
| 4.02.01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **12.206.572.000** | **12.684.562.000** | |
| **4.02.02.2.01** | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **296.450.000** | **216.450.000** | |
| 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 10.200.000 | 10.200.000 | |
| 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 104.000.000 | 124.000.000 | |
| 4.02.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 32.250.000 | 32.250.000 | |
| 4.02.02.2.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | 150.000.000 | 50.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **4.02.02.2.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **173.000.000** | **175.000.000** | |
| 4.02.02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | 36.400.000 | 36.400.000 | |
| 4.02.02.2.02.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 37.200.000 | 37.200.000 | |
| 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | 37.200.000 | 39.200.000 | |
| 4.02.02.2.02.04 | Pembahasan APBD Perubahan | 37.200.000 | 37.200.000 | |
| 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| **4.02.02.2.03** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **92.875.000** | **103.885.000** | |
| 4.02.02.2.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 13.000.000 | 13.000.000 | |
| 4.02.02.2.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 11.000.000 | 11.000.000 | |
| 4.02.02.2.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang | 11.000.000 | 11.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kesejahteraan Rakyat | | | |
| 4.02.02.2.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 11.000.000 | 11.000.000 | |
| 4.02.02.2.03.05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 11.375.000 | 11.375.000 | |
| 4.02.02.2.03.06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 13.450.000 | 13.450.000 | |
| 4.02.02.2.03.07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 9.500.000 | 20.510.000 | |
| 4.02.02.2.03.08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 12.550.000 | 12.550.000 | |
| **4.02.02.2.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **2.712.105.000** | **2.862.105.000** | |
| 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | 2.488.570.000 | 2.488.570.000 | |
| 4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 17.495.000 | 17.495.000 | |
| 4.02.02.2.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 90.000.000 | 90.000.000 | |
| 4.02.02.2.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 109.200.000 | 109.200.000 | |
| 4.02.02.2.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 6.840.000 | 156.840.000 | |
| **4.02.02.2.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **2.589.500.000** | **3.066.480.000** | |
| 4.02.02.2.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 29.750.000 | 28.730.000 | |
| 4.02.02.2.05.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | 2.554.750.000 | 3.032.750.000 | |
| **4.02.02.2.06** | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **75.300.000** | **73.300.000** | |
| 4.02.02.2.06.02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 73.300.000 | 73.300.000 | |
| **4.02.02.2.07** | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | **440.720.000** | **510.720.000** | |
| 4.02.02.2.07.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 430.720.000 | 510.720.000 | |
| **4.02.02.2.08** | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **5.826.622.000** | **5.676.622.000** | |
| 4.02.02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 5.504.222.000 | 5.504.222.000 | |
| 4.02.02.2.08.02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 6.800.000 | 6.800.000 | |
| 4.02.02.2.08.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 15.600.000 | 15.600.000 | |
| 4.02.02.2.08.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 150.000.000 | 150.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **7.176.940.613** | **6.743.934.359** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **7.176.940.613** | **6.743.934.359** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **7.176.940.613** | **6.743.934.359** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.625.270.218** | **5.107.783.964** | |
| **5.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.700.223.848** | **4.332.367.594** | |
| 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.582.163.848 | 4.214.307.594 | |
| 5.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 115.560.000 | 115.560.000 | |
| 5.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 5.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| **5.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **450.000** | **450.000** | |
| 5.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 450.000 | 450.000 | |
| **5.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **39.936.000** | **39.936.000** | |
| 5.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 39.936.000 | 39.936.000 | |
| **5.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **368.760.370** | **387.787.870** | |
| 5.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.185.670 | 15.185.670 | |
| 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37.501.000 | 37.501.000 | |
| 5.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.746.000 | 2.746.000 | |
| 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 134.937.700 | 145.465.200 | |
| 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.915.000 | 26.915.000 | |
| 5.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.750.000 | 7.750.000 | |
| 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 113.725.000 | 122.225.000 | |
| 5.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| **5.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **37.500.000** | **55.500.000** | |
| 5.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 37.500.000 | 55.500.000 | |
| **5.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **203.400.000** | **174.600.000** | |
| 5.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 21.000.000 | 21.000.000 | |
| 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 181.200.000 | 152.400.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **275.000.000** | **117.142.500** | |
| 5.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20.000.000 | 37.142.500 | |
| 5.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 35.000.000 | 35.000.000 | |
| 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 220.000.000 | 45.000.000 | |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **1.215.851.795** | **1.281.851.795** | |
| **5.01.02.2.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **562.503.000** | **562.503.000** | |
| 5.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 45.374.000 | 44.844.000 | |
| 5.01.02.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 31.640.500 | 31.190.500 | |
| 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 63.869.000 | 52.812.000 | |
| 5.01.02.2.01.06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 68.027.500 | 64.627.500 | |
| 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 353.592.000 | 369.029.000 | |
| **5.01.02.2.02** | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **196.335.000** | **196.335.000** | |
| 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 196.335.000 | 196.335.000 | |
| **5.01.02.2.03** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **386.853.045** | **452.853.045** | |
| 5.01.02.2.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 107.930.000 | 173.930.000 | |
| 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 278.923.045 | 278.923.045 | |
| **5.01.02.2.04** | **Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **70.160.750** | **70.160.750** | |
| 5.01.02.2.04.01 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 11.476.600 | 11.476.600 | |
| 5.01.02.2.04.02 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan | 58.684.150 | 58.684.150 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Daerah | | | |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **335.818.600** | **354.298.600** | |
| **5.01.03.2.01** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **119.392.000** | **137.872.000** | |
| 5.01.03.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 2.767.500 | 2.767.500 | |
| 5.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 11.915.000 | 11.915.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 5.01.03.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 19.387.500 | 19.387.500 | |
| 5.01.03.2.01.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 2.830.250 | 2.830.250 | |
| 5.01.03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 15.575.000 | 15.575.000 | |
| 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 66.916.750 | 85.396.750 | |
| **5.01.03.2.02** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **100.134.500** | **100.134.500** | |
| 5.01.03.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 2.622.500 | 2.622.500 | |
| 5.01.03.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 11.898.000 | 11.898.000 | |
| 5.01.03.2.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 85.614.000 | 85.614.000 | |
| **5.01.03.2.03** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **116.292.100** | **116.292.100** | |
| 5.01.03.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1.733.500 | 1.733.500 | |
| 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 13.620.000 | 13.620.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 43.844.400 | 43.844.400 | |
| 5.01.03.2.03.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 2.026.200 | 2.026.200 | |
| 5.01.03.2.03.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 10.889.000 | 10.889.000 | |
| 5.01.03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 44.179.000 | 44.179.000 | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **219.664.059.573** | **220.943.568.870** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | **207.034.382.307** | **208.127.383.860** | |
| **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | **207.034.382.307** | **208.127.383.860** | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **51.919.311.207** | **53.012.312.760** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **20.000.000** | **20.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.308.400 | 2.308.400 | |
| 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.165.000 | 2.165.000 | |
| 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.930.000 | 2.930.000 | |
| 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.412.000 | 2.412.000 | |
| 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.700.400 | 3.700.400 | |
| 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.734.200 | 3.734.200 | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **24.199.131.013** | **25.292.132.566** | |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.462.209.113 | 24.555.210.666 | |
| 5.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 126.836.600 | 126.836.600 | |
| 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 511.480.000 | 511.480.000 | |
| 5.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 20.782.600 | 20.782.600 | |
| 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 11.593.000 | 11.593.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 53.352.700 | 53.352.700 | |
| 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 11.012.000 | 11.012.000 | |
| 5.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1.865.000 | 1.865.000 | |
| **5.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **45.738.200** | **45.738.200** | |
| 5.02.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 240.000 | 240.000 | |
| 5.02.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 27.253.500 | 27.253.500 | |
| 5.02.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.832.000 | 4.832.000 | |
| 5.02.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.070.500 | 5.070.500 | |
| 5.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.832.000 | 4.832.000 | |
| 5.02.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 3.510.200 | 3.510.200 | |
| **5.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **25.500.000** | **25.500.000** | |
| 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 5.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5.500.000 | 5.500.000 | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **885.505.875** | **885.505.875** | |
| 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.389.875 | 10.389.875 | |
| 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 30.582.500 | 30.582.500 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 110.987.500 | 110.987.500 | |
| 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 127.000.000 | 127.000.000 | |
| 5.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 5.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 96.560.000 | 96.560.000 | |
| 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 499.986.000 | 499.986.000 | |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **331.640.000** | **331.640.000** | |
| 5.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau | 135.600.000 | 135.600.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Lapangan | | | |
| 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 133.040.000 | 133.040.000 | |
| 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 63.000.000 | 63.000.000 | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **23.297.527.738** | **23.297.527.738** | |
| 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 48.053.000 | 48.053.000 | |
| 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21.380.222.338 | 21.380.222.338 | |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.869.252.400 | 1.869.252.400 | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.114.268.381** | **3.114.268.381** | |
| 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.124.908.400 | 2.124.908.400 | |
| 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 810.089.981 | 810.089.981 | |
| 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 47.270.000 | 47.270.000 | |
| 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 132.000.000 | 132.000.000 | |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **152.071.925.600** | **152.071.925.600** | |
| **5.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **443.961.000** | **443.961.000** | |
| 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 14.149.500 | 14.149.500 | |
| 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 14.149.500 | 14.149.500 | |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | 9.866.000 | 9.866.000 | |
| 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 9.866.000 | 9.866.000 | |
| 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | 9.866.000 | 9.866.000 | |
| 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 9.866.000 | 9.866.000 | |
| 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 136.804.000 | 136.804.000 | |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan | 156.904.000 | 156.904.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | |
| 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 20.821.000 | 20.821.000 | |
| 5.02.02.2.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 5.02.02.2.01.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 21.152.000 | 21.152.000 | |
| 5.02.02.2.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 20.517.000 | 20.517.000 | |
| **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **214.636.600** | **214.636.600** | |
| 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 24.728.000 | 24.728.000 | |
| 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 19.830.000 | 19.830.000 | |
| 5.02.02.2.02.04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 36.680.000 | 36.680.000 | |
| 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 78.936.600 | 78.936.600 | |
| 5.02.02.2.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 10.990.000 | 10.990.000 | |
| 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 25.292.000 | 25.292.000 | |
| 5.02.02.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 18.180.000 | 18.180.000 | |
| **5.02.02.2.03** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **727.494.900** | **727.494.900** | |
| 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 27.340.000 | 27.340.000 | |
| 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 15.445.500 | 15.445.500 | |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 65.196.100 | 65.196.100 | |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah | 200.667.200 | 200.667.200 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Daerah | | | |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 44.008.400 | 44.008.400 | |
| 5.02.02.2.03.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2.389.500 | 2.389.500 | |
| 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 162.203.000 | 162.203.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 5.02.02.2.03.08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 10.623.200 | 10.623.200 | |
| 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 71.007.000 | 71.007.000 | |
| 5.02.02.2.03.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 37.697.000 | 37.697.000 | |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 45.100.000 | 45.100.000 | |
| 5.02.02.2.03.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | 44.600.000 | 44.600.000 | |
| 5.02.02.2.03.13 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | 1.218.000 | 1.218.000 | |
| **5.02.02.2.04** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **150.685.833.100** | **150.685.833.100** | |
| 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 150.685.833.100 | 150.685.833.100 | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **3.043.145.500** | **3.043.145.500** | |
| **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **3.043.145.500** | **3.043.145.500** | |
| 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 22.612.000 | 22.612.000 | |
| 5.02.03.2.01.04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 14.189.600 | 14.189.600 | |
| 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 22.292.000 | 22.292.000 | |
| 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 7.491.000 | 7.491.000 | |
| 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 30.424.500 | 30.424.500 | |
| 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | 1.607.013.300 | 1.607.013.300 | |
| 5.02.03.2.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan | 80.085.500 | 80.085.500 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Barang Milik Daerah | | | |
| 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1.167.408.900 | 1.167.408.900 | |
| 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 21.008.500 | 21.008.500 | |
| 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 39.873.500 | 39.873.500 | |
| 5.02.03.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota | 30.746.700 | 30.746.700 | |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | **12.629.677.266** | **12.816.185.010** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | **12.629.677.266** | **12.816.185.010** | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.508.521.766** | **11.630.322.010** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah** | **9.960.000** | **5.870.000** | |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah | 1.150.000 | 750.000 | |
| 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.500.000 | 600.000 | |
| 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.000.000 | 1.040.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 760.000 | 760.000 | |
| 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.700.000 | 2.100.000 | |
| 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 700 | 620 | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **10.620.934.581** | **10.726.397.275** | |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.382.837.081 | 10.490.219.775 | |
| 5.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN | 83.167.500 | 81.247.500 | |
| 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 151.560.000 | 151.560.000 | |
| 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.120.000 | 2.120.000 | |
| 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.250.000 | 1.250.000 | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **148.947.185** | **198.374.735** | |
| 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.659.035 | 3.659.035 | |
| 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 43.966.750 | 48.544.250 | |
| 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan | 24.571.400 | 24.571.400 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penggandaan | | | |
| 5.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 48.000.000 | 48.000.000 | |
| 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | 28.750.000 | 73.600.050 | |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah** | **119.230.000** | **119.230.000** | |
| 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 119.230.000 | 119.230.000 | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **507.800.000** | **493.800.000** | |
| 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 505.200.000 | 491.200.000 | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **86.650.000** | **86.650.000** | |
| 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 66.650.000 | 66.650.000 | |
| 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **1.121.155.500** | **1.185.863.000** | |
| **5.02.04.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **1.121.155.500** | **1.185.863.000** | |
| 5.02.04.2.01.01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 125.500.000 | 125.500.000 | |
| 5.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 94.697.000 | 94.860.000 | |
| 5.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah | 0 | 5.000.000 | |
| 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak<br>Daerah | 180.000.000 | 179.376.000 | |
| 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan<br>Basis Data Pajak Daerah | 70.250.000 | 130.434.500 | |
| 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 403.558.500 | 403.558.500 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | 47.150.000 | 48.000.000 | |
| 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan<br>Pajak Daerah | 200.000.000 | 199.134.000 | |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **7.166.206.570** | **7.359.257.820** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **7.166.206.570** | **7.359.257.820** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **7.166.206.570** | **7.359.257.820** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.516.020.570** | **5.717.041.820** | |
| **5.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **16.240.000** | **18.514.000** | |
| 5.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.675.000 | 3.675.000 | |
| 5.03.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 3.300.000 | 3.300.000 | |
| 5.03.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.300.000 | 3.300.000 | |
| 5.03.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.115.000 | 1.115.000 | |
| 5.03.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.115.000 | 1.115.000 | |
| 5.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.130.000 | 3.404.000 | |
| 5.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.605.000 | 2.605.000 | |
| **5.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.472.274.375** | **4.596.544.625** | |
| 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.326.284.375 | 4.442.854.625 | |
| 5.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 133.430.000 | 141.130.000 | |
| 5.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.080.000 | 1.080.000 | |
| 5.03.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 11.480.000 | 11.480.000 | |
| **5.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **2.080.000** | **2.080.000** | |
| 5.03.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.080.000 | 2.080.000 | |
| **5.03.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **85.000.000** | **85.000.000** | |
| 5.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 31.000.000 | 31.000.000 | |
| 5.03.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 54.000.000 | 54.000.000 | |
| **5.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **255.346.899** | **367.468.899** | |
| 5.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.379.399 | 23.629.399 | |
| 5.03.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.183.000 | 14.183.000 | |
| 5.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.099.500 | 81.099.500 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan | 12.760.000 | 29.982.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penggandaan | | | |
| 5.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.625.000 | 31.425.000 | |
| 5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD | 107.300.000 | 187.150.000 | |
| **5.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah** | **383.879.296** | **411.714.296** | |
| 5.03.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 298.040.000 | 298.040.000 | |
| 5.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 72.924.000 | 100.759.000 | |
| 5.03.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.915.296 | 12.915.296 | |
| **5.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **186.200.000** | **118.720.000** | |
| 5.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.400.000 | 4.400.000 | |
| 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 181.800.000 | 114.320.000 | |
| **5.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **115.000.000** | **117.000.000** | |
| 5.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 5.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya | 70.000.000 | 65.000.000 | |
| 5.03.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000 | 32.000.000 | |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **1.650.186.000** | **1.642.216.000** | |
| **5.03.02.2.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi<br>Kepegawaian ASN** | **776.247.000** | **667.947.000** | |
| 5.03.02.2.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 18.950.000 | 18.950.000 | |
| 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan<br>PPPK | 233.600.000 | 134.350.000 | |
| 5.03.02.2.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 21.750.000 | 23.900.000 | |
| 5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 250.000.000 | 250.000.000 | |
| 5.03.02.2.01.09 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 12.920.000 | 12.920.000 | |
| 5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 149.027.000 | 149.027.000 | |
| 5.03.02.2.01.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 38.300.000 | 32.450.000 | |
| 5.03.02.2.01.12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi<br>Kepegawaian | 51.700.000 | 46.350.000 | |
| **5.03.02.2.02** | **Mutasi dan Promosi ASN** | **247.530.000** | **232.739.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | 36.650.000 | 37.609.000 | |
| 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 174.030.000 | 174.030.000 | |
| 5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | 36.850.000 | 21.100.000 | |
| **5.03.02.2.03** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **289.500.000** | **404.644.000** | |
| 5.03.02.2.03.02 | Pengelolaan Assessment Center | 232.785.000 | 350.840.000 | |
| 5.03.02.2.03.12 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | 49.215.000 | 27.890.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 5.03.02.2.03.14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 7.500.000 | 25.914.000 | |
| **5.03.02.2.04** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **336.909.000** | **336.886.000** | |
| 5.03.02.2.04.01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 16.735.000 | 16.735.000 | |
| 5.03.02.2.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 39.533.000 | 39.533.000 | |
| 5.03.02.2.04.03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 81.925.000 | 81.925.000 | |
| 5.03.02.2.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 108.660.000 | 108.660.000 | |
| 5.03.02.2.04.05 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | 19.025.000 | 19.025.000 | |
| 5.03.02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | 25.843.000 | 14.550.000 | |
| 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 28.938.000 | 25.458.000 | |
| 5.03.02.2.04.09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | 7.400.000 | 9.880.000 | |
| 5.03.02.2.04.10 | Evaluasi Disiplin ASN | 8.850.000 | 21.120.000 | |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **1.073.771.000** | **997.290.000** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **1.073.771.000** | **997.290.000** | |
| **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **1.073.771.000** | **997.290.000** | |
| **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **1.073.771.000** | **997.290.000** | |
| **5.04.02.2.02** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **1.073.771.000** | **997.290.000** | |
| 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 538.443.000 | 539.973.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.04.02.2.02.08 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 535.328.000 | 457.317.000 | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **438.605.000** | **503.755.000** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **438.605.000** | **503.755.000** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **438.605.000** | **503.755.000** | |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **438.605.000** | **503.755.000** | |
| **5.05.02.2.01** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **179.160.000** | **179.160.000** | |
| 5.05.02.2.01.01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan | 86.480.000 | 86.480.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Otonomi Daerah | | | |
| 5.05.02.2.01.05 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 92.680.000 | 92.680.000 | |
| **5.05.02.2.02** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **86.480.000** | **86.480.000** | |
| 5.05.02.2.02.04 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | 86.480.000 | 86.480.000 | |
| **5.05.02.2.03** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **172.965.000** | **238.115.000** | |
| 5.05.02.2.03.01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 86.480.000 | 71.255.000 | |
| 5.05.02.2.03.07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 0 | 93.840.000 | |
| 5.05.02.2.03.13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | 86.485.000 | 73.020.000 | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **11.155.656.705** | **11.121.460.264** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **INSPEKTORAT KABUPATEN** | **11.155.656.705** | **11.121.460.264** | |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **INSPEKTORAT KABUPATEN** | **11.155.656.705** | **11.121.460.264** | |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **8.347.081.705** | **8.105.170.264** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **6.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **21.380.000** | **21.380.000** | |
| 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.980.000 | 4.980.000 | |
| 6.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 2.675.000 | 2.675.000 | |
| 6.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.600.000 | 2.600.000 | |
| 6.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.125.000 | 2.125.000 | |
| 6.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| 6.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.200.000 | 3.200.000 | |
| 6.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.750.000 | 3.750.000 | |
| **6.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.532.369.971** | **7.235.793.530** | |
| 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.453.389.971 | 7.119.193.530 | |
| 6.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 78.980.000 | 116.600.000 | |
| **6.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **95.868.734** | **187.309.000** | |
| 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 83.938.734 | 187.309.000 | |
| **6.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **409.243.000** | **460.143.000** | |
| 6.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 88.283.000 | 88.283.000 | |
| 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.900.000 | 40.900.000 | |
| 6.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 13.800.000 | 1.390.000 | |
| 6.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 62.500.000 | 67.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 203.760.000 | 262.570.000 | |
| **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **163.220.000** | **200.544.734** | |
| 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 6.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.000.000 | 82.324.734 | |
| 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 126.220.000 | 106.220.000 | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **2.534.805.000** | **2.768.665.000** | |
| **6.01.02.2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **2.335.585.000** | **2.469.315.000** | |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 306.340.000 | 306.340.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 935.850.000 | 1.212.610.000 | |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | 27.030.000 | 22.610.000 | |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | 27.030.000 | 27.030.000 | |
| 6.01.02.2.01.05 | Pengawasan Desa | 207.230.000 | 193.290.000 | |
| 6.01.02.2.01.06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | 18.020.000 | 18.020.000 | |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 814.085.000 | 689.415.000 | |
| **6.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **199.220.000** | **299.350.000** | |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 18.000.000 | 18.000.000 | |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 181.220.000 | 281.350.000 | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **273.770.000** | **247.625.000** | |
| **6.01.03.2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **268.770.000** | **247.625.000** | |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 125.100.000 | 121.100.000 | |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 66.075.000 | 66.075.000 | |
| 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 24.895.000 | 15.250.000 | |
| 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 52.700.000 | 45.200.000 | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | **66.014.656.053** | **66.479.055.316** | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **KECAMATAN MAROS BARU** | **6.350.663.114** | **6.410.767.129** | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **KECAMATAN MAROS BARU** | **5.570.663.114** | **5.630.767.129** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.757.654.614** | **4.821.488.629** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.850.000** | **3.850.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 550.000 | 550.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 550.000 | 550.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 550.000 | 550.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 550 | 550 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 550.000 | 550.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | 550.000 | 550.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 550 | 550 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.502.800.114** | **4.487.904.129** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.463.310.114 | 4.448.414.129 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **12.500.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 12.500.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **46.754.500** | **98.754.500** | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.095.000 | 2.095.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.059.500 | 9.059.500 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.750.000 | 3.750.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000 | 31.500.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 21.850.000 | 52.350.000 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0** | **37.500.000** | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 37.500.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **192.750.000** | **164.480.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 182.750.000 | 154.480.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **11.500.000** | **16.500.000** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.500.000 | 9.500.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **657.050.000** | **657.050.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **2.050.000** | **2.050.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **648.850.000** | **648.850.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 646.800.000 | 646.800.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan kepada Camat** | **6.150.000** | **6.150.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang<br>Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **51.383.500** | **53.533.500** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **51.383.500** | **53.533.500** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 15.933.500 | 18.083.500 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 35.450.000 | 35.450.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **2.950.000** | **2.950.000** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **2.950.000** | **2.950.000** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2.950.000 | 2.950.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **101.625.000** | **94.625.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **101.625.000** | **94.625.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 42.475.000 | 45.475.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 59.150.000 | 49.150.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **0** | **1.120.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **0** | **1.120.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 0 | 1.120.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0001** | **Kelurahan BAJU BODOA** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **DESA DAN KELURAHAN** | | | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0002** | **Kelurahan BAJI PAMAI** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0003** | **Kelurahan PALLANTIKANG** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **KECAMATAN BANTIMURUNG** | **4.842.058.536** | **4.984.431.326** | |
| **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **KECAMATAN BANTIMURUNG** | **4.322.058.536** | **4.464.431.326** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.740.014.536** | **3.917.212.326** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.745.000** | **6.745.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.235.000 | 1.235.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 760.000 | 760.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 760.000 | 760.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 760 | 760 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 760.000 | 760.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.235.000 | 1.235.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.235.000 | 1.235.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.431.722.036** | **3.499.094.826** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.392.232.036 | 3.459.604.826 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **109.467.500** | **219.292.500** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.800.000 | 2.800.000 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.670.000 | 3.670.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23.722.500 | 23.722.500 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.425.000 | 7.425.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.550.000 | 58.675.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 51.300.000 | 123.000.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **157.620.000** | **157.620.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.640.000 | 8.640.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 148.980.000 | 148.980.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **34.460.000** | **34.460.000** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.460.000 | 27.460.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **419.969.000** | **419.969.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **4.175.000** | **4.175.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.175.000 | 4.175.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **404.275.000** | **404.275.000** | |
| 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 4.075.000 | 4.075.000 | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 400.200.000 | 400.200.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **11.519.000** | **11.519.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 4.075.000 | 4.075.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 3.369.000 | 3.369.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4.075.000 | 4.075.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **56.950.000** | **59.125.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **55.075.000** | **57.250.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 24.350.000 | 26.525.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah | 30.725.000 | 30.725.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Kecamatan | | | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **1.875.000** | **1.875.000** | |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | 1.875.000 | 1.875.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **3.075.000** | **3.075.000** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **3.075.000** | **3.075.000** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 3.075.000 | 3.075.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **98.125.000** | **61.125.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **98.125.000** | **61.125.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 37.450.000 | 37.450.000 | |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 3.175.000 | 3.175.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 57.500.000 | 20.500.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **3.925.000** | **3.925.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **3.925.000** | **3.925.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 3.925.000 | 3.925.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.02.0001** | **Kelurahan LEANG - LEANG** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.02.0002** | **Kelurahan KALABBIRANG** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **KECAMATAN CAMBA** | **4.667.357.235** | **4.564.627.481** | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **KECAMATAN CAMBA** | **4.147.357.235** | **4.044.627.481** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.663.942.735** | **3.549.492.981** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **7.000.000** | **7.000.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.280.959.420** | **3.103.229.666** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.241.469.420 | 3.063.739.666 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **34.750.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 34.750.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **168.000.315** | **196.530.315** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.999.915 | 4.999.915 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.713.400 | 27.713.400 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.103.000 | 8.103.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 11.250.000 | 21.750.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 111.934.000 | 129.964.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **154.983.000** | **154.983.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.113.000 | 12.113.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 142.870.000 | 142.870.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **53.000.000** | **53.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 46.000.000 | 46.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **400.800.000** | **413.600.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **10.000.000** | **10.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **390.800.000** | **385.800.000** | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 385.800.000 | 385.800.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **0** | **17.800.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 0 | 7.900.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 0 | 9.900.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **56.634.500** | **64.084.500** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **56.634.500** | **64.084.500** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 34.745.500 | 42.195.500 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 21.889.000 | 21.889.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **0** | **7.050.000** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **0** | **7.050.000** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 0 | 7.050.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **19.490.000** | **3.910.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **19.490.000** | **3.910.000** | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 19.490.000 | 3.910.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **6.490.000** | **6.490.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **6.490.000** | **6.490.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 6.490.000 | 6.490.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0001** | **Kelurahan CEMPANIGA** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0002** | **Kelurahan MARIO PULANA** | **260.000.000** | **260.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **KECAMATAN MALLAWA** | **3.369.830.723** | **3.380.600.947** | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **KECAMATAN MALLAWA** | **3.168.830.723** | **3.179.600.947** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.786.383.498** | **2.827.937.947** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.500.000** | **9.500.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.499.535.998** | **2.435.306.222** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.455.440.098 | 2.391.210.322 | |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.105.900 | 2.105.900 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1.000.000** | **11.000.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut | 0 | 10.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kelengkapannya | | | |
| 7.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **55.882.500** | **119.266.725** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 840.000 | 840.000 | |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.000.000 | 12.624.225 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.317.500 | 1.317.500 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6.850.000 | 6.850.000 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.875.000 | 4.875.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.500.000 | 28.500.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25.500.000 | 64.260.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **156.420.000** | **164.820.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 135.820.000 | 155.820.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **64.045.000** | **88.045.000** | |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.000.000 | 46.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.045.000 | 12.045.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **252.218.000** | **268.118.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **65.750.000** | **65.750.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 65.750.000 | 65.750.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **170.550.000** | **186.450.000** | |
| 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah | 3.150.000 | 3.150.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kecamatan | | | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 167.400.000 | 183.300.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **15.918.000** | **15.918.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 4.868.000 | 4.868.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | dengan Nonperizinan | | | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4.050.000 | 4.050.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **40.625.000** | **40.625.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **40.625.000** | **40.625.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 22.675.000 | 22.675.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 17.950.000 | 17.950.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **2.000.000** | **2.000.000** | |
| **7.01.04.7.03** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **2.000.000** | **2.000.000** | |
| 7.01.04.7.03.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **86.104.225** | **39.420.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **86.104.225** | **39.420.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 29.655.000 | 29.655.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 3.765.000 | 3.765.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 52.684.225 | 6.000.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **1.500.000** | **1.500.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1.500.000** | **1.500.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0001** | **Kelurahan SABILA** | **201.000.000** | **201.000.000** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **201.000.000** | **201.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **201.000.000** | **201.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **KECAMATAN TANRALILI** | **4.032.829.866** | **3.856.559.626** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **KECAMATAN TANRALILI** | **3.772.829.866** | **3.596.559.626** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.489.504.866** | **3.317.249.626** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **10.000.000** | **10.000.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.240.408.826** | **2.989.138.586** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.200.918.826 | 2.949.648.586 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **12.000.000** | **10.750.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000 | 10.750.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **68.071.040** | **151.426.040** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 844.540 | 844.540 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.614.000 | 1.614.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6.512.500 | 9.262.500 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.000.000 | 40.540.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.100.000 | 96.165.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **147.865.000** | **134.775.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.705.000 | 10.705.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 137.160.000 | 124.070.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **11.160.000** | **21.160.000** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.160.000 | 14.160.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **123.275.000** | **119.600.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **5.750.000** | **5.750.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5.750.000 | 5.750.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **103.275.000** | **99.600.000** | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 99.600.000 | 99.600.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **14.250.000** | **14.250.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan | 4.600.000 | 4.600.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Non Usaha | | | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 4.600.000 | 4.600.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.050.000 | 5.050.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **48.800.000** | **51.095.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **47.300.000** | **51.095.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 28.300.000 | 34.270.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19.000.000 | 16.825.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **5.050.000** | **5.050.000** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **5.050.000** | **5.050.000** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5.050.000 | 5.050.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **100.950.000** | **98.315.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100.950.000** | **98.315.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 40.475.000 | 50.990.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 57.325.000 | 47.325.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **5.250.000** | **5.250.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **5.250.000** | **5.250.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5.250.000 | 5.250.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.05.0001** | **Kelurahan BORONG** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **KECAMATAN BONTOA** | **3.735.298.699** | **3.763.516.993** | |
| **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **KECAMATAN BONTOA** | **3.207.098.699** | **3.235.316.993** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.960.068.579** | **2.988.286.873** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.690.000** | **9.690.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.690.000 | 1.690.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.670.343.579** | **2.623.561.873** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.630.853.579 | 2.584.071.873 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **108.885.000** | **173.885.000** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.000.000 | 24.680.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.190.000 | 4.190.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.000.000 | 27.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 61.695.000 | 107.015.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **159.150.000** | **159.150.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 150.150.000 | 150.150.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12.000.000** | **22.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.000.000 | 17.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **22.500.000** | **22.500.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **10.300.000** | **10.300.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.300.000 | 10.300.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **12.200.000** | **12.200.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 3.100.000 | 3.100.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 3.100.000 | 3.100.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **79.580.120** | **79.580.120** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **79.580.120** | **79.580.120** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 35.200.000 | 35.200.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 44.380.120 | 44.380.120 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **4.600.000** | **4.600.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **4.600.000** | **4.600.000** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4.600.000 | 4.600.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **117.950.000** | **117.950.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **117.950.000** | **117.950.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 68.700.000 | 68.700.000 | |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 2.800.000 | 2.800.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 46.450.000 | 46.450.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN** | **22.400.000** | **22.400.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **22.400.000** | **22.400.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 22.400.000 | 22.400.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.06.0001** | **Kelurahan Bontoa** | **528.200.000** | **528.200.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **328.200.000** | **328.200.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **268.200.000** | **268.200.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 268.200.000 | 268.200.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **KECAMATAN TURIKALE** | **11.790.938.461** | **11.962.883.157** | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **KECAMATAN TURIKALE** | **9.970.938.461** | **10.142.883.157** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.884.848.461** | **8.054.858.157** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.030.000** | **9.830.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 890.000 | 890.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 720.000 | 720.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 460.000 | 1.860.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 720 | 720 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 460.000 | 1.860.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 890.000 | 1.890.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 890 | 1.890.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.509.688.461** | **7.606.633.157** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.470.198.461 | 7.567.143.157 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **21.250.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 21.250.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **81.420.000** | **136.630.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.968.800 | 2.968.800 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.880.000 | 2.880.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.483.200 | 22.483.200 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.988.000 | 8.988.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.600.000 | 24.600.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.500.000 | 74.710.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **281.180.000** | **261.820.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.300.000 | 12.300.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 268.880.000 | 249.520.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **7.530.000** | **18.695.000** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.530.000 | 7.530.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 11.165.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **1.971.350.000** | **1.971.350.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **6.200.000** | **6.200.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6.200.000 | 6.200.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **1.957.200.000** | **1.957.200.000** | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1.957.200.000 | 1.957.200.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **7.950.000** | **7.950.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 2.650.000 | 2.650.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 2.650.000 | 2.650.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2.650.000 | 2.650.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **50.090.000** | **53.775.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **47.690.000** | **51.375.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 20.200.000 | 22.475.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 27.490.000 | 28.900.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **2.400.000** | **2.400.000** | |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **2.650.000** | **2.650.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **2.650.000** | **2.650.000** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2.650.000 | 2.650.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **62.000.000** | **60.250.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **62.000.000** | **60.250.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 21.750.000 | 41.000.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 40.250.000 | 19.250.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0001** | **Kelurahan PETTUADAE** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0002** | **Kelurahan RAYA** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0003** | **Kelurahan TAROADA** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **DESA DAN KELURAHAN** | | | | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0004** | **Kelurahan ADATONGENG** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0005** | **Kelurahan TURIKALE** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0006** | **Kelurahan ALLIRITENGNGAE** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.07.0007** | **Kelurahan BORIBELLAYYA** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **KECAMATAN MARUSU** | **2.538.523.298** | **2.589.564.416** | |
| **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **KECAMATAN MARUSU** | **2.538.523.298** | **2.589.564.416** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.362.282.298** | **2.423.323.416** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.965.000** | **4.965.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 975.000 | 975.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 510.000 | 510.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 510.000 | 510.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 510 | 510 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 510.000 | 510.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | 975.000 | 975.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 975 | 975 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.167.215.298** | **2.143.256.416** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.128.165.298 | 2.104.206.416 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.050.000 | 39.050.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **10.550.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 10.550.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **78.602.000** | **170.032.000** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.985.000 | 1.985.000 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.872.000 | 1.872.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 16.285.000 | 18.220.000 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.850.000 | 5.375.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.000.000 | 31.500.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 41.610.000 | 111.080.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **101.000.000** | **82.770.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.300.000 | 7.300.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 93.700.000 | 75.470.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **10.500.000** | **11.750.000** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.500.000 | 11.750.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **11.910.000** | **11.910.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **3.450.000** | **3.450.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3.450.000 | 3.450.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **8.460.000** | **8.460.000** | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 3.050.000 | 3.050.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.410.000 | 5.410.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **72.041.000** | **51.541.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **72.041.000** | **51.541.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 31.441.000 | 31.441.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 40.600.000 | 20.100.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **1.470.000** | **1.470.000** | |
| **7.01.04.7.03** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **1.470.000** | **1.470.000** | |
| 7.01.04.7.03.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1.470.000 | 1.470.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **88.230.000** | **98.730.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **88.230.000** | **98.730.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 32.430.000 | 42.930.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 55.800.000 | 55.800.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **2.590.000** | **2.590.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **2.590.000** | **2.590.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2.590.000 | 2.590.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **KECAMATAN LAU** | **8.268.784.211** | **8.118.352.699** | |
| **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **KECAMATAN LAU** | **8.028.784.211** | **7.878.352.699** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.948.269.211** | **5.768.037.699** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi** | **5.000.000** | **5.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | **Kinerja Perangkat Daerah** | | | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.702.784.111** | **5.451.552.599** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.663.294.111 | 5.412.062.599 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **2.250.000** | **2.250.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **58.205.100** | **114.205.100** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.529.100 | 1.781.100 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.097.000 | 4.380.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.534.000 | 10.534.000 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.550.000 | 7.900.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18.000.000 | 43.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.495.000 | 46.610.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **165.530.000** | **165.530.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.530.000 | 11.530.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 154.000.000 | 154.000.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **14.500.000** | **29.500.000** | |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 15.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | 7.000.000 | 7.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Bangunan Lainnya | | | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **1.180.955.000** | **1.206.755.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **2.255.000** | **2.255.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2.255.000 | 2.255.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **1.171.200.000** | **1.197.000.000** | |
| 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1.168.200.000 | 1.194.000.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **7.500.000** | **7.500.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **831.945.000** | **835.945.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **31.945.000** | **35.945.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 20.675.000 | 24.675.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 11.270.000 | 11.270.000 | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **800.000.000** | **800.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 800.000.000 | 800.000.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **2.050.000** | **2.050.000** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **2.050.000** | **2.050.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **62.815.000** | **62.815.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **62.815.000** | **62.815.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 20.220.000 | 20.220.000 | |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 40.545.000 | 40.545.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **2.750.000** | **2.750.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **2.750.000** | **2.750.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.09.0001** | **Kelurahan ALLEPOLEA** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.09.0002** | **Kelurahan SOREANG** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.0.00.0.00.09.0003** | **Kelurahan MATTIRODECENG** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.09.0004** | **Kelurahan MACCINI BAJI** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **KECAMATAN CENRANA** | **2.417.064.439** | **2.505.430.081** | |
| **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **KECAMATAN CENRANA** | **2.417.064.439** | **2.505.430.081** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.225.366.439** | **2.316.432.081** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.845.000** | **6.845.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.215.000 | 1.215.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 800.000 | 800.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 800.000 | 800.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 800 | 800 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 800.000 | 800.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.215.000 | 1.215.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.215.000 | 1.215.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.878.122.439** | **1.891.488.081** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.838.632.439 | 1.851.998.081 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **7.500.000** | **7.500.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 7.500.000 | 7.500.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **153.359.000** | **231.059.000** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.502.000 | 9.502.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 28.057.000 | 28.057.000 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 13.000.000 | 52.200.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 92.800.000 | 131.300.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **130.440.000** | **130.440.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.640.000 | 11.640.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 118.800.000 | 118.800.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **49.100.000** | **49.100.000** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 49.100.000 | 49.100.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **19.825.000** | **19.825.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **5.075.000** | **5.075.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5.075.000 | 5.075.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **4.050.000** | **4.050.000** | |
| 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 4.050.000 | 4.050.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **10.700.000** | **10.700.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 1.700.000 | 1.700.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **55.303.000** | **55.303.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **55.303.000** | **55.303.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 23.978.000 | 23.978.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah | 31.325.000 | 31.325.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Kecamatan | | | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **4.000.000** | **4.000.000** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **4.000.000** | **4.000.000** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **105.870.000** | **96.870.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **105.870.000** | **96.870.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 43.590.000 | 50.590.000 | |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 2.365.000 | 6.365.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 59.915.000 | 39.915.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **6.700.000** | **13.000.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **6.700.000** | **13.000.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 6.700.000 | 13.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.11.0000** | **KECAMATAN MONCONGLOE** | **2.429.660.166** | **2.632.664.938** | |
| **7.01.0.00.0.00.11.0000** | **KECAMATAN MONCONGLOE** | **2.429.660.166** | **2.632.664.938** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.190.961.216** | **2.383.465.988** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.947.000** | **9.947.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.950.000 | 1.950.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 997.000 | 997.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.911.036.926** | **2.039.041.698** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.871.546.926 | 1.999.551.698 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **8.000.000** | **27.000.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 19.000.000 | |
| 7.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **85.382.000** | **128.882.000** | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.862.000 | 9.862.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30.000.000 | 50.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40.520.000 | 64.020.000 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **27.500.000** | **27.500.000** | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.500.000 | 27.500.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **127.095.290** | **129.095.290** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 13.000.000 | 13.000.000 | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.895.290 | 6.895.290 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 107.200.000 | 109.200.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **22.000.000** | **22.000.000** | |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **63.095.000** | **63.095.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **13.400.000** | **13.400.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 13.400.000 | 13.400.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **29.695.000** | **29.695.000** | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 29.695.000 | 29.695.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **20.000.000** | **20.000.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **71.455.000** | **81.955.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **66.455.000** | **76.955.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 31.995.000 | 42.495.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 34.460.000 | 34.460.000 | |
| **7.01.03.2.05** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)** | **5.000.000** | **5.000.000** | |
| 7.01.03.2.05.03 | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat | 5.000.000 | 5.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Desa dan Kelurahan | | | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **9.998.700** | **9.998.700** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **9.998.700** | **9.998.700** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 9.998.700 | 9.998.700 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **89.650.000** | **89.650.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **89.650.000** | **89.650.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 39.500.000 | 39.500.000 | |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 10.150.000 | 10.150.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **4.500.250** | **4.500.250** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **4.500.250** | **4.500.250** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 4.500.250 | 4.500.250 | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000** | **KECAMATAN TOMPOBULU** | **2.596.207.632** | **2.738.998.683** | |
| **7.01.0.00.0.00.12.0000** | **KECAMATAN TOMPOBULU** | **2.596.207.632** | **2.738.998.683** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.473.407.632** | **2.632.818.683** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.850.000** | **4.150.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | 700 | 700 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Daerah | | | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 625.000 | 625.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 625.000 | 625.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 625 | 625 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 625.000 | 625.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 950.000 | 950.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.227.238.632** | **2.295.029.683** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.187.748.632 | 2.255.539.683 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **10.500.000** | **10.500.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 10.500.000 | 10.500.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100.219.000** | **179.039.000** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.605.000 | 3.605.000 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.484.000 | 18.844.000 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 14.000.000 | 40.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 57.130.000 | 106.590.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **113.600.000** | **106.100.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.100.000 | 10.300.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 103.500.000 | 95.800.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **17.000.000** | **38.000.000** | |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12.000.000 | 30.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.000.000 | 8.000.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **21.050.000** | **21.055.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** | **5.000.000** | **10.005.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5.000.000 | 10.005.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **11.050.000** | **11.050.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 3.100.000 | 3.100.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 2.950.000 | 2.950.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **40.925.000** | **40.925.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **40.925.000** | **40.925.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 29.675.000 | 29.675.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 11.250.000 | 11.250.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **5.000.000** | **5.000.000** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **5.000.000** | **5.000.000** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **52.350.000** | **35.800.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **52.350.000** | **35.800.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 8.000.000 | 8.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 44.350.000 | 27.800.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **3.475.000** | **3.400.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **3.475.000** | **3.400.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 3.475.000 | 3.400.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.13.0000** | **KECAMATAN SIMBANG** | **2.601.302.351** | **2.550.120.545** | |
| **7.01.0.00.0.00.13.0000** | **KECAMATAN SIMBANG** | **2.601.302.351** | **2.550.120.545** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.491.052.351** | **2.442.020.545** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.000.000** | **3.000.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.220.079.351** | **2.093.897.545** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.180.589.351 | 2.054.407.545 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **13.950.000** | **13.950.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 13.950.000 | 13.950.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **117.763.000** | **192.813.000** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.483.000 | 2.483.000 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.878.000 | 2.878.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.894.000 | 24.894.000 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.800.000 | 10.350.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.000.000 | 32.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70.708.000 | 120.208.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **109.260.000** | **109.260.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.560.000 | 7.560.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 101.700.000 | 101.700.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **27.000.000** | **29.100.000** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24.000.000 | 26.100.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **5.500.000** | **5.500.000** | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **5.500.000** | **5.500.000** | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.500.000 | 5.500.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **34.200.000** | **50.690.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **34.200.000** | **50.690.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 14.200.000 | 30.690.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **64.750.000** | **46.110.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **64.750.000** | **46.110.000** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, | 30.900.000 | 30.900.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 33.850.000 | 15.210.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **5.800.000** | **5.800.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **5.800.000** | **5.800.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5.800.000 | 5.800.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000** | **KECAMATAN MANDAI** | **6.374.137.322** | **6.420.537.295** | |
| **7.01.0.00.0.00.14.0000** | **KECAMATAN MANDAI** | **5.854.137.322** | **5.900.537.295** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.503.309.322** | **4.560.159.295** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.770.000** | **4.770.000** | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 550.000 | 550.000 | |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 550.000 | 550.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 550.000 | 550.000 | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 550 | 550 | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 550.000 | 550.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 550.000 | 550.000 | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.470.000 | 1.470.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.223.914.789** | **4.195.314.762** | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.184.424.789 | 4.155.824.762 | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 39.490.000 | 39.490.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **21.750.000** | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 21.750.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **87.481.533** | **151.059.533** | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.988.080 | 1.988.080 | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.141.000 | 10.304.000 | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17.602.453 | 21.287.453 | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.450.000 | 4.450.000 | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.200.000 | 14.280.000 | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | 50.100.000 | 98.750.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Konsultasi SKPD | | | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **174.990.000** | **165.950.000** | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.450.000 | 6.450.000 | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 162.540.000 | 153.500.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12.153.000** | **21.315.000** | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.855.000 | 9.210.000 | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.298.000 | 12.105.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **1.212.160.000** | **1.212.160.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **6.040.000** | **6.040.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6.040.000 | 6.040.000 | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **1.193.400.000** | **1.193.400.000** | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1.193.400.000 | 1.193.400.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **12.720.000** | **12.720.000** | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 3.940.000 | 3.940.000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 3.940.000 | 3.940.000 | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4.840.000 | 4.840.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **52.798.000** | **52.798.000** | |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **52.798.000** | **52.798.000** | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 28.348.000 | 28.348.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 24.450.000 | 24.450.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **8.010.000** | **8.010.000** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **8.010.000** | **8.010.000** | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 8.010.000 | 8.010.000 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **74.070.000** | **63.620.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **74.070.000** | **63.620.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 21.920.000 | 21.920.000 | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 52.150.000 | 41.700.000 | |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **3.790.000** | **3.790.000** | |
| **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **3.790.000** | **3.790.000** | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 3.790.000 | 3.790.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.14.0001** | **Kelurahan HASANUDDIN** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **7.01.0.00.0.00.14.0002** | **Kelurahan Bontoa** | **260.000.000** | **260.000.000** | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **60.000.000** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **200.000.000** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **5.891.939.003** | **23.201.406.709** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **5.891.939.003** | **23.201.406.709** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **5.891.939.003** | **23.201.406.709** | |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.033.376.454** | **2.851.226.284** | |
| **8.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.000.000** | **12.000.000** | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 8.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 8.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 8.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 8.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.200.000 | 2.200.000 | |
| 8.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.900.000 | 1.900.000 | |
| 8.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 8.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| **8.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.675.592.892** | **2.484.522.722** | |
| 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.536.952.492 | 2.354.502.322 | |
| 8.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 132.220.000 | 123.600.000 | |
| 8.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.920.400 | 3.920.400 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| **8.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **9.800.000** | |
| 8.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 9.800.000 | |
| **8.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **211.243.562** | **210.678.562** | |
| 8.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.059.562 | 2.059.562 | |
| 8.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.665.000 | 38.715.000 | |
| 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.000.000 | 7.202.000 | |
| 8.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| 8.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136.019.000 | 134.202.000 | |
| **8.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **134.540.000** | **134.225.000** | |
| 8.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| 8.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 32.740.000 | 32.425.000 | |
| 8.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100.500.000 | 100.500.000 | |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **923.391.450** | **1.303.391.450** | |
| **8.01.02.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **923.391.450** | **1.303.391.450** | |
| 8.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 885.106.000 | 1.285.106.000 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| 8.01.02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 11.455.450 | 11.455.450 | |
| 8.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 6.830.000 | 6.830.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **1.183.009.499** | **17.845.539.375** | |
| **8.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **1.183.009.499** | **17.845.539.375** | |
| 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1.177.009.499 | 17.839.539.375 | |
| 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **15.650.000** | **15.650.000** | |
| **8.01.04.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **15.650.000** | **15.650.000** | |
| 8.01.04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 9.650.000 | 9.650.000 | |
| 8.01.04.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **166.511.600** | **165.661.600** | |
| **8.01.05.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **166.511.600** | **165.661.600** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran | | Ket |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, | 153.511.600 | 153.511.600 | |
| | | **Sebelum** | **Sesudah** | |
| | Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan<br>Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 6.500.000 | 5.650.000 | |
| 8.01.05.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 6.500.000 | 6.500.000 | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **570.000.000** | **1.019.938.000** | |
| **8.01.06.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **570.000.000** | **1.019.938.000** | |
| 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 83.699.000 | 90.477.500 | |
| 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 36.301.000 | 30.122.500 | |
| 8.01.06.2.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan<br>Daerah Kabupaten/Kota | 450.000.000 | 899.338.000 | |

## 4.2. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, HIBAH, MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2023

Belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, sosial, modal, tidak terduga dan belanja transfer merupakan komponen belanja daerah yang penggunaaannya tidak diperuntukkan secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Secara keseluruhan, perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja tersebut diproyeksikan mengalami Peningkatan senilai **Rp104.694.364.770,00** menjadi **Rp1.584.383.017.384,00** pada perubahan anggaran tahun 2023. Perubahan plafon anggaran sementara untuk Belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, sosial, modal, tidak terduga dan belanja transfer seperti disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 4.2**

**Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**

**Tahun Anggaran 2023**

| No | Uraian | Plafon Anggaran | |
|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Belanja Pegawai | 610.068.956.568 | 623.870.026.483 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 360.425.409.200 | 379.601.541.425 |
| 3 | Belanja Hibah | 16.663.068.619 | 45.507.920.032 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 0 | 835.691.400 |
| 5 | BELANJA MODAL | 341.870.095.627 | 383.906.715.444 |
| | Belanja Modal Tanah | 2.323.054.300 | 2.323.054.300 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 66.402.933.704 | 69.503.634.045 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 88.366.715.000 | 106.994.742.738 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 177.331.826.423 | 196.600.834.661 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.445.566.200 | 8.484.449.700 |
| 6 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 147.661.122.600 | 147.661.122.600 |
| | **TOTAL** | **1.479.688.652.614** | **1.584.383.017.384** |

# BAB V

# RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pula pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok,jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada Perangkat Daerah

Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp119.112.762.521,00.** Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp43.896.406.000,00** maka pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp75.216.356.521,00.**

1. **Penerimaan Pembiayaan,** dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan anggaran Tahun 2023, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp119.112.762.521,00.** Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok 2023 sebesar **Rp43.896.406.000,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp75.216.356.521,00.**dengan rincian meliputi:
   - **SILPA Tahun Sebelumnya,** penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Pada perubahan anggaran Tahun anggaran 2023 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp119.112.762.521,00.** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2023 sebesar **Rp43.896.406.000,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp75.216.356.521,00**. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut;
     - Kas di Daerah senilai **Rp20.025.306.919,59**
     - Kas di BLUD senilai **Rp19.783.268.393,00**
     - Kas Dana BOS senilai **Rp48.434.360,00**
2. **Pengeluaran Pembiayaan,** dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2023, Pengeluaran pembiayakan ditargetkan sebesar **Rp0,00.** Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2023 yaitu **Rp2.000.000.000,00** maka Alokasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan senilai **Rp2.000.000.000,00.**

- **Penyertaan Modal Daerah,** dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal Daerah ditargetkan sebesar **nihil** pada perubahan anggaran tahun 2023.

**Tabel 5.1**

**Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan**

**Tahun Anggaran 2023**

| Kode | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah | Target Tahun Anggaran Berkenaan | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **43.896.406.000** | **119.112.762.521** | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 43.896.406.000 | 119.112.762.521 | |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **43.896.406.000** | **119.112.762.521** | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **2.000.000.000** | **0** | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.000.000.000 | 0 | |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **2.000.000.000** | **0** | |
| | **Pembiayaan Netto** | **41.896.406.000** | **119.112.762.521** | |

# BAB VI

# PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dibuat, untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Maros, 15 Agustus 2023

KETUA DPRD MAROS

**H.A. PATARAI AMIR, SE**

BUPATI MAROS,

**H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H**